

## **BAB IV**

### **PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DAERAH**

Dalam menyusun suatu perencanaan pembangunan daerah, perumusan permasalahan dan isu strategis sangat menentukan *alternative* / solusi yang bisa diambil sebagai dasar penentuan kebijakan. Untuk itu analisis permasalahan dan isu strategis harus mampu mengidentifikasi pokok suatu permasalahan / isu sekaligus mengenali faktor penentu keberhasilannya berdasarkan akar masalahnya. Kemudian perlu ditentukan prioritas masalah / isu yang akan diselesaikan dalam kerangka pembangunan 5 (lima) tahun ke depan. Oleh karena itu hasil analisis permasalahan pembangunan dan isu strategis daerah merupakan satu kesatuan yang harus dijadikan dasar pemikiran untuk merumuskan kebijakan mulai dari tujuan dan sasaran, strategi, arah kebijakan hingga program dan kegiatan prioritas.

#### **4.1. PERMASALAHAN**

Permasalahan pembangunan merupakan “*gap expectation*” antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan atau kesenjangan antara realisasi kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan target pembangunan (harapan) yang telah direncanakan. Tujuan dari perumusan permasalahan pembangunan daerah adalah untuk mengidentifikasi berbagai faktor yang memengaruhi keberhasilan / kegagalan kinerja pembangunan daerah di masa lalu untuk menentukan langkah yang tepat dimasa depan. Suatu permasalahan daerah dianggap memiliki nilai prioritas jika berhubungan atau mempengaruhi pencapaian visi-misi RPJMD. Untuk menentukan prioritas tersebut maka perlu dilakukan penelaahan dan pengakajian data dan informasi di Bab II serta menelaah permasalahan pembangunan dalam konteks kebijakan nasional/provinsi yang bersifat mandatori.

Berkaitan dengan perubahan RPJMD Kab. Tegal 2019-2024, fokus identifikasi dan analisis permasalahan dilakukan terhadap permasalahan yang mempengaruhi dan mengakselerasi terhadap pencapaian visi-misi yang diterjemahkan dalam tujuan dan sasaran RPJMD.

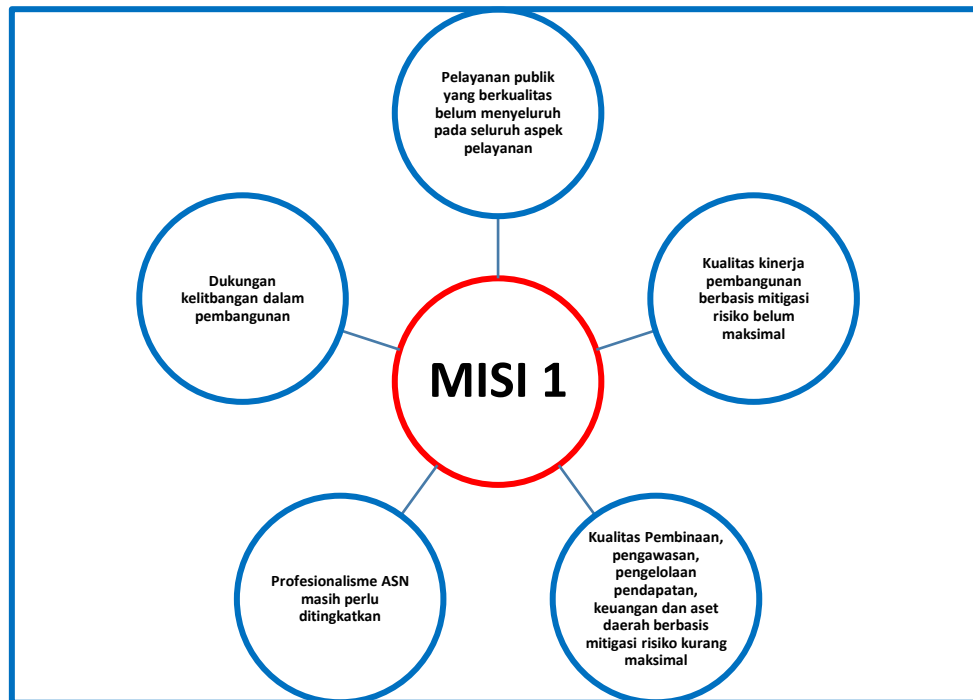
##### **4.1.1 Permasalahan Pencapaian Misi**

###### **a. Permasalahan Pencapaian Misi Ke-1**

Hasil identifikasi dan analisis terhadap Misi 1 RPJMD 2019-2024 “**Mewujudkan Pemerintahan yang Bersih, Terbuka, Akuntabel dan Efektif Melayani Rakyat**” terdapat beberapa pokok permasalahan yang harus diselesaikan antara lain:

- ✓ Pelayanan publik yang berkualitas belum menyeluruh pada seluruh aspek pelayanan
- ✓ Kualitas kinerja pembangunan belum maksimal
- ✓ Dukungan kelitbangan dalam pembangunan masih rendah
- ✓ Kualitas pembinaan, pengawasan, pengelolaan pendapatan, keuangan dan aset daerah kurang maksimal
- ✓ Profesionalisme ASN masih perlu ditingkatkan

**Gambar 4. 1**  
**Keterkaitan Pokok Permasalahan Dalam Pencapaian Misi Pertama**



*Sumber: Analisis Bappeda dan Litbang Kab. Tegal, 2021*

Dalam rangka akselerasi pelaksanaan **MISI PERTAMA**, faktor penentu keberhasilan harus mampu teridentifikasi secara jelas. Untuk itu akar masalah prioritas pada tiap-tiap pokok permasalahan harus dapat dirumuskan secara tepat karena berpengaruh pada pilihan program dan kegiatan prioritas apa yang dapat dilakukan Pemerintah Kabupaten Tegal secara efektif dan efisien. Adapun identifikasi akar masalah masing-masing pokok permasalahan pada Misi Pertama sebagai berikut:

**Tabel 4. 1**

**Hasil Identifikasi dan Analisis Permasalahan Pembangunan MISI PERTAMA**

| No                                                                                                   | Pokok Permasalahan                                                              | Permasalahan                                                                | Akar Masalah                                                          | Urusan     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------|
| <b>Misi I: “Mewujudkan Pemerintahan Yang Bersih, Terbuka, Akuntabel Dan Efektif Melayani Rakyat”</b> |                                                                                 |                                                                             |                                                                       |            |
|                                                                                                      | Pelayanan Publik yang Berkualitas Belum Menyeluruh pada Seluruh Aspek Pelayanan | Keamanan Informasi untuk Pelayanan Publik Berbasis Elektronik Belum Memadai | Belum Keseluruhan System Elektronik Menggunakan Sertifikat Elektronik | Persandian |
|                                                                                                      |                                                                                 | Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi untuk Pemerintahan yang    | Sarana dan Prasarana Disejumlah Perangkat Daerah Masih Terbatas       | Kominfo    |

| No | Pokok Permasalahan | Permasalahan                                                                                               | Akar Masalah                                                                               | Urusan                   |
|----|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
|    |                    | Efektif dan Efisien Belum Memadai                                                                          |                                                                                            |                          |
|    |                    | Terbatasnya Layanan Publik yang Terintegrasi dan Dapat Diakses Secara <i>Online</i>                        | Tidak Semua Layanan Publik Dapat Terintegrasi                                              | Kominfo                  |
|    |                    | Penyebarluasan Informasi Tentang Pelayanan Publik Masih Terbatas                                           | Belum Semua Informasi Tentang Layanan Publik Terintegrasi                                  | Kominfo                  |
|    |                    | Ketersediaan Data dan Informasi yang Dibutuhkan Dalam Pelayanan Publik Masih Rendah dan Kurang Berkualitas | Belum Keseluruhan Sistem Elektronik Menggunajan Sertifikat Elektronik                      | Statistik                |
|    |                    | Belum Optimalnya Pelayanan Publik kepada Masyarakat di Kecamatan                                           | Belum Optimalnya Pelayanan Perijinan dan Administrasi Pemerintahan yang Baik               | Unsur Kecamatan          |
|    |                    | Kurang Optimalnya Kemandirian Desa/ Kelurahan dalam Mengelola Pembangunan Kewilayahan                      | Kurang Maksimalnya Kordinasi dengan Lembaga Kemasyarakatan Desa                            | Unsur Kecamatan          |
|    |                    |                                                                                                            | Belum Aktifnya Lembaga Kemasyarakatan (LPMD, PKK, RT/RW, Karang Taruna, Posyandu) di Desa  | Unsur Kecamatan          |
|    |                    |                                                                                                            | Masih Rendahnya Tingkat Kehadiran Masyarakat dalam Musrenbang Desa/Kelurahan dan Kecamatan | Unsur Kecamatan          |
|    |                    | Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Publik Belum Optimal                                                      | Pelayanan Publik Belum Sesuai dengan SPM                                                   | Unsur Sekretariat Daerah |
|    |                    |                                                                                                            | Kualitas Pelayanan Kecamatan yang Belum Terbina dengan Baik                                | Unsur Sekretariat Daerah |
|    |                    |                                                                                                            | Banyak Produk Hukum Yang Belum Difasilitasi Secara Maksimal.                               | Unsur Sekretariat Daerah |
|    |                    |                                                                                                            | Belum Optimalnya Pemenuhan Pelayanan Sosial Keagamaan                                      | Unsur Sekretariat Daerah |
|    |                    |                                                                                                            | Layanan Administrasi Keuangan OPD Belum Maksimal                                           | Unsur Sekretariat Daerah |
|    |                    |                                                                                                            | Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekda Belum Optimal                                             | Unsur Sekretariat Daerah |

| No | Pokok Permasalahan                                                   | Permasalahan                                                                                             | Akar Masalah                                                                                                                                  | Urusan                                         |
|----|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
|    |                                                                      |                                                                                                          | Struktur Organisasi OPD Masih Banyak yang Tumpang Tindih dan Belum Ideal                                                                      | Unsur Sekretariat Daerah                       |
|    |                                                                      |                                                                                                          | Kegiatan Kepala Daerah dan Forkopimda yang Belum Optimal                                                                                      | Unsur Sekretariat Daerah                       |
|    |                                                                      | Tata Kelola Keuangan dan Asset Desa Kurang Optimal                                                       | Tata Kelola Administrasi dan Pelaporan Keuangan Masih Sangat Rendah                                                                           | Pemberdayaan Masyarakat dan Desa               |
|    |                                                                      |                                                                                                          | Pengelolaan Manajemen Pemerintahan Desa yang Belum Sesuai Standar                                                                             | Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa               |
|    |                                                                      |                                                                                                          | Kapasitas SDM di Pemerintah Desa yang Masih Minim Dalam Memahami Sistem Pemerintahan Desa Sesuai dengan Peraturan Per Undang-Undang yang Baru | Pemberdayaan Masyarakat dan Desa               |
|    |                                                                      | Layanan dan Pengelolaan Penyediaan Data Kependudukan Belum Semuanya Memiliki Perjanjian Kerja Sama (PKS) | Pendataan Kurang Maksimal                                                                                                                     | Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil |
|    |                                                                      | Kualitas Layanan Pendaftaran Penduduk Masyarakat Kurang Optimal                                          | Kecepatan dan Kemudahan Penerbitan Dokumen Kependudukan Masih Belum Optimal                                                                   | Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil |
|    |                                                                      | Kualitas Layanan Pencatatan Sipil kepada Masyarakat Kurang Optimal                                       | Kecepatan dan Kemudahan Permohonan Pencatatan Sipil masih Belum Optimal                                                                       | Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil |
|    | Kualitas Kinerja Pembangunan Berbasis Mitigasi Risiko Belum Maksimal | Belum Maksimalnya Kualitas Proses Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Sinkronisasi Penganggaran           | Banyaknya Muatan Materi yang Harus Diakomodasi pada Setiap Tahapan Penyusunan Dokumen Perencanaan yang Berbatas Waktu                         | Perencanaan                                    |
|    |                                                                      | Manajemen Kinerja dan Sistem Pengendalian Internal OPD Belum Efektif                                     | Hasil Koordinasi Pengendalian dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan Belum Maksimal                                                             | Perencanaan                                    |
|    |                                                                      | Keselaran Dokumen Perencanaan Daerah dan Perangkat Daerah Belum Maksimal                                 | Hasil Koordinasi Perencanaan Sektoral Belum Maksimal                                                                                          | Perencanaan                                    |

| No | Pokok Permasalahan                                                                                                        | Permasalahan                                                                                                                                    | Akar Masalah                                                                                      | Urusan                   |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
|    |                                                                                                                           | Pembangunan Desa Belum Semuanya Tertib Adminstrasi                                                                                              | Kurangnya Fasilitasi, Koordinasi, Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Pembangunan di Desa        | Unsur Kecamatan          |
|    |                                                                                                                           | Maturitas UKPBJ Belum Optimal                                                                                                                   | Fungsi Koordinasi Belum Optimal                                                                   | Unsur Sekretariat Daerah |
|    |                                                                                                                           |                                                                                                                                                 | Kemampuan SDM Pengelola LPSE yang Tidak Merata                                                    | Unsur Sekretariat Daerah |
|    |                                                                                                                           | Standarisasi LPSE Belum Merata                                                                                                                  | Kemampuan SDM Pengelola LPSE yang Tidak Merata                                                    | Unsur Sekretariat Daerah |
|    |                                                                                                                           | Integrasi Pengawasan DPRD Dalam Pembangunan Belum Optimal                                                                                       | Kebijakan Anggaran yang Dibahas Tidak Tepat Waktu                                                 | Unsur Sekretariat DPRD   |
|    |                                                                                                                           |                                                                                                                                                 | Kurang Maksimalnya Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan yang Dilaksanakan                      | Unsur Sekretariat DPRD   |
|    |                                                                                                                           |                                                                                                                                                 | Aspirasi Masyarakat Belum Terakomodir Semua di Pokir DPRD                                         | Unsur Sekretariat DPRD   |
|    | Dukungan Kelitbangan Dalam Pembangunan Masih Rendah                                                                       | Pemanfaatan Hasil-Hasil Penelitian dan Inovasi yang Dapat Mendukung Secara Langsung Pelaksanaan Berbagai Sektor Pembangunan Derah Belum Optimal | Hasil Kelitbangan Belum Optimal dan Selaras dengan Pemecahan Isu Pembangunan                      | Litbang                  |
|    | Kualitas Pembinaan, Pengawasan, Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah Berbasis Mitigasi Risiko Kurang Maksimal | Belum Optimalnya Pengelolaan APBD                                                                                                               | Belum Optimalnya Input Data dalam Penyusunan RAPBD                                                | Keuangan                 |
|    |                                                                                                                           |                                                                                                                                                 | Belum Konsistennya Terhadap Jadwal Tahapan Penganggaran Anggaran                                  | Keuangan                 |
|    |                                                                                                                           |                                                                                                                                                 | Belum Optimalnya Pelaksanaan <i>E-Planning</i> dan <i>E-Budgeting</i> Saat Penyusunan Perencanaan | Keuangan                 |
|    |                                                                                                                           | Pungutan Pajak Belum Optimal                                                                                                                    | Belum <i>Update</i> -nya Nilai Obyek Pajak                                                        | Keuangan                 |

| No | Pokok Permasalahan                           | Permasalahan                                                                                                           | Akar Masalah                                                                                     | Urusan      |
|----|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
|    |                                              |                                                                                                                        | Wajib Pajak Belum Seluruhnya Teridentifikasi                                                     | Keuangan    |
|    |                                              | Belum Optimalnya Pengelolaan Barang Milik Daerah                                                                       | Belum Optimalnya Pelaksanaan Koordinasi dan Pembinaan Pengelolaan BMD                            | Keuangan    |
|    |                                              |                                                                                                                        | Belum Adanya Aplikasi Laporan Barang Milik Daerah                                                | Keuangan    |
|    |                                              | Belum Optimalnya Pengelolaan Arsip Penting Daerah Khususnya Arsip Keuangan dan Aset                                    | Belum Dimilikinya Pedoman Tata Kerja Kearsipan yang Diberlakukan Secara Baku di Perangkat Daerah | Kearsipan   |
|    |                                              |                                                                                                                        | Pengelola Kearsipan Banyak yang Belum Memahami Pedoman Audit Kearsipan                           | Kearsipan   |
|    |                                              |                                                                                                                        | Terbatasnya Sarana dan Prasarana Kearsipan                                                       | Kearsipan   |
|    |                                              | Tindak Lanjut Hasil Pengawasan BPK RI Perlu Ditingkatkan                                                               | Kualitas Koordinasi dan Supervisi Kurang Maksimal                                                | Pengawasan  |
|    |                                              | Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Itprov Perlu Dioptimalkan                                                               | Kualitas Koordinasi dan Supervisi Kurang Maksimal                                                | Pengawasan  |
|    |                                              | Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Itkab Masih Rendah                                                                      | Kualitas Koordinasi dan Supervisi Kurang Maksimal                                                | Pengawasan  |
|    |                                              |                                                                                                                        | Kualitas Koordinasi dan Supervisi Kurang Maksimal                                                | Pengawasan  |
|    |                                              | Predikat WBK/WBBM Berdasarkan Penilaian Internal Belum Optimal                                                         | Kualitas Koordinasi dan Supervisi Kurang Maksimal                                                | Pengawasan  |
|    | Profesionalisme ASN Masih Perlu Ditingkatkan | Tingkat Kedisiplinan ASN Masih Kurang                                                                                  | Usulan Formasi CPNS Tidak Seluruhnya Disetujui                                                   | Kepegawaian |
|    |                                              | Jabatan Struktural/Jabatan Fungsional (Non Guru Non Kesehatan) Belum Terisi Secara Maksimal Berdasarkan Kompetensinya. | Data Kepegawaian Kurang Tertata                                                                  | Kepegawaian |
|    |                                              |                                                                                                                        | Informasi Layanan Kepegawaian yang Terintegrasi dengan SIMPEG Belum Optimal                      | Kepegawaian |
|    |                                              |                                                                                                                        | Pembinaan Kedisiplinan yang Kurang Efektif                                                       | Kepegawaian |

| No | Pokok Permasalahan | Permasalahan                                                                                 | Akar Masalah                                                                                                                       | Urusan                   |
|----|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
|    |                    |                                                                                              | Sistem Penilaian Kinerja yang Belum Optimal                                                                                        | Kepegawaian              |
|    |                    | Masih Banyak ASN yang Belum Mengikuti Pelatihan Teknis 20 Jam/Tahun                          | Terbatasnya Penyelenggaraan Pelatihan Teknis Umum, Inti dan Pilihan Masih Rendah                                                   | Pendidikan dan Pelatihan |
|    |                    | Masih Banyak ASN yang Belum Mengikuti Seminar/Workshop/Sejenis Sesuai dengan Tupoksi Jabatan | Terbatasnya Penyelenggaraan Pelatihan JF Non Pendidikan dan Non Pengawasan yang Belum Mengikuti Pelatihan Fungsional               | Pendidikan dan Pelatihan |
|    |                    |                                                                                              | Pemantauan dan Evaluasi Peserta Diklat Prajabatan dan Latsar Belum Optimal                                                         | Pendidikan dan Pelatihan |
|    |                    |                                                                                              | Belum Adanya Rencana Pengembangan Kompetensi Kepemimpinan dan Prajabatan/Latsar (Analisa Kebutuhan Diklat Kepemimpinan dan Latsar) | Pendidikan dan Pelatihan |
|    |                    |                                                                                              | Layanan Sertifikasi ASN Belum Merata                                                                                               | Pendidikan dan Pelatihan |

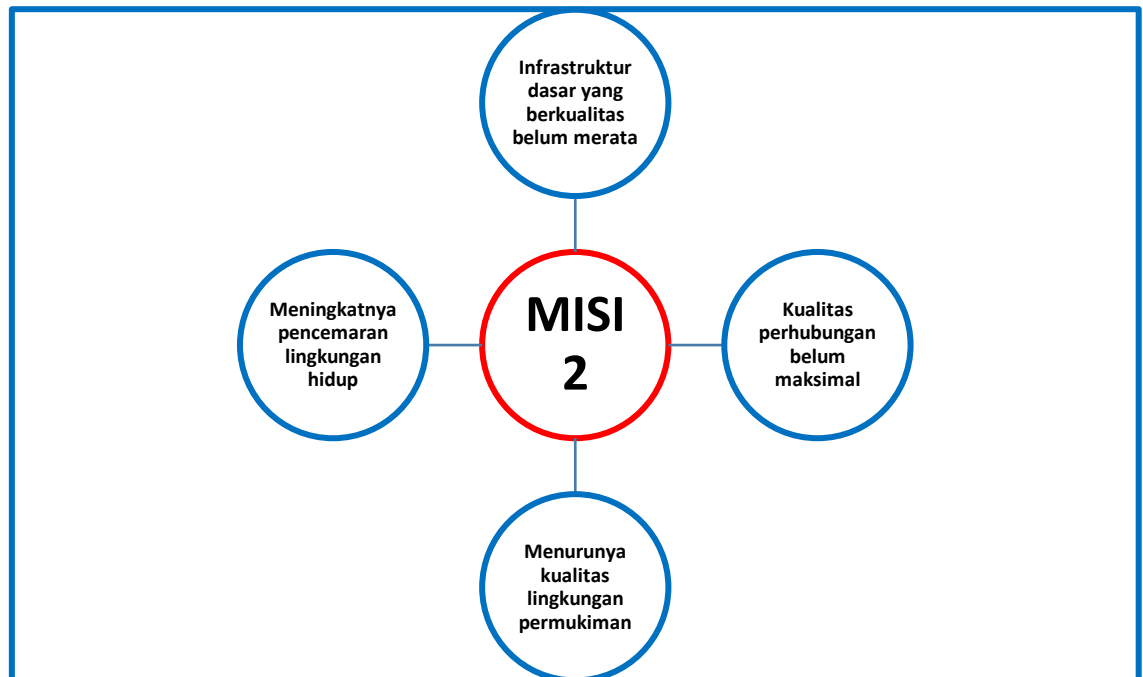
*Sumber: Analisis Bappeda dan Litbang, 2021*

#### **b. Permasalahan Pencapaian Misi Ke-2**

Hasil identifikasi dan analisis terhadap Misi 2 RPJMD 2019-2024 **“Memperkuat daya saing daerah melalui pembangunan infrastruktur yang andal, berkualitas dan terintegrasi serta berwawasan lingkungan”** terdapat beberapa pokok permasalahan yang harus diselesaikan antara lain:

- ✓ Layanan infrastruktur dasar yang berkualitas belum merata
- ✓ Menurunnya kualitas lingkungan permukiman
- ✓ Kualitas perhubungan belum maksimal
- ✓ Meningkatnya pencemaran lingkungan hidup

**Gambar 4. 2**  
**Keterkaitan Pokok Permasalahan Dalam Pencapaian Misi Kedua**



*Sumber: Analisis Bappeda dan Litbang, 2021*

Adapun identifikasi akar masalah masih-masing pokok permasalahan pada Misi Kedua sebagai berikut:

**Tabel 4. 2**  
**Hasil Identifikasi dan Analisis Permasalahan Pembangunan MISI KEDUA**

| No                                                                                                                                                  | Pokok Permasalahan                                        | Permasalahan                                                 | Akar Masalah                                  | Urusan |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------|
| <b>Misi II: Memperkuat Daya Saing Daerah Melalui Pembangunan Infrastruktur Yang Andal, Berkualitas Dan Terintegrasi Serta Berwawasan Lingkungan</b> |                                                           |                                                              |                                               |        |
|                                                                                                                                                     | Layanan Infrastruktur Dasar yang Berkualitas Belum Merata | Cakupan Irigasi Berkualitas Tidak Menjangkau Seluruh Wilayah | Sarpras Irigasi Masih Kurang                  | PUPR   |
|                                                                                                                                                     |                                                           |                                                              | Banyak Sarpras Irigasi yang Sudah Tidak Layak | PUPR   |
|                                                                                                                                                     |                                                           |                                                              | Pengelolaan Irigasi Kurang Maksimal           | PUPR   |
|                                                                                                                                                     |                                                           | Terbatasnya Layanan Air Minum Berkualitas Secara Merata      | Sarpras SPAM Masih Terbatas                   | PUPR   |
|                                                                                                                                                     |                                                           |                                                              | Banyak Sarpras SPAM yang Sudah Tidak Layak    | PUPR   |
|                                                                                                                                                     |                                                           |                                                              | Pengelolaan SPAM Kurang Maksimal              | PUPR   |

| No | Pokok Permasalahan | Permasalahan                                                                                         | Akar Masalah                                                                  | Urusan                           |
|----|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
|    |                    | Belum Semua Ruas Jalan Kabupaten Memiliki Drainase Jalan                                             | Kurangnya Evaluasi Sistem Drainase Saat Ini                                   | PUPR                             |
|    |                    |                                                                                                      | Masterplan Drainase Belum Merata Diseluruh                                    | PUPR                             |
|    |                    | Penataan Bangunan dan Fisik Perkotaan yang Kurang Maksimal dan Tidak Sesuai Standar                  | Kurang Berkualitasnya Pemberian IMB                                           | PUPR                             |
|    |                    |                                                                                                      | Lemahnya Monitoring dan Evaluasi Terhadap Gedung yang Terbangun               | PUPR                             |
|    |                    |                                                                                                      | Pengendalian dan Pembangunan yang Tidak Optimal                               | PUPR                             |
|    |                    | Penyedia Jasa Konstruksi yang Sesuai Standar dan Bersertifikat Belum Tersedia dan Dievaluasi Berkala | Perencanaan Pengembangan Tata Kota Belum Tersedia                             | PUPR                             |
|    |                    |                                                                                                      | Terbatasnya Tenaga Jasa Kontruksi Terlatih                                    | PUPR                             |
|    |                    | Kualitas Jalan dan Jembatan yang Baik Tidak Merata                                                   | Pengelolaan Jalan dan Jembatan yang Belum Optimal                             | PUPR                             |
|    |                    | Belum Memiliki RDTR yang Dilegalisasi                                                                | RTRW Masih Dalam Proses Penetapan                                             | PUPR                             |
|    |                    |                                                                                                      | Koordinasi dan Penyusunan Tataruang Kurang Maksimal                           | PUPR                             |
|    |                    |                                                                                                      | Kurang Optimalnya Proses Penataan Ruang                                       | PUPR                             |
|    |                    | Terdapat Masalah Pertanahan Dalam Pelaksanaan Pembangunan                                            | Pemahaman dan Kesadaran Masyarakat Akan Pentingnya Pembangunan Kurang Optimal | Pertanahan                       |
|    |                    | Sertifikasi Lahan Milik Pemda Masih Rendah                                                           | Ketersediaan Data Aset Lahan yang Kurang Baik                                 | Pertanahan                       |
|    |                    | Pengelolaan Taman Makam Pahlawan Kurang Makasimal                                                    | Kurangnya Kesadaran Bersama Akan Pentingnya Nilai Makam Pahlawan              | Sosial                           |
|    |                    | Dukungan Sarana dan Prasarana Pemerintah Desa Belum Optimal                                          | Belum Ada Pengaturan Tentang Tata Ruang Desa                                  | Pemberdayaan Masyarakat dan Desa |
|    |                    |                                                                                                      | Belum Ada Pengaturan Tentang Kewenangan Desa                                  | Pemberdayaan Masyarakat dan Desa |

| No | Pokok Permasalahan                        | Permasalahan                                                                 | Akar Masalah                                                                        | Urusan                                  |
|----|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
|    |                                           | Cakupan Kerjasama Desa Dalam Pengentasan Desa Tertinggal Belum Optimal       | Sinkronisasi Pembangunan Sarana dan Prasarana Desa Kurang Terkoordinasi Dengan Baik | Pemberdayaan Masyarakat dan Desa        |
|    | Menurunnya Kualitas Lingkungan Permukiman | Penyediaan Permukiman yang Layak Khususnya Korban Bencana Tidak Merata       | Adanya Dampak Bencana yang Menyebabkan Kerusakan Rumah                              | Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman |
|    |                                           | Masih Banyak Pembangunan dan Pengembangan Perumahan yang Tidak Memiliki Izin | Lemahnya Pengawasan dan Pengendalian Pengembangan Perumahan                         | Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman |
|    |                                           | Penanganan Rumah Tidak Layak Huni Kurang Optimal                             | Rendahnya Partisipasi Masyarakat Golongan Bawah Untuk Memiliki Rumah yang Layak     | Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman |
|    |                                           | Penanganan Lingkungan Permukiman Kumuh Belum Optimal                         | Kurang Terpantaunya Pengembangan Permukiman yang Ada                                | Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman |
|    |                                           |                                                                              | Kurangnya Evaluasi Atas Pengembangan Permukiman                                     | Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman |
|    |                                           |                                                                              | Kutangnya Peran Serta Masyarakat Dalam Penataan Kawasan Kumuh                       | Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman |
|    |                                           | Tidak Meratanya Layanan PSU (Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum)            | Belum Adanya Perencanaan Pengembangan PSU yang Berkualitas                          | Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman |
|    | Kualitas Perhubungan Belum Maksimal       | Layanan Keselamatan Berkendara Belum Optimal                                 | Belum Semua Jalan Memiliki LPJU                                                     | Perhubungan                             |
|    |                                           | Layanan Angkutan Transportasi Belum Optimal                                  | Kondisi Perlengkapan Jalan Banyak yang Rusak dan Belum Tertangani                   | Perhubungan                             |
|    |                                           | Layanan Keselamatan Berkendara Belum Optimal                                 | Kurang Maksimalnya Pemeliharaan Prasarana Jalan                                     | Perhubungan                             |
|    |                                           |                                                                              | Kurangnya Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Andalalin                           | Perhubungan                             |
|    |                                           |                                                                              | Jumlah Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas                                      | Perhubungan                             |

| No | Pokok Permasalahan                       | Permasalahan                                                                               | Akar Masalah                                                                                | Urusan           |
|----|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
|    |                                          |                                                                                            | Kebijakan untuk Jalan Masih Kurang                                                          |                  |
|    |                                          |                                                                                            | Jumlah Titik Parkir yang Belum Dikelola dengan Baik, Sehingga Sering Menimbulkan Kecelakaan | Perhubungan      |
|    |                                          |                                                                                            | Belum Semua Terminal Tipe C Memiliki Sarana dan Prasarana Lengkap Sesuai Ketentuan          | Perhubungan      |
|    |                                          |                                                                                            | Belum Semua Jalan Terlayani Angkutan Umum                                                   | Perhubungan      |
|    |                                          |                                                                                            | Pengelolaan Trayek Angkutan Orang Belum Maksimal                                            | Perhubungan      |
|    |                                          |                                                                                            | Pengawasan Kelayakan Kendaraan Angkutan Masih Kurang                                        | Perhubungan      |
|    | Meningkatnya Pencemaran Lingkungan Hidup | Pengelolaan Lingkungan Hidup Belum Terencana Dengan Maksimal                               | Belum Tersusunnya Dokumen/Kajian tentang LH di Kabupaten Tegal                              | Lingkungan Hidup |
|    |                                          | Pengendalian dan Pengawasan Pencemaran Lingkungan Hidup Khususnya Air Sungai Belum Efektif | Kurangnya Optimalnya Koordinasi Pencegahan, Penanggulangan, Kerusakan Lingkungan            | Lingkungan Hidup |
|    |                                          | Pengelolaan Lahan Kehati Belum Optimal                                                     | Pengelolaan dan Pengembangan RTH Kurang Maksimal                                            | Lingkungan Hidup |
|    |                                          | Pengelolaan Bahan Dan Limbah Berbahaya, Beracun Kurang Maksimal                            | Kurangnya Optimalnya Koordinasi dan Fasilitas Pengelolaan Bahan dan Limbah B3               | Lingkungan Hidup |
|    |                                          | Cakupan Layanan Limbah Rumah Tangga Kurang Maksimal                                        | Masih Terdapat Sarana dan Prasarana Pengelolaan Limbah Domestik yang Belum Sesuai Standar   | PUPR             |
|    |                                          |                                                                                            | Belum Optimalnya Strategi Kebijakan Pengelolaan Limbah Domestik                             | PUPR             |
|    |                                          | Belum Optimalnya Cakupan Penanganan Sampah Dimasyarakat.                                   | Kurang Optimalnya Kebijakan dan Strategi Pengelolaan Sampah yang Ada                        | Lingkungan Hidup |
|    |                                          |                                                                                            | Kurangnya Partisipasi Masyarakat Dalam Mengelola Sampah                                     | Lingkungan Hidup |
|    |                                          |                                                                                            | Kurangnya Koordinasi Pengelolaan Sampah                                                     | Lingkungan Hidup |

| No | Pokok Permasalahan | Permasalahan                                                                      | Akar Masalah                                                                              | Urusan           |
|----|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
|    |                    |                                                                                   | Kurangnya Sarana dan Prasarana Pengelolaan Sampah                                         | PUPR             |
|    |                    |                                                                                   | Banyak Sarpras Pengelolaan Sampah yang Sudah Tidak Layak                                  | PUPR             |
|    |                    |                                                                                   | Terbatasnya Daya Tampung TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS                                          | PUPR             |
|    |                    | Pelaku Usaha Berkomitmen Dalam Pengelolaan Lingkungan Belum Maksimal              | Kurangnya Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha Pengelolaan Lingkungan                  | Lingkungan Hidup |
|    |                    | Kapasitas Masyarakat dan Penyuluh Dalam Mengelola Lingkungan Masih Belum Maksimal | Kurangnya Pembinaan Pengelolaan Lingkungan Hidup Kepada Masyarakat                        | Lingkungan Hidup |
|    |                    | Masyarakat Kurang Terstimulasi untuk Mengelola Lingkungan Hidup                   | Kurangnya Penghargaan Kepada Masyarakat yang Dapat Mengelola Lingkungan Hidup dengan Baik | Lingkungan Hidup |
|    |                    | Penanganan Pengaduan Masyarakat Terkait LH Belum Maksimal                         | Terbatasnya SDM Penanganan Aduan                                                          | Lingkungan Hidup |

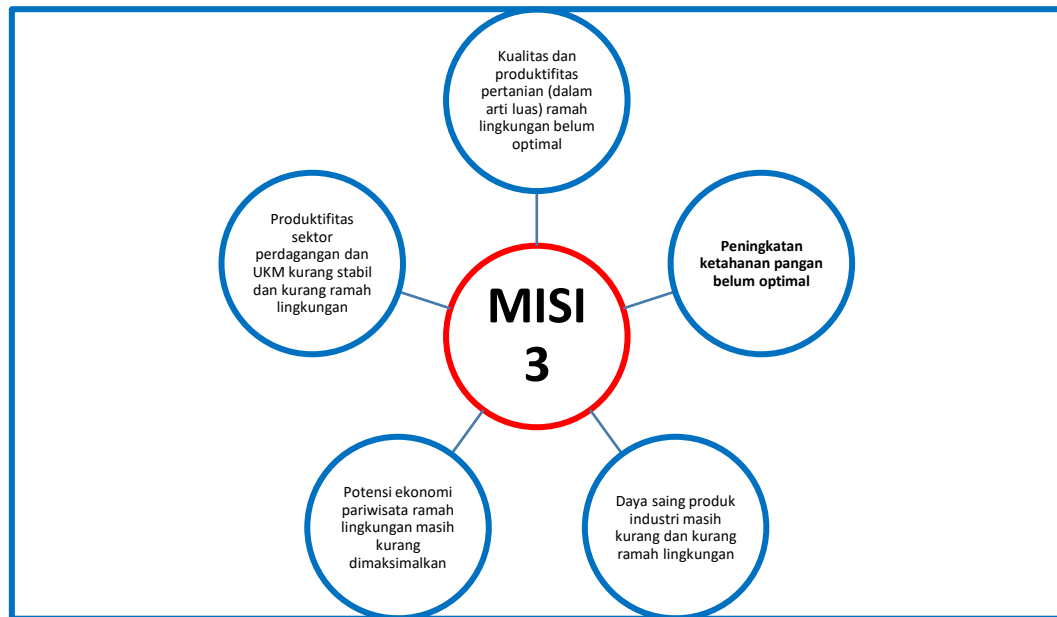
*Sumber: Analisis Bappeda dan Litbang, 2021*

### c. Permasalahan Pencapaian Misi Ke-3

Hasil identifikasi dan analisis terhadap Misi 3 RPJMD 2019-2024 **“Membangun perekonomian rakyat yang kokoh, maju, berkeadilan dan berkelanjutan”** terdapat beberapa pokok permasalahan yang harus diselesaikan antara lain:

- ✓ Kualitas dan produktifitas pertanian (dalam arti luas) ramah lingkungan belum optimal
- ✓ Peningkatan ketahanan pangan belum optimal
- ✓ Daya saing produk industri masih kurang dan kurang ramah lingkungan
- ✓ Potensi ekonomi pariwisata ramah lingkungan masih kurang dimaksimalkan
- ✓ Produktifitas sektor perdagangan dan UKM kurang stabil dan kurang ramah lingkungan

**Gambar 4. 3**  
**Keterkaitan Pokok Permasalahan Dalam Pencapaian Misi Ketiga**



*Sumber: Analisis Bappeda dan Litbang, 2021*

Adapun identifikasi akar masalah masih-masing pokok permasalahan pada Misi Ketiga sebagai berikut:

**Tabel 4. 3**  
**Hasil Identifikasi dan Analisis Permasalahan Pembangunan MISI KETIGA**

| No                                                                                             | Pokok Permasalahan                                                                    | Permasalahan                                                                             | Akar Masalah                                                           | Urusan                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| <b>Misi III: Membangun Perekonomian Rakyat Yang Kokoh, Maju, Berkeadilan dan Berkelanjutan</b> |                                                                                       |                                                                                          |                                                                        |                        |
|                                                                                                | Kualitas dan Produktifitas Pertanian (Dalam Arti Luas) Ramah Lingkungan Belum Optimal | Belum Optimalnya Produksi Perikanan Tangkap.                                             | Sarana dan Prasarana Penangkapan Ikan Masih Kurang Efektif             | Kelautan dan Perikanan |
|                                                                                                |                                                                                       |                                                                                          | Kurangnya Kapasitas Nelayan                                            | Kelautan dan Perikanan |
|                                                                                                |                                                                                       |                                                                                          | Kualitas Pengelolaan Tempat Pelelangan Ikan Belum Maksimal             | Kelautan dan Perikanan |
|                                                                                                |                                                                                       |                                                                                          | Kurang Optimalnya Layanan/Fasilitas Aktivitas Penangkapan Ikan Nelayan | Kelautan dan Perikanan |
|                                                                                                |                                                                                       | Praktek Penangkapan Ikan Ilegal di PUD (Menggunkan Racun dan Listrik/Setrum) Masih Marak | Kurangnya Pengawasan Standar Keamanan Penangkapan Ikan                 | Kelautan dan Perikanan |

| No | Pokok Permasalahan | Permasalahan                                                           | Akar Masalah                                                                            | Urusan                 |
|----|--------------------|------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
|    |                    | Belum Optimalnya Produksi Perikanan Budidaya                           | Sarana dan Prasarana Budidaya Ikan Masih Kurang Efektif                                 | Kelautan dan Perikanan |
|    |                    |                                                                        | Kurangnya Kapasitas Nelayan Pembudidaya                                                 | Kelautan dan Perikanan |
|    |                    |                                                                        | Kurang Optimalnya Layanan/Fasilitas Aktifitas Budidaya Ikan Nelayan                     | Kelautan dan Perikanan |
|    |                    | Belum Optimalnya Kemanfaatan Pengolahan Hasil Perikanan.               | Belum Semua Pelaku Usaha Pengolahan Hasil Perikanan Tersertifikasi                      | Kelautan dan Perikanan |
|    |                    |                                                                        | Kurangnya Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan                                   | Kelautan dan Perikanan |
|    |                    |                                                                        | Fasilitasi Pemasaran Hasil Perikanan Belum Maksimal                                     | Kelautan dan Perikanan |
|    |                    | Belum Optimalnya Produksi Pertanian Dan Peternakan                     | Perencanaan Pertanian yang Komprehensif dan Berkualitas Belum Tersedia                  | Pertanian              |
|    |                    |                                                                        | Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Pertanian yang Berkualitas Belum Merata                | Pertanian              |
|    |                    |                                                                        | Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Pertanian Tanaman Pangan yang Berkualitas Belum Merata | Pertanian              |
|    |                    |                                                                        | Terbatasnya Lahan Pertanian Tananam Pangan Khususnya Pertanian Organik                  | Pertanian              |
|    |                    |                                                                        | Kurang Maksimalnya Aksesibilitas Jalan Pertanian Tanaman Pangan                         | Pertanian              |
|    |                    |                                                                        | Kurangnya Bibit Ternak yang Berkualitas                                                 | Pertanian              |
|    |                    |                                                                        | Lokasi Pengembalaan Ternak Terbatas dan Tidak Merata                                    | Pertanian              |
|    |                    | Kurangnya Antisipasi Penanggulangan Bencana Pertanian                  | Kurangnya Antisipasi Pengendalian Organisme Pengganggu Tanaman Pangan                   | Pertanian              |
|    |                    | Pengawasan Produksi Hasil Peternakan Yang Aman Dan Sehat Belum Optimal | Kurang Maksimalnya Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Ternak                      | Pertanian              |
|    |                    |                                                                        | Pengawasan Kesehatan Hewan Ternak Belum Maksimal                                        | Pertanian              |
|    |                    |                                                                        | Layanan Pemeriksaan Kesehatan Ternak Belum Maksimal                                     | Pertanian              |

| No | Pokok Permasalahan                                                     | Permasalahan                                                              | Akar Masalah                                                              | Urusan        |
|----|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------|
|    |                                                                        | Kualitas Kelembagaan Kelompok Tani Belum Optimal                          | Terbatasnya Pembinaan Kelompok Tani                                       | Pertanian     |
|    |                                                                        | Kapasitas Penyuluh Pertanian Tanaman Pangan yang Berkualitas Belum Merata | Terbatasnya Pelatihan Penyuluh                                            | Pertanian     |
|    | Peningkatan Ketahanan Pangan Belum Optimal                             | Penguatan Cadangan Pangan Mengalami Tren Menurun                          | Kurangnya Diversifikasi Pangan di Masyarakat                              | Pangan        |
|    | Daya Saing Produk Industri Masih Kurang Dan Kurang Ramah Lingkungan    | Pengembangan Sektor Industri Yang Belum Maksimal                          | Belum Tersedianya Perencanaan dan Evaluasi Pembangunan Industri           | Perindustrian |
|    |                                                                        |                                                                           | Masih Banyak IKM Dan Produk IKM Yang Belum Bersertifikasi                 | Perindustrian |
|    |                                                                        |                                                                           | Masih Terbatasnya Jumlah TPL                                              | Perindustrian |
|    |                                                                        | Masih Rendahnya Data/Informasi Industri Yang Terverifikasi                | Terbatasnya SDM Dalam Menginventarisasi Data Industri Kabupaten Tegal     | Perindustrian |
|    | Potensi Ekonomi Pariwisata Ramah Lingkungan Masih Kurang Dimaksimalkan | Destinasi Tujuan Wisata Kurang Dioptimalkan/Dikembangkan/Terkelola        | Tidak Optimalnya Pengelolaan Sarana Prasarana Yang Ada                    | Pariwisata    |
|    |                                                                        | Belum Semua Usaha Pariwisata Yang Memiliki/Memperpanjang Ijin Usaha       | Sarana Dan Prasarana Untuk Obyek Wisata Sangat Terbatas                   | Pariwisata    |
|    |                                                                        |                                                                           | Pengembangan Obyek Wisata Eksisting Belum Terstruktur                     | Pariwisata    |
|    |                                                                        |                                                                           | Terbatasnya Kemampuan Masyarakat Dalam Mengembangkan Potensi Obyek Wisata | Pariwisata    |
|    |                                                                        |                                                                           | Kurangnya Pembinaan Untuk Sadar Wisata                                    | Pariwisata    |
|    |                                                                        |                                                                           | Layanan Sertifikasi Kepada Pelaku Usaha Pariwisata Tidak Optimal          | Pariwisata    |
|    |                                                                        |                                                                           | Kurangnya Kesadaran Pelaku Usaha Pariwisata                               | Pariwisata    |
|    |                                                                        | Kurang Maksimalnya Pemasaran Destinasi Tujuan Wisata Yang Ada             | Strategi Dan Cakupan Pemasaran Yang Kurang Tepat                          | Pariwisata    |

| No | Pokok Permasalahan                                                                 | Permasalahan                                                                      | Akar Masalah                                                                        | Urusan                             |
|----|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
|    |                                                                                    | Pembinaan Pelaku Usaha Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif Belum Maksimal.             | Belum Adanya Pembinaan Dan Pendampingan Terhadap SDM Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif | Pariwisata                         |
|    | Produktifitas Sektor Perdagangan Dan UKM Kurang Stabil Dan Kurang Ramah Lingkungan | Rendahnya Kualitas /Standarisasi Pasar Serta Pengelolaannya.                      | Sarana Dan Prasarana Pasar Kurang Memadai                                           | Perdagangan                        |
|    |                                                                                    |                                                                                   | Kurangnya Pembinaan Pengelola Pasar                                                 | Perdagangan                        |
|    |                                                                                    | Masih Terdapat Ukur, Takar, Timbang Dan Perlengkapannya (UTTP) Yang Tidak Standar | Kurang Maksimalnya Pelaksanaan Dan Pengawasan Metrologi                             | Perdagangan                        |
|    |                                                                                    | Pengendalian Harga Barang Kurang Maksimal                                         | Kurang Optimalnya Koordinasi Dan Pengawasan Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok     | Perdagangan                        |
|    |                                                                                    |                                                                                   | Kurang Optimalnya Pelaksanan Operasi Pasar                                          | Perdagangan                        |
|    |                                                                                    | Produktifitas Penjualan Produk Belum Optimal                                      | Lemahnya Sistem Dan Jaringan Informasi Perdagangan                                  | Perdagangan                        |
|    |                                                                                    |                                                                                   | Kurang Maksimalnya Promosi Dan Pemasaran Produk Lokal                               | Perdagangan                        |
|    |                                                                                    | Belum Optimalnya Nilai Bersih Ekspor Produk Lokal                                 | Kurangnya Promosi Dagang Secara Luas                                                | Perdagangan                        |
|    |                                                                                    | Masih Ada KSP/USP Yang Kondisi Koperasinya Tidak Sehat                            | Fasilitasi Dan Pembinaan Koperasi Kurang Maksimal                                   | Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah |
|    |                                                                                    |                                                                                   | Layanan Penilaian Kesehatan Koperasi Belum Menyeluruh                               | Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah |
|    |                                                                                    | Masih Kurangnya Kualitas SDM Perkoperasian                                        | Layanan Peningkatan Kapasitas SDM Perkoperasin Masih Kurang                         | Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah |
|    |                                                                                    | Masih Kurangnya Kemitraan Perkoperasian                                           | Pemberdayaan Untuk Peningkatan Produktifitas Koperasi Masih Kurang Maksimal         | Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah |
|    |                                                                                    | Masih Rendahnya Kemitraan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah.                         | Ketersediaan Data UMKM Yang Valid Masih Kurang                                      | Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah |

| No | Pokok Permasalahan | Permasalahan                                 | Akar Masalah                                        | Urusan                             |
|----|--------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------------------|
|    |                    |                                              | Kurangnya Fasilitas Dan Pemberdayaan Kemitraan UMKM | Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah |
|    |                    | Peningkatan Skala Usaha UMKM Kurang Maksimal | Kurangnya Fasilitas Pengembangan Skala Usaha UMKM   | Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah |

Sumber: Analisis Bappeda dan Litbang, 2021

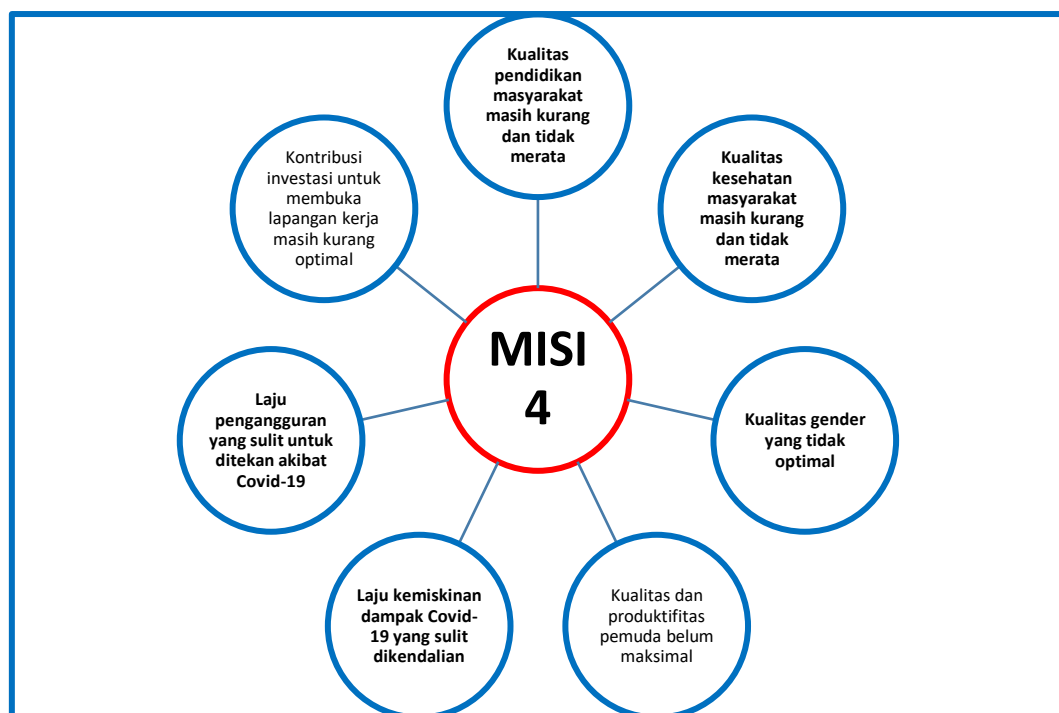
#### d. Permasalahan Pencapaian Misi Ke-4

Hasil identifikasi dan analisis terhadap Misi 4 RPJMD 2019-2024 **“Meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui penguatan layanan bidang pendidikan, kesehatan dan sosial dengan memanfaatkan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi”** terdapat beberapa pokok permasalahan yang harus diselesaikan antara lain:

- ✓ Kualitas pendidikan masyarakat masih kurang dan tidak merata
- ✓ Kualitas kesehatan masyarakat masih kurang dan tidak merata
- ✓ Kualitas gender yang tidak optimal
- ✓ Kualitas dan produktifitas pemuda belum maksimal
- ✓ Laju kemiskinan dampak Covid-19 yang sulit dikendalikan
- ✓ Laju pengangguran yang sulit untuk ditekan akibat Covid-19
- ✓ Kontribusi investasi untuk membuka lapangan kerja masih kurang optimal

Gambar 4. 4

#### Keterkaitan Pokok Permasalahan Dalam Pencapaian Misi Keempat



Sumber: Analisis Bappeda dan Litbang, 2021

Adapun identifikasi akar masalah masih-masing pokok permasalahan pada Misi Keempat sebagai berikut:

**Tabel 4. 4**

**Hasil Identifikasi dan Analisis Permasalahan Pembangunan MISI KEEMPAT**

| No                                                                                                                                                                                      | Pokok Permasalahan                                           | Permasalahan                                                | Akar Masalah                                                                                                      | Urusan     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| <b>MISI IV: Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Melalui Penguatan Layanan Bidang Pendidikan, Kesehatan Dan Sosial Dengan Memanfaatkan Kemajuan Ilmu Pengetahuan Dan Teknologi</b> |                                                              |                                                             |                                                                                                                   |            |
|                                                                                                                                                                                         | Kualitas Pendidikan Masyarakat Masih Kurang Dan Tidak Merata | Mutu Layanan Pendidikan Masyarakat Belum Optimal            | Sarpras Pendidikan PAUD Dan Pendidikan Dasar, Dan Pendidikan Non-Formal Masih Kurang Memadai Dan Kurang Merata    | Pendidikan |
|                                                                                                                                                                                         |                                                              |                                                             | Belum Semua Tenaga Pengajar PAUD, Pendidikan Dasar Dan Pendidikan Non Formal Bersertifikat                        | Pendidikan |
|                                                                                                                                                                                         |                                                              |                                                             | Satuan PAUD, Pendidikan Dasar, Dan Pendidikan Non Formal Belum Terakreditasi Seluruhnya Atau Belum Sesuai Standar | Pendidikan |
|                                                                                                                                                                                         |                                                              | Pengembangan Kurikulum Lokal Yang Berkualitas Belum Optimal | Kemampuan Menyusun Kurikulum Lokal Masih Terbatas                                                                 | Pendidikan |
|                                                                                                                                                                                         |                                                              |                                                             | Pengelolaan Dan Pengajaran Kurikulum Lokal Belum Maksimal                                                         | Pendidikan |
|                                                                                                                                                                                         |                                                              |                                                             | Terbatasnya Sarana Dan Prasarana Pendukung Pembelajaran Kurikulum Lokal                                           | Pendidikan |
|                                                                                                                                                                                         |                                                              | Kebutuhan Tenaga Pendidik Dan Kependidikan Belum Merata     | Kebutuhan Tenaga Pendidik Dan Kependidikan Belum Terpetakan Secara Maksimal                                       | Pendidikan |
|                                                                                                                                                                                         |                                                              |                                                             | Distribusi Tenaga Pendidik Dan Kependidikan Belum Merata                                                          | Pendidikan |
|                                                                                                                                                                                         |                                                              | Pengendalian Mutu Satuan Pendidikan Swasta Belum Maksimal   | Kurangnya Pengendalian Izin Pendidikan                                                                            | Pendidikan |

| No | Pokok Permasalahan                                          | Permasalahan                                                             | Akar Masalah                                                                                                            | Urusan       |
|----|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
|    |                                                             | Tingkat Literasi Masyarakat Kabupaten Tegal Masih Tergolong Rendah       | Masih Ada Wilayah Yang Belum Mendapat Layanan Perpustakaan                                                              | Perpustakaan |
|    |                                                             |                                                                          | Jumlah Perpustakaan Belum Sesuai Dengan Jumlah Penduduk.                                                                | Perpustakaan |
|    |                                                             |                                                                          | Jumlah Perpustakaan Berbasis Elektronik Masih Sangat Terbatas                                                           | Perpustakaan |
|    |                                                             |                                                                          | Belum Semua Tenaga Perpustakaan Dan Pustakawan Berkompeten                                                              | Perpustakaan |
|    |                                                             |                                                                          | Jumlah Ketersediaan Judul Buku Dan Kebutuhan Masyarakat Masih Belum Sesuai                                              | Perpustakaan |
|    |                                                             |                                                                          | Kurangnya Sosialisasi Gemar Membaca Dan Layanan Perpustakaan Yang Menyebabkan Perilaku Budaya Baca Di Masyarakat Rendah | Perpustakaan |
|    |                                                             |                                                                          | Terbatasnya Sarana Dan Prasarana Perpustakaan                                                                           | Perpustakaan |
|    | Kualitas Kesehatan Masyarakat Masih Kurang Dan Tidak Merata | Belum Maksimalnya Pengelolaan Fasilitas Dan Layanan Kesehatan Masyarakat | Masih Belum Optimalnya Mutu Pelayanan Di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) Puskesmas                            | Kesehatan    |
|    |                                                             |                                                                          | Adanya Mobilitas Penduduk Sehingga Pemantauan Kesehatan Kurang Optimal                                                  | Kesehatan    |
|    |                                                             |                                                                          | Masih Kurangnya Kesadaran Masyarakat Untuk Melakukan Deteksi Dini Penyakit Tidak Menular (PTM)                          | Kesehatan    |
|    |                                                             |                                                                          | Kurang Meratanya Sarana Dan Sarana Yang Berkualitas Di Puskesmas                                                        | Kesehatan    |

| No | Pokok Permasalahan | Permasalahan                                                                                                           | Akar Masalah                                                                       | Urusan    |
|----|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
|    |                    |                                                                                                                        | Kurang Meratanya Sarana Dan Sarana Yang Berkualitas Di Rumah Sakit                 | Kesehatan |
|    |                    |                                                                                                                        | Kurang Meratanya Sarana Dan Sarana Yang Berkualitas Di Rumah Sakit                 | Kesehatan |
|    |                    |                                                                                                                        | Masih Belum Optimalnya Mutu Pelayanan Di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit | Kesehatan |
|    |                    | Kualitas Sumberdaya Kesehatan Terbatas Dan Tidak Merata                                                                | Distribusi SDM Kesehatan Belum Merata Di Puskesmas                                 | Kesehatan |
|    |                    |                                                                                                                        | Manajemen Pengelolaan SDM Yang Masih Kurang Optimal Di Puskesmas                   | Kesehatan |
|    |                    |                                                                                                                        | Distribusi SDM Kesehatan Belum Merata Di Rumah Sakit                               | Kesehatan |
|    |                    |                                                                                                                        | Manajemen Pengelolaan SDM Yang Masih Kurang Optimal Di Rumah Sakit                 | Kesehatan |
|    |                    | Belum Semua Makanan Dan Minuman Yang Beredar Di Kabupaten Tegal Memiliki Kualitas Yang Sesuai Dengan Yang Diperkirakan | Pengawasan Obat Dan Makanan Belum Maksimal                                         | Kesehatan |
|    |                    |                                                                                                                        | Pengawasan Kelayakan Kesehatan Tempat Pengelolaan Makanan Belum Maksimal           | Kesehatan |
|    |                    | Peran Serta Masyarakat Dalam Melaksanakan Perilaku Hidup Bersih Dan Sehat (PHBS) Belum Maksimal                        | Kurangnya Pembinaan Penerapan PHBS Di Masyarakat                                   | Kesehatan |
|    |                    |                                                                                                                        | Kurangnya Kesadaran Masyarakat Dalam Menerapkan PHBS di setiap Aktivitas           | Kesehatan |

| No | Pokok Permasalahan                 | Permasalahan                                                          | Akar Masalah                                                                                                                                                                                     | Urusan                                       |
|----|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
|    | Kualitas Gender Yang Tidak Optimal | Prioritas Anggaran Pembangunan Berbasis Gender Belum Maksimal         | Minimnya Peraturan, Pemahaman Dan Pengetahuan Tentang Pengarusutamaan Gender                                                                                                                     | Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak |
|    |                                    |                                                                       | Belum Efektifnya Kelembagaan PUG Dan Pemberdayaan Perempuan                                                                                                                                      | Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak |
|    |                                    |                                                                       | Masih Rendahnya Pemahaman Mengenai Konsep Dan Isu Gender Serta Manfaat PUG Dalam Pembangunan,                                                                                                    | Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak |
|    |                                    |                                                                       | Rendahnya Peran Dan Partisipasi Perempuan Di Bidang Politik, Jabatan-Jabatan Publik, Dan Di Bidang Ekonomi                                                                                       | Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak |
|    |                                    |                                                                       | Belum Memadainya Kapasitas Kelembagaan Dalam Pelaksanaan PUG                                                                                                                                     | Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak |
|    |                                    | Masih Rendahnya Perlindungan Terhadap Perempuan Dari Tindak Kekerasan | Pencegahan Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan Optimal                                                                                                                                           | Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak |
|    |                                    |                                                                       | Layanan Fisik Dan Psikis Terhadap Perempuan Korban Tindak Kekerasan Belum Optimal                                                                                                                | Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak |
|    |                                    |                                                                       | Masih Belum Memadainya Jumlah Dan Kualitas Tempat Pelayanan Bagi Perempuan Korban Kekerasan, Karena Banyaknya Jumlah Korban Yang Harus Dilayani Dan Luasnya Cakupan Wilayah Yang Harus Dijangkau | Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak |
|    |                                    |                                                                       | Belum Optimalnya Peran Kelembagaan Perlindungan Hak Perempuan.                                                                                                                                   | Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak |

| No | Pokok Permasalahan | Permasalahan                                                              | Akar Masalah                                                                                                                                                                                | Urusan                                       |
|----|--------------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
|    |                    | Kualitas Pelayanan Konseling Hidup Keluarga Berbasis Gender Belum Optimal | Kurangnya Pembinaan Dan Stiumulan Peningkatan Hidup Keluarga                                                                                                                                | Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak |
|    |                    |                                                                           | Belum Adanya Layanan Bagi Keluarga Dalam Mewujudkan KG Dan Hak Anak                                                                                                                         | Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak |
|    |                    | Ketersediaan Dan Kualitas Data Gender Dan Anak Kurang Optimal             | Data Gender Dan Anak Tidak Mutakhir                                                                                                                                                         | Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak |
|    |                    | Pemenuhan Hak Tumbuh Kembang Anak Di Desa Kurang Optimal                  | Minimnya Peraturan, Pemahaman Dan Pengetahuan Tentang Hak Anak Di Desa                                                                                                                      | Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak |
|    |                    |                                                                           | Belum Efektifnya Kelembagaan Forum Anak Dan Pemberdayaan Anak Di Desa                                                                                                                       | Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak |
|    |                    |                                                                           | Belum Ada Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Di Desa                                                                                                                  | Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak |
|    |                    | Belum Optimalnya Perlindungan Terhadap Anak Dari Tindak                   | Pencegahan Tindak Kekerasan Terhadap Anak Kurang Optimal                                                                                                                                    | Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak |
|    |                    |                                                                           | Layanan Fisik Dan Psikis Terhadap Anak Korban Tindak Kekerasan Belum Optimal                                                                                                                | Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak |
|    |                    |                                                                           | Masih Belum Memadainya Jumlah Dan Kualitas Tempat Pelayanan Bagi Anak Korban Kekerasan, Karena Banyaknya Jumlah Korban Yang Harus Dilayani Dan Luasnya Cakupan Wilayah Yang Harus Dijangkau | Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak |
|    |                    | Layanan Pemenuhan Kebutuhan KB Belum Optimal                              | Advokasi Dan KIE (Komunikasi Informasi Edukasi)                                                                                                                                             | Pengendalian Penduduk Dan                    |

| No | Pokok Permasalahan                               | Permasalahan                                                         | Akar Masalah                                                                                                                                                                                                         | Urusan                                       |
|----|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
|    |                                                  |                                                                      | Tentang Program KB Belum Optimal                                                                                                                                                                                     | Keluarga Berencana                           |
|    |                                                  |                                                                      | Kurangnya Tenaga Penyuluh Keluarga Berencana Dibandingkan Dengan Luas Wilayah                                                                                                                                        | Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana |
|    |                                                  |                                                                      | Pengembangan Dan Pemberdayaan Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP) Dalam Program KB Belum Optimal                                                                                                                     | Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana |
|    |                                                  |                                                                      | Penyediaan Jaminan Ketersediaan Alat Dan Obat Kontrasepsi Belum Memadai.                                                                                                                                             | Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana |
|    |                                                  |                                                                      | Tingkat Kesertaan Ber KB PUS (Pasangan Usia Subur) Belum Optimal, Masih Banyak Tidak Memakai Kontrasepsi ( <i>Unmet Need</i> ) Masih Cukup Tinggi Terutama Yang Menggunakan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) | Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana |
|    |                                                  |                                                                      | Pemahaman Dan Kesadaran Tentang Hak Dan Kesehatan Reproduksi Remaja Masih Rendah                                                                                                                                     | Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana |
|    |                                                  | Pengendalian Kelahiran Penduduk Khususnya Warga Miskin Belum Optimal | Belum Terpadu Dan Tersinkronkannya Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi Dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Dalam Rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk                                                         | Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana |
|    |                                                  |                                                                      | Data Kependudukan Kurang Mutakhir Dan Akurat                                                                                                                                                                         | Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana |
|    | Kualitas Dan Produktifitas Pemuda Belum Maksimal | Fasilitasi Kemandirian Wirausaha Pemuda Belum Optimal                | Cakupan Pelatihan Dan Pembinaan Wirausaha Pemuda Belum Menjangkau Seluruh Masyarakat                                                                                                                                 | Kepemudaan Dan Olah Raga                     |

| No | Pokok Permasalahan                                      | Permasalahan                                                                                  | Akar Masalah                                                                 | Urusan                   |
|----|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
|    |                                                         | Produktifitas Pemuda Dalam Organisasi Belum Optimal                                           | Rendahnya Layanan Konseling Pemuda                                           | Kepemudaan Dan Olah Raga |
|    |                                                         |                                                                                               | Terbatasnya Layanan Pelatihan Dan Pembinaan Kepemudaan                       | Kepemudaan Dan Olah Raga |
|    |                                                         |                                                                                               | Kurang Maksimalnya Pemberdayaan Dan Pembinaan                                | Kepemudaan Dan Olah Raga |
|    |                                                         | Kualitas Pengembangan Olah Raga Belum Optimal                                                 | Terbatasnya Layanan Pelatihan Dan Pembinaan Organisasi Olahraga Dan Atlet    | Kepemudaan Dan Olah Raga |
|    |                                                         |                                                                                               | Fasilitasi Kompetisi Olahraga Di Masyarakat Yang Terbatas                    | Kepemudaan Dan Olah Raga |
|    |                                                         |                                                                                               | Ketersediaan Sarpras Olah Raga Di Masyarakat Yang Kurang                     | Kepemudaan Dan Olah Raga |
|    | Laju Kemiskinan Dampak Covid-19 Yang Sulit Dikendalikan | PSKS Perseorangan Keluarga Dan Kelembagaan Belum Diberdayakan Secara Maksimal                 | Terbatasnya Jumlah Pendamping Sosial                                         | Sosial                   |
|    |                                                         |                                                                                               | Kualitas Tenga Pendamping Belum Optimal                                      | Sosial                   |
|    |                                                         | Penanganan Dan Rehabilitasi Sosial Disabilitas, Anak Terlantar Dan Lanjut Usia Belum Maksimal | Layanan Bantuan Sosial Yang Belum Maksimal                                   | Sosial                   |
|    |                                                         |                                                                                               | Layanan Bantuan Akses Layanan Pendidikan Dan Kesehatan Dasara Belum Maksimal | Sosial                   |
|    |                                                         | Perlindungan Dan Jaminan Sosial Khususnya Bagi Masyarakat Miskin Belum Maksimal               | Penanganan Anak Terlantar Belum Optimal                                      | Sosial                   |
|    |                                                         | Masyarakat / Gelandangan Khususnya Korban Tindak Kekerasan Belum Tertangani Dengan Maksimal   | Pengelolaan Data Kemiskinan Belum Optimal                                    | Sosial                   |
|    |                                                         |                                                                                               | Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan                                      | Sosial                   |

| No | Pokok Permasalahan                                         | Permasalahan                                                                                         | Akar Masalah                                                                                                    | Urusan                                       |
|----|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
|    |                                                            |                                                                                                      | Keluarga Belum Optimal                                                                                          |                                              |
|    |                                                            |                                                                                                      | Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat                                                              | Sosial                                       |
|    |                                                            |                                                                                                      | Rendahnya Peran Aktif Lembaga Dan Masyarakat Dalam Pembangunan Daerah Khususnya Dalam Penanggulangan Kemiskinan | Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa             |
|    |                                                            | Masih Rendahnya Pembinaan Untuk Peningkatan Keberdayaan Keluarga                                     | Kurangnya Pemberdayaan Untuk Meningkatkan Kemampuan Keluarga Untuk Mengelola Sumber Daya                        | Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana |
|    |                                                            |                                                                                                      | Kurangnya Pembinaan Fisik-Material Dan Psikis Mental Spiritual Keluarga Untuk Mandiri, Dan Mengembangkan Diri   | Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana |
|    | Laju Pengangguran Yang Sulit Untuk Ditekan Akibat Covid-19 | Penanganan Pengangguran Tidak Terencana Secara Sistematis                                            | Tidak Tersedianya Dokumen Perencanaan Tenaga Kerja Kabupaten Tegal                                              | Tenaga Kerja                                 |
|    |                                                            | Tingkat Produktifitas Tenaga Kerja Masih Rendah                                                      | Kualitas Dan Kuantitas Pelatihan Tenaga Kerja Yang Belum Optimal                                                | Tenaga Kerja                                 |
|    |                                                            |                                                                                                      | Kualitas Lembaga Pelatihan Tenaga Kerja Yang Kurang Optimal                                                     | Tenaga Kerja                                 |
|    |                                                            | Kurang Optimalnya Pelayanan Dan Penyaluran Tenaga Kerja Lokal                                        | Terbatasnya Layanan Informasi Pasar Kerja                                                                       | Tenaga Kerja                                 |
|    |                                                            |                                                                                                      | Lemahnya Koordinasi Antar Lembaga Ketenagakerjaan                                                               | Tenaga Kerja                                 |
|    |                                                            | Hubungan Industrial Yang Kurang Harmonis Serta Terbatasnya Tata Kelola Kerja Perusahaan Secara Layak | Fasilitasi Penyelesaian Masalah Hubungan Industrial Yang Kurang Optimal                                         | Tenaga Kerja                                 |
|    |                                                            |                                                                                                      | Monitoring Dan Evaluasi Perusahaan Yang Belum Maksimal                                                          | Tenaga Kerja                                 |

| No | Pokok Permasalahan                                                     | Permasalahan                                                                              | Akar Masalah                                                                                  | Urusan          |
|----|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
|    |                                                                        | Penyerapan Lapangan Kerja Melalui Program Transmigrasi Belum Dimanfaatkan Secara Maksimal | Kuota Dan Minat Transmigrasi Masyarakat Masih Relatif Rendah                                  | Transmigrasi    |
|    | Kontribusi Investasi Untuk Membuka Lapangan Kerja Masih Kurang Optimal | Potensi Obyek Investasi Kurang Terpetakan Dan Terprofilkan Dengan Baik                    | Kualitas Materi Dan Media Promosi Belum Mampu Menarik Dan Menjangkau Calon Investor Potensial | Penanaman Modal |
|    |                                                                        | Kurang Maksimalnya Strategi Promosi Untuk Menarik Calon Investor Berkomitmen              | Bahan Promosi Investasi Kurang Memadai                                                        | Penanaman Modal |
|    |                                                                        | Kualitas Pelayanan Modal Belum Optimal                                                    | Prosedur Pelayanan Perijinan Yang Belum Optimal                                               | Penanaman Modal |
|    |                                                                        |                                                                                           | Belum Semua Pengaduan Masyarakat Telah Ditindaklanjuti.                                       | Penanaman Modal |
|    |                                                                        | Belum Semua Perusahaan Mematuhi Ketentuan Perizinan Yang Berlaku                          | Belum Semua Pelaku Usaha Telah Dilakukan Pemantauan                                           | Penanaman Modal |
|    |                                                                        | Data Profil Peluang Investasi Belum <i>Up to Date</i> Sehingga Kurang Termanfaatkan       | Belum Optimalnya Sistem Pendukung Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan.                        | Penanaman Modal |

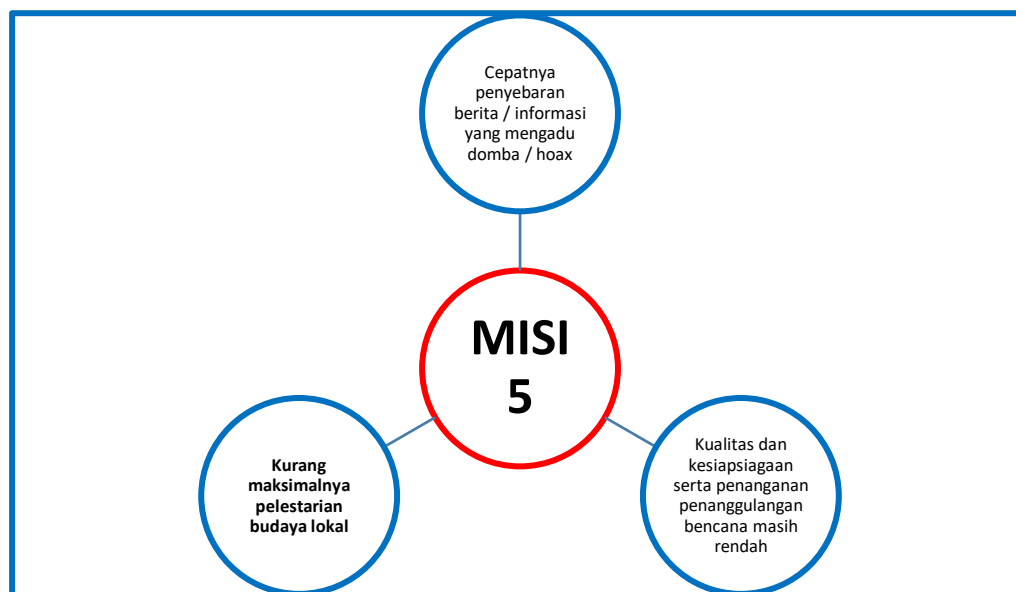
*Sumber: Analisis Bappeda dan Litbang, 2021*

#### e. Permasalahan Pencapaian Misi Ke-5

Hasil identifikasi dan analisis terhadap Misi 5 RPJMD 2019-2024 **“Menciptakan tata kehidupan masyarakat yang tertib, aman, tentram dan nyaman dengan tetap menjaga dan melestarikan nilai-nilai budaya serta kearifan lokal”** terdapat beberapa pokok permasalahan yang harus diselesaikan antara lain:

- ✓ Cepatnya penyebaran berita/informasi yang mengadu domba / hoax
- ✓ Kualitas dan kesiapsiagaan serta penanganan penanggulangan bencana masih rendah
- ✓ Kurang maksimalnya pelestarian budaya lokal

**Gambar 4. 5**  
**Keterkaitan Pokok Permasalahan Dalam Pencapaian Misi**



*Sumber: Analisis Bappeda dan Litbang, 2021*

Adapun identifikasi akar masalah masih-masing pokok permasalahan pada Misi Kelima sebagai berikut:

**Tabel 4. 5**  
**Hasil Identifikasi dan Analisis Permasalahan Pembangunan MISI KELIMA**

| No                                                                                                                                                                       | Pokok Permasalahan                                               | Permasalahan                                                              | Akar Masalah                                                     | Urusan           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------|
| <b>Misi V: Menciptakan Tata Kehidupan Masyarakat Yang Tertib, Aman, Tentram Dan Nyaman Dengan Tetap Menjaga Dan Melestarikan Nilai-Nilai Budaya Serta Kearifan Lokal</b> |                                                                  |                                                                           |                                                                  |                  |
|                                                                                                                                                                          | Cepatnya Penyebaran Berita / Informasi Yang Mengadu Domba / Hoax | Pembinaan Masyarakat Terhadap Ideologi Pancasila Dan Wasbang Masih Kurang | Kurang Maksimalnya Pembinaan Karakter Masyarakat                 | Unsur Kesbangpol |
|                                                                                                                                                                          |                                                                  | Kesadaran Masyarakat Politik Kurang Optimal                               | Kurang Maksimalnya Pendidikan Politik Masyarakat                 | Unsur Kesbangpol |
|                                                                                                                                                                          |                                                                  | Organisasi Masyarakat (Ormas) Belum Terbina Dengan Baik Optimal           | Kurang Luasnya Cakupan Pembinaan Ormas                           | Unsur Kesbangpol |
|                                                                                                                                                                          |                                                                  | Gangguan Kantibmas Belum Terdeteksi Secara Optimal                        | Kurang Maksimalnya Kerjasama Dan Fungsi Organisasi Umat Beragama | Unsur Kesbangpol |

| No | Pokok Permasalahan                                                              | Permasalahan                                                                            | Akar Masalah                                                                                                | Urusan           |
|----|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
|    |                                                                                 | Fasilitasi Dan Koordinasi Penguatan Kerukunan Dan Toleransi Di Masyarakat Belum Optimal | Partisipasi Masyarakat Masih Rendah                                                                         | Unsur Kecamatan  |
|    |                                                                                 | Potensi Konflik SARA Masih Terjadi Di Masyarakat                                        | Pemberdayaan Kerukunan Masyarakat Kurang Maksimal                                                           | Unsur Kesbangpol |
|    |                                                                                 | Penanganan Gangguan Trantibum Di Masyarakat Belum Optimal                               | Kurangnya Koordinasi Trantibum Di Masyarakat                                                                | Unsur Kecamatan  |
|    |                                                                                 | Belum Semua Kasus Trantibum Yang Tertangani                                             | Cakupan Patroli Siaga Dalam Menjaga Ketertiban Umum Dan Ketentraman Masyarakat Yang Belum Optimal.          | Trantibumlinmas  |
|    |                                                                                 | Tingkat Penyelesaian Penegakan Perda Belum Maksimal.                                    | Masih Terbatasnya Personil Patroli Siaga                                                                    | Trantibumlinmas  |
|    |                                                                                 |                                                                                         | Rasio Linmas Per RT Belum Merata Terutama Pada Jumlah Linmas Per RT Dan Rasio Linmas Terlatih Belum Optimal | Trantibumlinmas  |
|    |                                                                                 |                                                                                         | Terbatasnya Sarana Dan Prasarana Ketentraman Dan Ketertiban Umum Yang Standar                               | Trantibumlinmas  |
|    |                                                                                 |                                                                                         | Belum Efektifnya SOP Ketentraman Dan Ketertiban Umum                                                        | Trantibumlinmas  |
|    |                                                                                 |                                                                                         | Masih Banyaknya Perda/Perbup Yang Belum Tersosialisasi                                                      | Trantibumlinmas  |
|    | Kualitas Dan Kesiapsiagaan Serta Penanganan Penanggulangan Bencana Masih Rendah | Pelayanan Dan Respon Penanganan Kasus Kebakaran Sesuai Standar Belum Maksimal.          | Masih Kurangnya Sosialisasi Tentang Bahaya Kebakaran                                                        | Trantibumlinmas  |

| No | Pokok Permasalahan | Permasalahan                                                                  | Akar Masalah                                                                                         | Urusan          |
|----|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
|    |                    |                                                                               | Masih Terbatasnya Sarana Dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran                          | Trantibumlinmas |
|    |                    |                                                                               | Masih Kurangnya SDM Pemadam Kebakaran Terlatih                                                       | Trantibumlinmas |
|    |                    |                                                                               | Belum Ada Data Sarana Dan Prasarana Proteksi Kebakaran                                               | Trantibumlinmas |
|    |                    |                                                                               | Belum Adanya Tenaga Investigasi                                                                      | Trantibumlinmas |
|    |                    |                                                                               | Masih Sedikitnya Pemberdayaan Masyarakat Tentang Penanggulangan Kebakaran                            | Trantibumlinmas |
|    |                    | Layanan Informasi Rawan Bencana Kurang Memadai                                | Masih Kurangnya Kajian Resiko Bencana Yang Tepat                                                     | Trantibumlinmas |
|    |                    | Cakupan Pelayanan Perlindungan Sosial Korban Bencana Daerah Belum Optimal     | Belum Adanya Strategi Penanggulangan Bencana                                                         | Trantibumlinmas |
|    |                    |                                                                               | Masih Kurangnya Relawan Dan ASN Yang Terlatih                                                        | Trantibumlinmas |
|    |                    |                                                                               | Pengendalian Operasi Dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Belum Berstandar | Trantibumlinmas |
|    |                    |                                                                               | Masih Kurangnya SDM TRC Terlatih                                                                     | Trantibumlinmas |
|    |                    |                                                                               | Masih Banyaknya Wilayah Rawan Bencana                                                                | Trantibumlinmas |
|    |                    | Layanan Pembinaan Pencegahan Dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Belum Optimal | Partisipasi Masyarakat Pencegahan Dan Kesiapsiagaan                                                  | Sosial          |

| No | Pokok Permasalahan                          | Permasalahan                                                              | Akar Masalah                                                                   | Urusan     |
|----|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|------------|
|    |                                             |                                                                           | Terhadap Bencana Masih Rendah                                                  |            |
|    |                                             |                                                                           | Pemberdayaan Masyarakat Daerah Rawan Bencana Belum Optimal                     | Sosial     |
|    | Kurang Maksimalnya Pelestarian Budaya Lokal | Bahasa Dan Sastra Lokal Masih Kurang Diajarkan Di Sekolah                 | Aplikasi Bahasa Dan Sastra Lokal Dalam Dunia Pendidikan Masih Kurang           | Kebudayaan |
|    |                                             | Banyak Kebudayaan Lokal Tidak Dikelola Dan Dikembangkan Dengan Baik       | Kurangnya Even-Even Yang Dapat Menarik Minat Masyarakat Dalam Memahami Sejarah | Kebudayaan |
|    |                                             |                                                                           | Kurangnya Pembinaan Nilai Budaya Kepada Masyarakat                             | Kebudayaan |
|    |                                             |                                                                           | Kekayaan Kebudayaan Lokal Tidak Terdata Dengan Baik                            | Kebudayaan |
|    |                                             | Banyak Potensi Kesenian Lokal Tidak Dikelola Dan Dikembangkan Dengan Baik | Kurangnya Pembinaan Kesenian Kepada Masyarakat Pelaku Seni                     | Kebudayaan |
|    |                                             | Banyak Potensi Sejarah Lokal Tidak Dikelola Dan Dikembangkan Dengan Baik  | Kurangnya Pembinaan Sejarah Lokal Kepada Masyarakat                            | Kebudayaan |
|    |                                             | Pelestarian Cagar Budaya Belum Maksimal                                   | Inventarisasi Dan Register Cagar Budaya Lokal Tidak Maksimal                   | Kebudayaan |
|    |                                             |                                                                           | Kurangnyasosialisasi Dan Promosi Cagar Budaya Lokal Kepada Masyarakat Luas     | Kebudayaan |
|    |                                             | Pengelolaan Museum Belum Maksimal                                         | Sarana Dan Prasarana Pendukung Museum Masih Kurang                             | Kebudayaan |
|    |                                             |                                                                           | Kualitas Museum Yang Representatif Kurang Merata                               | Kebudayaan |

*Sumber: Analisis Bappeda dan Litbang, 2021*

#### **4.2.1 Permasalahan Berdasarkan Urusan**

Setelah dijabarkan permasalahan pada tiap-tiap pencapaian Misi, kemudian akan ditampilkan secara singkat pengelompokan permasalahan berdasarkan urusan sebagai berikut:

##### **1) Urusan Wajib Pelayanan Dasar**

###### **a. Urusan Pendidikan**

- Mutu layanan pendidikan masyarakat belum optimal. Hal ini tercermin dari Tingkat Partisipasi PAUD yang baru 79,86%, Tingkat Partisipasi Pendidikan Kesetaraan baru 97,25%, rata-rata nilai kelulusan SD sebesar 77,12 dan rata-rata nilai kelulusan SMP sebesar 78,46.
- Pengembangan kurikulum lokal yang berkualitas belum optimal di mana persentase muatan local dalam KBM ditahun 2020 hanya sebesar 5% dengan total 38 jam pelajaran ditingkat SD dan 2 jam pelajaran di tingkat SMP.
- Kebutuhan tenaga pendidik dan kependidikan belum merata di mana rasio guru-murid SD 1:46,98 dan rasio guru-murid SMP sebesar 1:55,12.
- Pengendalian mutu satuan pendidikan swasta belum maksimal. Hal ini tercermin dari sekolah swasta PAUD yang terakreditasi baru mencapai 10,73%, sekolah swasta SD yang terakreditasi baru mencapai 99,29%, dan sekolah swasta SMP terakreditasi baru sebesar 83,19% ditahun 2020.

###### **b. Urusan Kesehatan**

- Belum maksimalnya pengelolaan fasilitas dan layanan kesehatan masyarakat. Hal tersebut belum tercermin dari RS rujukan yang terakreditasi baru 88,9%, persentase fasyankes tingkat pertama yang terakreditasi baru 42%. Selain itu layanan kesehatan belum adan yang mencapai 100% bahkan rata-ratanya baru mencapai 58,01% antara lain layanan ibu hamil, layanan persalinan, layanan kesehatan bayi baru lahir, layanan balita sesuai standar, pemeriksaan lansia sesuai standar, layanan penderita DM, layanan penderita hipertensi, layanan penderita ODGJ berat, layanan terduga TBC, layanan orang beresiko HIV.
- Kualitas sumberdaya kesehatan terbatas dan tidak merata di mana cakupan puskesmas yang mempunyai 9 tenaga kesehatan strategis baru mencapai 82,8%.
- Belum semua makanan dan minuman yang beredar di Kabupaten Tegal memiliki kualitas yang sesuai dengan yang dipersyaratkan di mana ditahun 2020 masih ada 18,99% pangan yang tidak memenuhi syarat.
- Peran serta masyarakat dalam melaksanakan perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS) belum maksimal di mana cakupan rumah tangga yang melaksanakan PHBS baru 95,4% ditahun 2020.

###### **c. Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang**

- Cakupan layanan irigasi berkualitas tidak menjangkau seluruh wilayah. Dari 162,47 jaringan irigasi yang hanya 58,86% yang kondisinya baik ditahun 2020.
- Terbatasnya layanan air minum berkualitas secara merata. Hingga tahun 2020 cakupan akses air minum berkualitas baru mencapai 61,09%.
- Belum semua ruas jalan kabupaten memiliki drainase jalan. Dari 847,27 km panjang jalan kabupaten ditahun 2020 baru 58,42% yang dilengkapi system drainase.
- Penataan bangunan dan fisik perkotaan yang kurang maksimal dan tidak sesuai standar. Hingga tahun 2020 bangunan gedung negara yang sesuai standar teknis baru mencapai 76,88%.

- Penyedia jasa konstruksi yang sesuai standar dan bersertifikat belum tersedia dan belum dievaluasi berkala. Hingga tahun 2020 belum ada jasa konstruksi yang bersertifikat dan belum dilakukan dievaluasi terhadapnya.
  - Kualitas jalan dan jembatan yang baik tidak merata. Rasio panjang jalan dengan kondisi baik baru mencapai 81,11%, sedangkan unit jembatan dalam kondisi baik baru mencapai 68,7%.
  - Belum terdapat RDTR yang dilegalisasi. Saat ini RDTR masih dalam tahap penyusunan dengan mengacu revisi RTRW yang saat ini masih dalam proses untuk ditetapkan.
  - Infrastruktur penanganan sampah belum maksimal sementara volume sampah terus meningkat. Dari tahun ketahun volume sampah terus meningkat hingga tahun 2020 mencapai 148,425 m<sup>3</sup> sementara Kabupaten Tegal saat ini hanya memiliki 1 (satu) TPA yaitu TPA Penujah yang hanya menggunakan sistem *controlled landfill*.
  - Cakupan layanan limbah rumah tangga kurang maksimal. Meskipun akses sanitasi ditahun 2020 sudah mencapai 100% namun masih ada 5,23% rumah tangga yang tidak memiliki jamban yang layak.
- d. Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
- Penanganan rumah tidak layak huni kurang optimal. Hingga tahun 2020 masih ada 13,06% rumah yang tidak layak huni yang perlu untuk ditangani.
  - Penanganan lingkungan permukiman kumuh belum optimal. Dari 487,78 Ha kawasan kumuh yang ada hingga tahun 2020 masih tersisa 314,77 Ha.
  - Tidak meratanya layanan PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum) di mana tahun 2020 capaian akses PSU baru mencapai 77,97%.
- e. Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat
- Belum semua kasus trantibum dapat tertangani. Ditahun 2020 hanya 82% kasus trantibum yang tertangani bahkan menurun dibandingkan capaian tahun 2019.
  - Tingkat penyelesaian penegakan perda belum maksimal. Dari 129 kasus pelanggaran perda ditahun 2020 hanya 83% yang terselesaikan.
  - Pelayanan dan respon penanganan kasus kebakaran sesuai standard belum maksimal. Dari 56 kasus kebakaran ditahun 2020 hanya 79% kasus yang tertangani sesuai standard.
  - Layanan informasi rawan bencana kurang memadai. Persentase masyarakat yang tinggal di daerah rawan bencana dan memperoleh informasi ancaman bencana baru 61,75%.
  - Layanan pembinaan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana belum optimal di mana persentase masyarakat yang mendapatkan pembinaan penanggulangan bencana baru 1,31%
  - cakupan pelayanan perlindungan sosial korban bencana daerah belum optimal di mana korban berhasil dicari, ditolong, dan dievakuasi terhadap kejadian bencana ditahun 2020 baru mencapai 21,15 dari total korban bencana.
- f. Urusan Sosial
- PSKS perseorangan keluarga dan kelembagaan belum diberdayakan secara maksimal. Hingga tahun 2020 baru 85,71% yang telah diberdayakan.
  - Penanganan dan rehabilitasi sosial disabilitas, anak terlantar dan lanjut usia belum maksimal di mana hingga tahun 2020 baru 96,34% yang direhabilitasi.
  - Perlindungan dan Jaminan Sosial khususnya bagi masyarakat miskin belum maksimal di mana cakupan perlindungan sosial ditahun 2020 hanya mencapai 83,28%. Sedangkan khusus warga miskin cakupan penanganannya baru mencapai 90,43%.

- Masyarakat / gelandangan khususnya korban tindak kekerasan belum tertangani dengan maksimal. Meskipun cakupan penanganannya sudah 100% namun secara kualitas belum optimal karena: adanya status migran ilegal menjadikan kesulitan dalam penanganan; Belum adanya sistem penanganan Warga Migran yang menjadi korban kekerasan; Belum adanya anggaran sehingga menjadi kendala dalam penanganan Warga migran yang menjadi korban kekerasan.
- Kualitas pelayanan perlindungan sosial korban bencana daerah belum optimal. Meskipun cakupan penanganan korban bencana telah 100% namun masih banyak yang perlu ditingkatkan karena: Bantuan yang diberikan kepada korban bencana masih belum memenuhi Kebutuhan Dasar Minimal; Kapasitas pendamping sosial dan pendamping psikososial korban bencana belum merata; Koordinasi dalam membangun mekanisme penanggulangan bencana secara terpadu sinkron; Sarana dan prasarana dalam penanggulangan bencana belum representatif; dan Belum seluruhnya daerah rawan bencana di Kabupaten Tegal melaksanakan kesiapsiagaan berbasis masyarakat.
- Pengelolaan taman makam pahlawan kurang maksimal. Hal ini disebabkan karena: Kurangnya sarana prasarana Taman Makam Pahlawan; Taman Makam Pahlawan belum representatif; Kurangnya tenaga pemeliharaan Taman Makam Pahlawan; Belum optimalnya Pemberdayaan Perintis Kemerdekaan/Warakawuri dan Veteran Pejuang.

## 2) Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar

### g. Urusan Tenaga Kerja

- Penanganan pengangguran tidak terencana secara sistematis. Hal ini disebabkan karena belum adanya *grand desain* perencanaan tenaga kerja.
- Tingkat produktivitas tenaga kerja masih rendah dan belum stabil di mana 2020 setiap tenaga kerja rata-rata hanya menghasilkan Rp. 37,989 juta pertahun turun dibandingkan produktivitas tahun 2018 yang mencapai Rp.38,510 juta pertahun.
- Kurang optimalnya pelayanan dan penyaluran tenaga kerja lokal di mana dari 15.189 pencari kerja hanya 17,82% yang ditempatkan.
- Hubungan industrial yang kurang harmonis serta terbatasnya tata kelola kerja perusahaan secara layak. Setidaknya ditahun 2020 baru 7,08% perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak serta jumlah perselisihan industrial yang meningkat tiap tahun hingga tahun 2020 mencapai 27 kasus.

### h. Urusan Pemberdayaan perempuan dan Perlindungan Anak

- Prioritas anggaran pembangunan berbasis gender belum maksimal di mana tahun 2020 baru 26,84% anggaran pembangunan yang berbasis gender
- Masih rendahnya perlindungan terhadap perempuan dari tindak kekerasan di mana masih ada 5,16% penduduk perempuan yang mengalami kekerasan ditahun 2020.
- Kualitas pelayanan konseling hidup keluarga berbasis gender belum optimal di mana tahun 2020 baru 0,04% keluarga yang mendapatkan pelayanan konseling.
- Ketersediaan dan kualitas data gender dan anak kurang optimal di mana ditahun 2020 dari 48 OPD baru 31,25% OPD yang menyediakan data gender dan anak.
- Pemenuhan hak tumbuh kembang anak di desa kurang optimal di mana baru 20,6% desa layak anak.
- Belum optimalnya perlindungan terhadap anak dari tindak kekerasan di mana masih ada 36 anak ditahun 2020 yang mengalami kekerasan.

- i. Urusan Pangan
  - Penguatan cadangan pangan berpotensi menurun. Meskipun masih 163,80% ditahun 2020 namun sudah terlihat data penurunannya dibandingkan tahun 2017 yang mencapai 166,37%. Hal ini disebabkan karena meningkatnya jumlah konsumsi yang tidak seimbang dengan peningkatan ketersediaan pangan yang ada.
- j. Urusan Pertanahan
  - Sertifikasi lahan milik pemda masih rendah baru mencapai 53,9 persen lahan pemda bersertifikat.
- k. Urusan Lingkungan Hidup
  - Pengelolaan lingkungan hidup belum terencana dengan maksimal. Setidaknya ditahun 2020 baru terdapat 2 dokumen Pengendalian dan Perencanaan Lingkungan yang bisa dimanfaatkan dari 18 produk.
  - Pengendalian dan pengawasan pencemaran lingkungan hidup belum efektif di mana masih ada 7,08% sungai yang tercemar sehingga perlu untuk ditekan. Selain itu Persentase Luas Lahan/area yang dilakukan upaya pengendalian pencemaran dan/kerusakan melalui upaya pencegahan, penanggulangan dan/atau pemulihan baru mencapai 1,08% ditahun 2020.
  - Pengelolaan lahan kehati belum optimal baru mencapai 50,55% ditahun 2020.
  - Pengelolaan bahan dan limbah berbahaya, beracun kurang maksimal baru 60% yang tertangani ditahun 2020.
  - Belum optimalnya cakupan penanganan sampah di masyarakat. Persentase penanganan sampah ditahun 2020 baru mencapai 30% dan persentase pengurangan sampah baru 14%.
  - Pelaku usaha yang berkomitmen dalam pengelolaan lingkungan belum maksimal di mana baru mencapai 30%. Selain itu pelaku usaha yang berkaitan lingkungan hidup yang dilakukan pengawasan baru 60%.
  - Masyarakat kurang terstimulasi untuk mengelola lingkungan hidup di mana baru ada 20 penghargaan lingkungan hidup yang diberikan kepada masyarakat ditahun 2020
  - Penanganan pengaduan masyarakat terkait LH belum maksimal di mana baru 90% pengaduan lingkungan hidup yang ditindaklanjuti.
- l. Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
  - Layanan dan pengelolaan penyediaan data kependudukan belum semuanya memiliki Perjanjian Kerja Sama (PKS). Dari 89 lembaga pemanfaat akses data kependudukan baru 15,73% yang memiliki PKS.
  - Kualitas Layanan pendaftaran penduduk masyarakat kurang optimal di mana hingga tahun 2020 belum semua penduduk/anak memiliki KK, KTP-Elektronik dan KIA. Kepemilikan KTP-Elektronik baru 99,68%, Kepemilikan KK baru 91,67% dan kepemilikan KIA baru 21,80%.
  - Kualitas Layanan pencatatan sipil kepada masyarakat kurang optimal di mana hingga tahun 2020 belum semua penduduk memiliki akta kelahiran (93,10%) dan baru 68,54% penduduk yang meninggal diterbitkan akta kematian.
- m. Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
  - Tata Kelola Keuangan dan Aset Desa Kurang optimal di mana baru 35% desa yang tertib dan baik administrasi ditahun 2020.
  - Dukungan sarana dan prasarana pemerintah desa belum optimal di mana rata-rata sarana dan prasarana desa yang terpenuhi baru 55,23% ditahun 2020.

- Cakupan kerjasama desa dalam pengentasan desa tertinggal belum optimal di mana ditahun 2020 baru 69,40% desa yang melakukan kerjasama pengentasan desa tertinggal
- n. Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
- Layanan pemenuhan kebutuhan KB belum optimal di mana persentase pemakaian alat kontrasepsi (CPR) tahun 2020 baru mencapai 67,8% dari pasangan usia subur (PUS) dan khusus masyarakat miskin baru 67,37% bahkan rasionya menurun dibandingkan tahun sebelumnya. Bersamaan itu diperburuk dengan persentase PUS *Unmetneed* yang masih relatif tinggi 15,27% ditahun 2020.
  - Pengendalian kelahiran penduduk khususnya warga miskin belum optimal di mana nilai *Total Fertility Rate* (TFR) ditahun 2020 mencapai 2,28 bahkan naik dibandingkan tahun sebelumnya.
  - Masih rendahnya pembinaan untuk peningkatan keberdayaan keluarga di mana ditahun 2020 baru 21,58% keluarga yang mendapatkan pembinaan dari total 184.512 sasaran keluarga.
- o. Urusan Perhubungan
- Layanan keselamatan berkendara belum optimal di mana hingga tahun 2020 kebutuhan kelengkapan rambu lalu lintas penunjang keselamatan yang terpenuhi baru mencapai 41,95%. Selain itu untuk kebutuhan lampu penerangan jalan umum baru terpenuhi 59,82%.
  - Layanan angkutan transportasi belum optimal di mana hingga tahun 2020 pemenuhan kebutuhan terminal, *shelter*/halte baru mencapai 32,2% dari kebutuhan yang ada serta cakupan angkutan umum yang telah melakukan uji KIR baru mencapai 74,74%.
  - Rekayasa lalu lintas dan pengelolaan parkir belum optimal di mana sampai dengan tahun 2020 cakupan andalalin sebagai dasar rekayasa lalu lintas baru mencapai 41,67% dari total potensi usaha yang berdampak pada perubahan sistem transportasi, serta belum semua lokasi parkir dikelola baru mencapai 89,67% yang terkelola.
- p. Urusan Komunikasi dan Informatika
- Infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi untuk pemerintahan yang efektif dan efisien belum memadai di mana sampai dengan tahun 2020 baru 16,67% kebutuhan TIK yang terpenuhi.
  - Penyebarluasan Informasi tentang pelayanan publik masih terbatas baru mencapai 51,6% masyarakat yang terakses informasi publik ditahun 2020
  - Terbatasnya layanan publik yang terintegrasi dan dapat diakses secara *online* yang baru mencapai 45% ditahun 2020.
- q. Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
- Masih ada KSP/USP yang kondisi koperasinya tidak sehat di mana ditahun 2020 persentase koperasi sehat hanya mencapai 7,21% dan jika digabungkan dengan jumlah koperasi cukup sehat rasionya menjadi 72,9%.
  - Masih kurangnya kualitas SDM perkoperasian di mana SDM Koperasi ditahun 2020 yang kompeten hanya sebesar 9% dari seluruh pengurus/pengawas/pengelola koperasi.
  - Masih kurangnya kemitraan perkoperasian di mana koperasi yang bermitra ditahun 2020 hanya sebesar 1,04%

- Masih rendahnya kemitraan Usaha Mikro Kecil dan Menengah di mana KUKM yang bermitra ditahun 2020 hanya sebesar 2,63%
  - Peningkatan skala usaha UMKM kurang maksimal di mana ditahun 2020 belum ada usaha mikro yang meningkat skala usahanya
- r. Urusan Penanaman Modal
- Potensi obyek investasi kurang terpetakan dan terprofilkan dengan baik di mana hingga tahun 2020 belum dibuat profil potensi obyek investasi
  - Kurang maksimalnya strategi promosi untuk menarik calon investor berkomitmen di mana baru 97% calon investor yang berkomitmen.
  - Kualitas pelayanan modal belum optimal terlihat dari IKM yang baru mencapai 78,08 sehingga masih bisa dan perlu untuk ditingkatkan
  - Belum semua perusahaan mematuhi ketentuan perizinan yang berlaku baru 61,28% perusahaan ditahun 2020 yang berizin.
  - Data profil peluang investasi belum *up to date* sehingga kurang termanfaatkan di mana baru 6,29% data profil yang update dan termanfaatkan.
- s. Urusan Kepemudaan dan Olahraga
- Fasilitas kemandirian wirausaha pemuda belum optimal di mana hingga tahun 2020 rasio pemuda yang difasilitasi untuk berwirausaha baru mencapai 0,073% dari total pemuda yang ada.
  - Produktifitas pemuda dalam organisasi belum optimal di mana hingga tahun 2020 rasio pemuda yang aktif berorganisasi hanya mencapai 0,067% dari total pemuda yang ada.
  - Kualitas pengembangan olah raga belum optimal di mana persentase cabang olah raga yang dibangun baru mencapai 75% dari total cabang olah raga yang ada.
- t. Urusan Statistik
- Ketersediaan data dan informasi yang dibutuhkan dalam pelayanan publik masih rendah dan kurang berkualitas di mana hingga tahun 2020 baru terdapat 38,15% kebutuhan data statistik yang tersedia.
- u. Urusan Persandian
- Keamanan informasi untuk pelayanan publik berbasis elektronik belum memadai di mana tingkat keamanan informasi baru mencapai 40,62% ditahun 2020
- v. Urusan Kebudayaan
- Bahasa dan sastra lokal masih kurang diajarkan di sekolah hanya sebanyak 2 jam mata pelajaran dalam seminggu.
  - Banyak kebudayaan lokal tidak dikelola dan dikembangkan dengan baik di mana ditahun 2020 baru 61,11% kebudayaan dan tradisi yang dikembangkan.
  - Banyak potensi kesenian lokal tidak dikelola dan dikembangkan dengan baik di mana tahun 2020 baru 57,5% seni dan kesenian lokal yang mendapat pembinaan.
  - Banyak potensi sejarah lokal tidak dikelola dan dikembangkan dengan baik di mana hingga tahun 2020 baru 76,47% sejarah yang terdokumentasikan.
  - Pelestarian Cagar budaya belum maksimal di mana baru 45,83% ditahun 2020
  - Pengelolaan museum belum maksimal di mana hingga tahun 2020 baru 65% yang terkelola.

- w. **Urusan Perpustakaan**
  - Tingkat literasi masyarakat Kabupaten Tegal masih tergolong rendah. Hal ini tercermin dari tingkat kegemaran membaca masyarakat yang baru mencapai 47,91% ditahun 2020. Selain itu jika dilihat dari indeks pembangunan literasi masyarakat baru mencapai 9,09%
- x. **Urusan Kearsipan**
  - Belum optimalnya pengelolaan Arsip penting daerah khususnya arsip keuangan dan asset di mana nilai Laporan Audit Kinerja Eksternal (LAKE) tahun 2020 baru mencapai 73.

### **3) Urusan Pemerintahan pilihan**

- y. **Urusan Kelautan dan Perikanan**
  - Belum optimalnya produksi perikanan tangkap. Meskipun mengalami peningkatan namun nilai produksi terakhir ditahun 2020 baru mencapai Rp. 13,6 miliar.
  - Praktek penangkapan ikan ilegal di PUD (Menggunkan racun dan Listrik/setrum) masih marak. Dari 27 lokasi penangkapan hanya 3 lokasi yang bebsar dari penangkapan ikan illegal.
  - Belum optimalnya produksi perikanan budidaya. Meskipun mengalami peningkatan namun nilai produksi terakhir ditahun 2020 baru mencapai Rp. 145,6 miliar.
  - Belum optimalnya kemanfaatan pengolahan hasil perikanan. Nilai produksi pengolahan hasil perikanan baru mencapai Rp. 131,1 miliar bahkan turun dibandingkan nilai produksi tahun 2019 yang mencapai Rp. 171,409 miliar.
- z. **Urusan Pariwisata**
  - Destinasi tujuan wisata (DTW) kurang dioptimalkan/dikembangkan/terkelola. Dari seluruh destinasi tujuan wisata yang ada baru 56,67% ditetapkan secara legal.
  - Belum semua usaha pariwisata yang memiliki / memperpanjang ijin usaha. Ditahun 2020 baru 138 usaha pariwisata yang memiliki/memperpanjang tanda daftar usaha pariwisata TDUP dari 256 usaha pariwisata terdaftar.
  - Kurang maksimalnya pemasaran destinasi tujuan wisata yang ada. Rata-rata DTW yang dipromosikan beberapa tahun terakhir hanya 61,67% dari total DTW terdaftar.
  - Pembinaan pelaku usaha pariwisata dan ekonomi kreatif belum maksimal. Dalam 5 tahun terakhir kapasitas kemampuan pembinaan SDM pariwisata hanya terbanyak 100 orang.
- aa. **Urusan Pertanian**
  - Produksi pertanian dan peternakan masih perlu dioptimalkan. Ditahun 2020 produksi daging baru mencapai 11.284 ton, telur mencapai 10.760 ton dan susu 0,604 ton. Sedangkan produktifitas padi baru 6,25 ton/ha, jagung 6,69 ton/ha, kedelai 1,07 ton/ha, ketela pohon 18,37 ton/ha, ketela rambat 8,03 ton/ha, kacang tanah 1,3 ton/ha, kacang hijau 1,2 ton/ha, kelapa 0,79 ton/ha, cengkeh 0,08 ton/ha, the 0,24 ton/ha.
  - Kurangnya antisipasi penanggulangan bencana pertanian di mana ditahun 2020 baru 89,90% area yang bebas dari serangan organisme pengganggu tanaman (OPT)
  - Pengawasan produksi hasil peternakan yang aman dan sehat belum optimal. Dari total populasi ternak ditahun 2020 baru 31,37% yang terkendali status kesehatannya.
  - Kualitas kelembagaan kelompok tani belum optimal di mana baru 2 kelompok yang meningkat statusnya dari pemula jadi maju/mandiri.

bb. Urusan Perdagangan

- Rendahnya kualitas /standarisasi pasar serta pengelolaannya. Hal ini tergambar dari persentase pasar dalam kondisi baik baru mencapai 15,38% dari total 26 pasar yang ada.
- Masih terdapat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya (UTTP) yang tidak standar di mana ditahun 2020 baru 27,95% alat UTTP pedagang yang ditera Kembali.
- Pengendalian harga barang kurang maksimal di mana dalam satu tahun hanya dilakukan 18 kali operasi pasar atau tiap kecamatan 1 kali operasi pasar tiap tahun.
- Belum optimalnya nilai ekspor bersih produk lokal di mana nilai ekspor produk lokal ditahun 2020 baru mencapai Rp. 144 miliar bahkan lebih rendah dibandingkan angka 2016 yang mencapai Rp. 193 miliar.

cc. Urusan Perindustrian

- Pengembangan sektor industri yang belum maksimal di mana sertifikasi produk IKM dan PIRT baru sebanyak 82 produk sejak tahun 2018-2020, sertifikasi nutrisi 41 produk sejak tahun 2019-2020, uji kadaluarsa 7 produk sejak tahun 2018-2019, sertifikasi halal sebanyak 41 produk sejak 2018-2020, pendaftaran merk 99 produk sejak 2015-2020, sertifikasi BKI sebanyak 4 produk sejak tahun 2018-2019, dan sertifikasi SNI baru sebanyak 2 produk ditahun 2018 saja.
- Masih rendahnya data/informasi industri yang terverifikasi di mana ditahun 2020 baru 20% industry yang memiliki 7 informasi industri secara lengkap.

**4) Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan**

dd. Sekretariat Daerah

- Fasilitasi peningkatan pelayanan publik belum optimal di mana rata-rata IKM kecamatan baru mencapai 80,41
- Maturitas UKPBJ belum optimal di mana tahun 2020 baru mencapai level 1.
- Standarisasi LPSE belum merata di mana baru 12% tingkat standarisasi LPSE yang terpenuhi.

ee. Sekretariat DPRD

- Integrasi pengawasan DPRD dalam pembangunan belum optimal di mana baru 90% hasil pengawasan DPRD yang terintegrasi dalam pembangunan.

**5) Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan**

ff. Unsur Perencanaan

- Belum maksimalnya kualitas proses penyusunan dokumen perencanaan dan sinkronisasi penganggaran. Meskipun seluruh dokumen perencanaan telah disusun sesuai tahapan namun masih terdapat substansi yang perlu disempurnakan seperti ketepatan indikator, dan keselarasan antar dokumen perencanaan daerah dan perangkat daerah yang belum 100%.
- Manajemen kinerja dan sistem pengendalian internal OPD belum efektif di mana tingkat kesesuaian rencana dan realisasi terakhir baru mencapai 92,8%.

gg. Unsur Keuangan

- Belum Optimalnya Pengelolaan APBD di mana tahun 2020 RKA yang dikumpulkan tepat waktu baru mencapai 35% serta RKA OPD yang sesuai dengan pedoman penyusunan baru mencapai 80%.
- Pungutan pajak belum optimal di mana tahun 2020 kontribusi pajak terhadap PAD baru 29%.

- Belum Optimalnya Pengelolaan Barang Milik Daerah di mana hingga tahun 2020 baru 62,5% OPD yang mengelola BMD dengan baik dan benar.

hh. Unsur Kepegawaian

- Tingkat kedisiplinan ASN masih kurang di mana ditahun 2020 masih ada 0,12% ASN yang mendapat hukuman disiplin.
- Jabatan struktural/jabatan fungsional (non guru non kesehatan) belum terisi secara maksimal berdasarkan kompetensinya di mana persentase jabatan struktural yang diisi sesuai dengan kompetensi dan kualifikasi baru mencapai 87,97% serta persentase jabatan fungsional yang diisi sesuai dengan kompetensi dan kualifikasi baru mencapai 35,76%.

ii. Unsur Pendidikan dan Pelatihan

- Masih banyak ASN yang belum mengikuti pelatihan teknis 20 jam/tahun baru sekitar 47,49% ASN yang telah mengikuti diklat 20 jam dalam setahun.
- Masih banyak ASN yang belum mengikuti seminar/*workshop*/sejenis sesuai dengan tupoksi jabatan baru sekitar 33,40% ASN yang telah mengikuti seminar/*workshop*/sejenis sesuai dengan tupoksi jabatan.

jj. Unsur Penelitian dan Pengembangan

- Pemanfaatan hasil-hasil penelitian dan inovasi yang dapat mendukung secara langsung pelaksanaan berbagai sektor pembangunan daerah belum optimal. Tahun 2020 hanya 58,64 hasil kelitbangan yang dapat dimanfaatkan dan terintegrasi sesuai dengan kebutuhan perencanaan pembangunan.

## 6) Unsur Pengawasan

- Tindak lanjut hasil pengawasan BPK RI perlu ditingkatkan di mana tahun 2020 baru mencapai 91,67% penyelesaian tindak lanjut temuan pemeriksaan BPK
- Tindak lanjut hasil pengawasan itprov perlu dioptimalkan di mana tahun 2020 baru mencapai 59,26% temuan yang ditindaklanjuti
- Tindak lanjut hasil pengawasan ItKab masih rendah baru mencapai 8,94% yang terselesaikan.
- Predikat WBK/WBBM berdasarkan penilaian internal belum optimal di mana baru sekitar 16,67% unit kerja yang ditetapkan menuju WBK/WBBM.

## 7) Unsur Kewilayahan (Kecamatan)

- Belum optimalnya pelayanan publik kepada masyarakat di Kecamatan di mana rata-rata nilai IKM kecamatan baru 80,41 dan paling rendah adalah Kecamatan Talang dengan nilai 73,2
- Kurang optimalnya kemandirian desa/kelurahan dalam mengelola pembangunan kewilayahan di mana masih ada 31 desa tertinggal dan 216 desa berkembang.
- Pembangunan desa belum semua tertib administrasi baru 37,67 persen yang tertib administrasi

## 8) Unsur Pemerintahan Umum (Kesbangpol)

- Pembinaan masyarakat terhadap ideologi pancasila dan wasbang masih kurang di mana persentase masyarakat yang memahami ideologi Pancasila dan karakter kebangsaan baru 80,42%
- Organisasi Masyarakat (ormas) belum terbina dengan baik optimal, hingga tahun 2020 baru 80% ormas yang terbina
- Gangguan Kamtibmas belum terdeteksi secara optimal yang menyebabkan tidak konflik dapat tertangani, baru 97% konflik ditahun 2020 yang tertangani.

## 4.2. ISU STRATEGIS

Isu Strategis adalah keadaan atau kondisi yang harus mendapatkan perhatian atau prioritas dalam perencanaan pembangunan daerah karena mempunyai dampak yang signifikan bagi daerah. Isu strategis mempunyai karakteristik antara lain penting, mendasar, mendesak, dan menentukan tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Isu-isu strategis pembangunan di Kabupaten Tegal dirumuskan berdasarkan permasalahan-permasalahan pembangunan daerah, tantangan dan potensi pembangunan daerah kedepan, yang meliputi aspek fisik-lingkungan, sosial-budaya, ekonomi-keuangan dan legal-kelembagaan. Dengan kata lain isu strategis jika diprioritaskan penanganan maupun antisipasinya, akan menjadi kelebihan tersendiri dalam meningkatkan peluang tercapainya tujuan dan sasaran pembangunan, namun sebaliknya jika isu strategis tidak diantisipasi dengan tepat dapat menyebabkan kegagalan dalam pelaksanaan tahapan pembangunan daerah

Isu strategis diidentifikasi dari berbagai sumber antara lain: (1) isu strategis dinamika internasional, nasional dan regional yang berpengaruh terhadap Kabupaten Tegal, (2) Isu strategis dari kebijakan pembangunan daerah jangka panjang Kabupaten Tegal, serta (3) Isu strategis yang bersumber dari analisis situasi dan kondisi kependudukan, sosial budaya, sarana prasarana dan pemerintahan umum saat ini serta kemungkinan di masa mendatang.

### 4.2.1 Isu Strategis Global

Isu-isu strategis di tingkat internasional yang relevan bagi perencanaan pembangunan jangka menengah Kabupaten Tegal antara lain: penerapan Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA), pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan (*Sustainable Development Goals/SDG's*), ancaman krisis ekonomi global, penerapan green economic global (ekonomi ramah lingkungan), penerapan sumber energi alternatif sebagai antisipasi sumber energi tak terbarukan, antisipasi perubahan iklim global (*global warning/climate change*), kemajuan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) yang semakin pesat, serta era industri 4.0.

#### a. *SDG's (Sustainable Development Goals)*

Tujuan pembangunan dalam *Millennium Development Goals* (MDGs) sebagai agenda pembangunan global tidak berhenti pada tahun 2015. Agenda untuk melanjutkan MDGs adalah dikembangkannya suatu konsepsi yang disebut *Sustainable Development Goals* (SDGs). Perbedaan yang terlihat jelas antara MDGs dan SDGs adalah permasalahan isu lingkungan global yang lebih ditekankan dan diprioritaskan pada SDGs. Sehingga program baru ini merupakan hasil evaluasi terhadap perubahan selama kurun waktu 15 tahun program MDGs berjalan.

Konsep SDGs ini diperlukan sebagai kerangka pembangunan baru yang mengakomodasi semua perubahan yang terjadi pasca 2015-MDGs. Terutama berkaitan dengan perubahan situasi dunia sejak tahun 2000 mengenai isu depletion sumberdaya alam, kerusakan lingkungan, perubahan iklim semakin krusial, perlindungan sosial, *food and energy security*, dan pembangunan yang lebih berpihak pada kaum miskin. Adapun tiga pilar yang menjadi indikator dalam konsep pengembangan SDGs yaitu: (1) indikator yang melekat pada pembangunan manusia (*Human Development*), di antaranya: pendidikan dan kesehatan; (2) Indikator yang

melekat pada lingkungan sosialnya (*Social Economic Development*), seperti ketersediaan sarana dan prasarana lingkungan dan pertumbuhan ekonomi, dan (3) indikator yang melekat pada lingkungan yang lebih besar (*Environmental Development*), berupa ketersediaan sumberdaya alam dan kualitas lingkungan yang baik. Dalam penyusunan indikator dalam konsep SDGs, selain memikirkan standar global dalam mengedepankan suatu konsep pembangunan yang berkelanjutan, juga harus memerhatikan bahwa segala sesuatunya itu harus terukur, tidak terlepas dari prinsip *Environmental Sustainability*, *Economic Sustainability* dan *Social Sustainability*. Secara Global terdapat 17 *Goals* yang mesti dicapai hingga 2030, yaitu

- 1) Mengakhiri segala bentuk kemiskinan di manapun.
- 2) Mengakhiri kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan peningkatan gizi serta mendorong pertanian yang berkelanjutan.
- 3) Menjamin kehidupan yang sehat dan mendorong kesejahteraan bagi semua orang di segala usia.
- 4) Menjamin pendidikan yang inklusif dan berkeadilan serta mendorong kesempatan belajar seumur hidup bagi semua orang.
- 5) Menjamin kesetaraan gender serta memberdayakan seluruh wanita dan perempuan.
- 6) Menjamin ketersediaan dan pengelolaan air serta sanitasi yang berkelanjutan bagi semua orang.
- 7) Menjamin akses energi yang terjangkau, terjamin, berkelanjutan dan modern bagi semua orang.
- 8) Mendorong pertumbuhan ekonomi yang terus menerus, inklusif, dan berkelanjutan serta kesempatan kerja penuh dan produktif dan pekerjaan yang layak bagi semua orang.
- 9) Membangun infrastruktur yang berketahanan, mendorong industrialisasi yang inklusif dan berkelanjutan serta membina inovasi.
- 10) Mengurangi kesenjangan di dalam dan antar negara.
- 11) Menjadikan kota dan permukiman yang inklusif, aman, tangguh dan berkelanjutan.
- 12) Menjamin pola produksi dan konsumsi yang berkelanjutan.
- 13) Mengambil tindakan mendesak untuk mengurangi dampak perubahan iklim.
- 14) Melestarikan dan menggunakan samudera, lautan serta sumberdaya laut secara berkelanjutan untuk pembangunan berkelanjutan.
- 15) Melindungi, memperbaiki serta mendorong penggunaan ekosistem daratan yang berkelanjutan, mengelola hutan secara berkelanjutan, memerangi penggurunan, menghentikan dan memulihkan degradasi tanah, serta menghentikan kerugian keanekaragaman hayati.
- 16) Mendorong masyarakat yang damai dan inklusif untuk pembangunan berkelanjutan, menyediakan akses yang sama bagi semua orang, serta membangun lembaga yang efektif, akuntabel, dan inklusif di seluruh tingkatan.
- 17) Memperkuat cara-cara implementasi dan merevitalisasi kemitraan global untuk pembangunan berkelanjutan.

Dalam implementasi TPB, Indonesia mengembangkan indikator TPB sebanyak 319 indikator dan 169 target untuk pencapaian 17 tujuan TPB. Upaya pencapaian 319 indikator tersebut dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota sesuai dengan pembagian wewenang yang diatur dalam

UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Dari 319 indikator TPB, Pemerintah Pusat memiliki wewenang sebanyak 303 indikator. Adapun pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, dan pemerintah kota memiliki wewenang pencapaian indikator TPB masing-masing sebanyak 235, 220, dan 222 indikator.

Di Kabupaten Tegal terdapat 222 indikator yang tersebar dalam 16 tujuan TPB. Adapun Tujuan 14 “Konservasi dan pemanfaatan sumber daya laut, samudera dan maritim” bukan merupakan kewenangan kabupaten. Sebanyak 207 indikator TPB yang menjadi wewenang dan relevan di Pemerintah Kabupaten Tegal telah melaksanakan indikator TPB sebanyak 44 indikator dalam RPJMD, sebanyak 27 indikator (12%) di antaranya sudah mencapai target nasional yang ditetapkan dalam Perpres No. 59 Tahun 2017, sisanya yaitu 17 indikator (8%) belum mencapai target nasional yang ditetapkan. Sebanyak 127 indikator (58%) belum menjadi indikator dalam RPJMD, namun 68 indikator diantaranya (31%) telah tercapai sesuai target nasional. Sisanya 51 indikator (23%) tidak terdapat data dengan rincian 15 indikator tidak sesuai karakteristik Kabupaten Tegal dan sisanya 36 data tidak tersedia.

Berikut proporsi capaiannya seperti dalam tabel dan gambar di bawah.

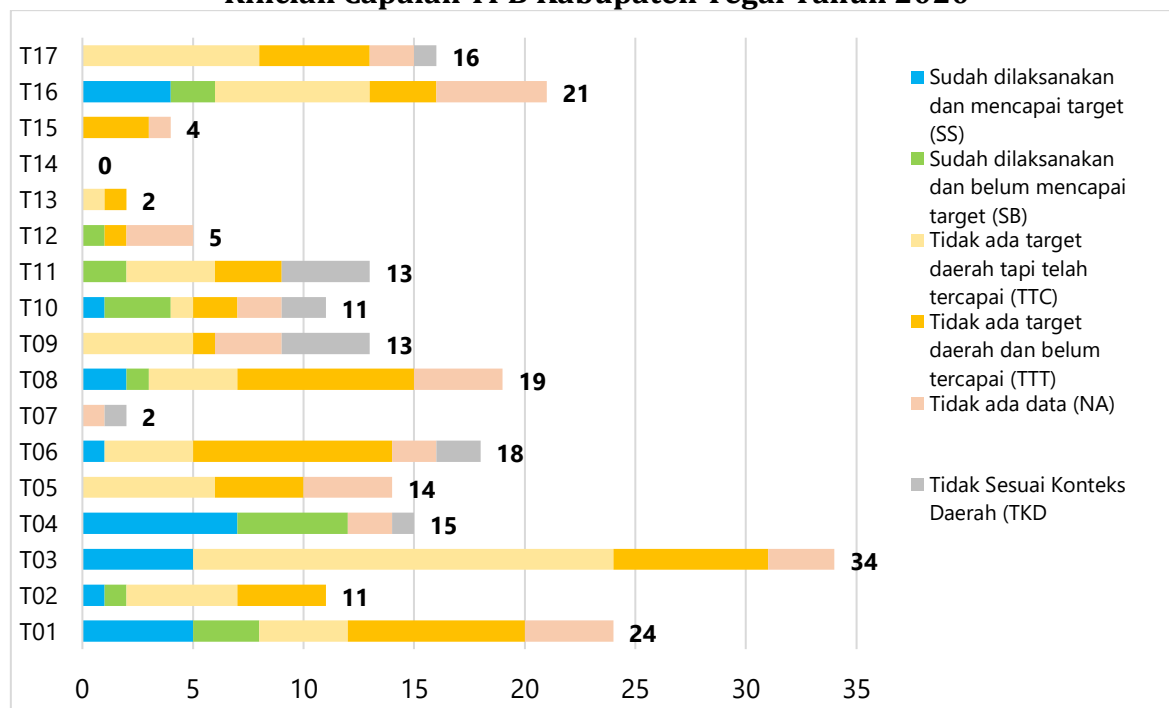
**Tabel 4. 6**  
**Capaian TPB Kabupaten Tegal Terhadap Target Nasional**

| No  | TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN                                                                                                                         | INDIKATOR | SS | SB | TTC | TTT | NA | TKD |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----|----|-----|-----|----|-----|
| T01 | Mengakhiri segala bentuk kemiskinan di mana pun                                                                                                          | 24        | 5  | 3  | 4   | 8   | 4  | 0   |
| T02 | Menghilangkan kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan gizi yang baik, serta meningkatkan pertanian berkelanjutan                                        | 11        | 1  | 1  | 5   | 4   | 0  | 0   |
| T03 | Menjamin kehidupan yang sehat dan meningkatkan kesejahteraan seluruh penduduk semua usia                                                                 | 34        | 5  | 0  | 19  | 7   | 3  | 0   |
| T04 | Menjamin kualitas pendidikan yang inklusif dan merata serta meningkatkan kesempatan belajar sepanjang hayat untuk semua                                  | 15        | 7  | 5  | 0   | 0   | 2  | 1   |
| T05 | Mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan kaum perempuan                                                                                              | 14        | 0  | 0  | 6   | 4   | 4  | 0   |
| T06 | Menjamin ketersediaan serta pengelolaan air bersih dan sanitasi yang berkelanjutan untuk semua                                                           | 18        | 1  | 0  | 4   | 9   | 2  | 2   |
| T07 | Menjamin akses energi yang terjangkau, andal, berkelanjutan, dan modern untuk semua                                                                      | 2         | 0  | 0  | 0   | 0   | 1  | 1   |
| T08 | Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, kesempatan kerja yang produktif dan menyeluruh, serta pekerjaan yang layak untuk semua | 19        | 3  | 0  | 4   | 8   | 4  | 0   |
| T09 | Membangun infrastruktur yang Tangguh, meningkatkan industri inklusif dan berkelanjutan serta mendorong inovasi                                           | 13        | 0  | 0  | 5   | 1   | 3  | 4   |
| T10 | Mengurangi kesenjangan intra dan antarnegara                                                                                                             | 11        | 1  | 3  | 1   | 2   | 2  | 2   |
| T11 | Menjadikan kota dan permukiman inklusif, aman, Tangguh, dan berkelanjutan                                                                                | 13        | 0  | 2  | 4   | 3   | 0  | 4   |

| No  | TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN                                                                                                                                                                                                 | INDIKATOR  | SS         | SB        | TTC        | TTT        | NA         | TKD       |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|-----------|------------|------------|------------|-----------|
| T12 | Menjamin pola produksi dan konsumsi yang berkelanjutan                                                                                                                                                                           | 5          | 0          | 1         | 0          | 1          | 3          | 0         |
| T13 | Mengambil tindakan cepat untuk mengatasi perubahan iklim dan dampaknya                                                                                                                                                           | 2          | 0          | 0         | 1          | 1          | 0          | 0         |
| T14 | Melestarikan dan memanfaatkan secara berkelanjutan sumber daya kelautan dan samudera untuk pembangunan berkelanjutan                                                                                                             | 0          | 0          | 0         | 0          | 0          | 0          | 0         |
| T15 | Melindungi, merestorasi, dan meningkatkan pemanfaatan berkelanjutan ekosistem daratan, mengelola hutan secara lestari, menghentikan penggurunan, memulihkan degradasi lahan, serta menghentikan kehilangan keanekaragaman hayati | 4          | 0          | 0         | 0          | 3          | 1          | 0         |
| T16 | Menguatkan masyarakat yang inklusif dan damai untuk pembangunan berkelanjutan, menyediakan akses keadilan untuk semua, dan membangun kelembagaan yang efektif, akuntabel, dan inklusif di semua tingkatan                        | 21         | 4          | 2         | 7          | 3          | 5          | 0         |
| T17 | Menguatkan sarana pelaksanaan dan merevitalisasi kemitraan global untuk pembangunan berkelanjutan                                                                                                                                | 16         | 0          | 0         | 8          | 5          | 2          | 1         |
|     | <b>JUMLAH</b>                                                                                                                                                                                                                    | <b>222</b> | <b>27</b>  | <b>17</b> | <b>68</b>  | <b>59</b>  | <b>36</b>  | <b>15</b> |
|     |                                                                                                                                                                                                                                  |            | <b>12%</b> | <b>8%</b> | <b>31%</b> | <b>27%</b> | <b>16%</b> | <b>7%</b> |

Sumber: KLHS Perubahan RPJMD Kabupaten Tegal 2019-2024, 2021

**Gambar 4. 6**  
**Rincian Capaian TPB Kabupaten Tegal Tahun 2020**



Sumber: KLHS Perubahan RPJMD Kabupaten Tegal 2019-2024, 2021

Beberapa catatan berkaitan dengan progress pencapaian target TPB di Kabupaten Tegal yang perlu mendapat perhatian utama adalah target-target TPB yang memiliki indikator SB, TTT, dan NA yang menunjukkan banyaknya indikator TPB yang belum dilaksanakan dan sudah dilaksanakan namun belum mencapai target nasional, serta perlu adanya penyusunan data sebagai baseline penentuan target TPB. Target TPB yang semua indikatornya sudah mencapai target nasional (SS) juga perlu terus dijalankan untuk mempertahankan capaian indikator tersebut.

Berdasarkan distribusi skenario pencapaian TPB Kabupaten Tegal tahun 2024 tanpa upaya tambahan menunjukkan bahwa sebanyak 104 indikator atau 50,2 % akan tercapai pada tahun 2024 sesuai dengan laju perubahan pada tahun 2018 – 2020. Indikator 3 yaitu menjamin kehidupan yang sehat dan meningkatkan kesejahteraan seluruh penduduk semua usia merupakan tujuan dengan kontribusi pencapaian indikator terbanyak yaitu 24 indikator dari total 34 indikator. Sedangkan rata-rata indikator pilar lingkungan yaitu tujuan 12, tujuan 13, tujuan 15, memiliki indikator capaian yang relatif kecil. Dengan melihat capaian tanpa upaya tambahan di atas maka secara umum pilar sosial serta pilar hukum dan tata kelola memiliki kinerja yang relatif baik dibandingkan dengan pilar lingkungan dan pilar ekonomi.

Secara keseluruhan berdasarkan telaah terhadap permasalahan dari capaian TPB yang membutuhkan upaya tambahan serta pendataan indikator yang belum terdapat data, maka dihasilkan 8 isu strategis pembangunan berkelanjutan di Kabupaten Tegal berdasarkan kelompok pilar yaitu:

1. **Pilar Sosial** : (1) Penekanan laju kemiskinan dan pengangguran; (2) Kualitas dan daya saing sumber daya manusia; (3) Kualitas derajat kesehatan masyarakat; (4) Kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan;
2. **Pilar Ekonomi** : (5) Daya saing ekonomi dan peningkatan kesempatan berusaha;
3. **Pilar Lingkungan** : (6) Keberlanjutan pembangunan dengan daya dukung lingkungan dan SDA;
4. **Pilar Hukum dan Tata Kelola** : (7) Tata kelola pemerintah yang baik; (8) Keamanan dan ketertiban wilayah.

#### **b. MEA (Masyarakat Ekonomi ASEAN)**

Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) atau *ASEAN Economic Community (AEC)* merupakan agenda pembangunan ekonomi yang dikeluarkan oleh ASEAN sebagai salah satu bentuk kerjasama negara-negara anggota ASEAN. Untuk itu telah dibuat komitmen bersama, yaitu Masyarakat ASEAN 2025 yang telah resmi disahkan oleh Kepala Negara/Pemerintahan anggota ASEAN pada Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ASEAN ke-27 di Kuala Lumpur, Malaysia melalui penandatanganan *The 2015 Kuala Lumpur Declaration on the Establishment of ASEAN Community* dan *The Kuala Lumpur Declaration on ASEAN 2025: Forging Ahead Together* yang akan menjadi panduan ASEAN dalam meningkatkan kualitas integrasi ekonomi ASEAN dalam 10 tahun ke depan. Masyarakat ASEAN 2025 meliputi ASEAN Economic Community (AEC) atau dikenal sebagai Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA), ASEAN Political-Security Community (APSC), dan ASEAN Socio-Culture Community (ASCC). Terdapat lima pilar

dalam cetak-biru MEA 2025, yaitu: a) Ekonomi ASEAN yang terintegrasi dan kohesif; b) ASEAN yang kompetitif dan dinamis; c) Peningkatan konektivitas dan kerja sama sektoral; d) ASEAN yang tangguh, inklusif, dan berorientasi serta fokus ke masyarakat; serta e) ASEAN Global.

Memasuki akhir era MEA 2025, tentu menuntut kesiapan dari pemerintah Indonesia dan secara khusus Kabupaten Tegal baik sebagai pasar ataupun sebagai tempat produksi. Diharapkan daerah-daerah di Indonesia dapat berperan aktif dan mampu membaca peluang untuk tidak saja menjadi konsumen namun juga sekaligus sebagai produsen sehingga terbuka peluang bagi pembukaan lapangan pekerjaan atau usaha baru yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

#### **c. Resesi Ekonomi / Krisis Ekonomi Global**

Banyak negara (bahkan negara maju) tengah menghadapi ancaman resesi ekonomi bahkan sudah ada yang telah masuk kedalam jurang resesi ekonomi imbas pandemi Covid-19. Sebut saja Singapura, Australia, Jepang, Argentina, Turki, Venezuela, Brazil dan lainnya. Beberapa negara di Asia seperti China, Singapura, India, Thailand dan Malaysia juga mengalami perlambatan pertumbuhan ekonomi yang signifikan karena efek negatif dari *trade war*, Brexit, geopolitik seperti demo di Hong-Kong dan tensi AS - Korea Utara masih panas. Kondisi tersebut kemudian diperparah oleh pandemi Covid-19. Sebagai contoh aktivitas ekonomi di negara-negara maju diperkirakan menyusut 7 persen pada tahun 2020 karena permintaan dan penawaran domestik, perdagangan, dan keuangan yang sangat terganggu. Begitu juga dengan ekonomi negara-negara *Emerging Market and Developing Economies* (EMDE) diperkirakan akan menyusut 2,5 persen tahun ini. Ini menjadi kontraksi pertama dalam setidaknya enam puluh tahun. Pendapatan per kapita diperkirakan turun 3,6 persen, yang akan membuat jutaan orang jatuh miskin tahun ini.

Secara umum memang pertumbuhan ekonomi dunia dalam beberapa tahun belakangan sudah dalam kategori kurang cemerlang bahkan menunjukkan perlambatan atau sudah lampu kuning menuju resesi global. IMF menamai krisis saat ini sebagai "*Great Lockdown*" yang belum pernah terjadi sebelumnya. Untuk itu perlambatan ekonomi global ini harus diantisipasi lebih dini. Agar perekonomian tak terus memburuk dan benar-benar menuju resesi.

#### **d. Perubahan iklim global (Global Warming/Climate Change)**

*Global warming* merupakan efek atau dampak dari rusaknya kelestarian ekosistem alam akibat dari pembangunan yang tidak memerhatikan kelestarian lingkungan. *Global warming* dapat mengakibatkan kekeringan, kelangkaan bahan pangan, banjir dan bahkan mampu menjadi penyebab utama terjadinya berbagai bencana alam, bahkan kepunahan masal spesies yang hidup di bumi termasuk manusia jadi pertaruhanannya,

Secara global, untuk mencegah pemanasan global menjadi semakin parah, berbagai negara di dunia ini membuat kesepakatan bersama salah satunya adalah Paris Agreement atau Perjanjian Paris 2015. Perjanjian Paris merupakan bentuk kesepakatan yang mengikat 188 negara dengan tujuan utama untuk mengurangi emisi karbon. Perjanjian Paris melahirkan empat kesepakatan utama yang mengikat 188 negara termasuk AS seperti berikut:

- Menjaga temperatur tetap berada < 2C di atas era pre-Industri
- Membatasi emisi gas rumah kaca akibat aktivitas antropogenik pada batas yang masih dapat diserap oleh tumbuhan, tanah dan laut dalam keadaan normal
- Melakukan peninjauan terhadap kontribusi masing-masing negara dalam menurunkan emisi setiap lima tahun sekali
- Mendorong negara-negara maju untuk menyediakan suplai keuangan bagi negara berkembang untuk beralih ke energi terbarukan

Namun ditengah efektifitas perjanjian paris ini masih dipertanyakan, justru negara besar adi kuasa AS menarik diri dari perjanjian tersebut. Mundurnya Amerika Serikat tentu saja akan membuat semakin sulit bagi dunia untuk mencapai tujuan yang ditentukan oleh kesepakatan Paris. Padahal Amerika Serikat menyumbang sekitar 15-16% emisi karbon global dan merupakan negara penyumbang emisi gas rumah kaca terbesar kedua di dunia setelah China. Disisi lain AS mempunyai peran yang penting dalam hal sumber keuangan dan teknologi bagi negara-negara berkembang dalam upaya mengatasi peningkatan temperatur.

Melihat dampaknya yang besar bagi manusia dan lingkungan maka perlu adanya antisipasi dari pemerintah dan masyarakat dunia dalam menyikapi isu *global warming*. Salah satunya melalui perencanaan pembangunan yang harus ramah lingkungan (pembangunan berkelanjutan). Hal ini dilakukan agar kelestarian alam dapat terjaga dan efek *global warming* dapat diminimalisir bersamaan dengan tetap terlaksananya pertumbuhan ekonomi yang lebih baik.

#### **e. Kemajuan Teknologi Informasi, Komunikasi dan Revolusi Industri**

Pada era globalisasi sekarang ini, kemajuan teknologi informasi dan komunikasi sangat pesat dan semakin mudah dijangkau oleh seluruh lapisan masyarakat. *Delay* konektifitas jaringan komunikasi saat ini telah mendekati *real time* diberbagai aspek. Apalagi perkembangan teknologi jaringan komunikasi saat ini sudah melampaui 5G dinegara-negara maju. Dengan perkembangan yang sangat pesat ini, telah mengubah wajah perekonomian, khususnya di sektor industri dan perdagangan.

Salah satu fase penting dalam perkembangan teknologi adalah munculnya revolusi industri gelombang ke-4, atau yang lebih dikenal dengan sebutan *Industrial Revolution 4.0* yang merupakan salah satu pelaksanaan proyek Strategi Teknologi Modern Jerman 2020 (*Germany's High-Tech Strategy 2020*). Strategi tersebut diimplementasikan melalui peningkatan teknologi sektor manufaktur, penciptaan kerangka kebijakan strategis yang konsisten, serta penetapan prioritas tertentu dalam menghadapi kompetisi global

Dalam salah satu studinya, *the World Economic Forum* (WEF) menyatakan bahwa revolusi industri 4.0 ditandai oleh pembauran (*fusion*) teknologi yang mampu menghapus batas-batas penggerak aktivitas ekonomi, baik dari perspektif fisik, digital, maupun biologi. Dengan bahasa yang lebih sederhana bisa dikatakan bahwa pembauran teknologi mampu mengintegrasikan faktor sumber daya manusia, instrumen produksi, serta metode operasional, dalam mencapai tujuan.

Karakteristik revolusi industri 4.0 ditandai dengan berbagai teknologi terapan (*applied technology*), seperti *advanced robotics*, *artificial intelligence*, *internet of things*, *virtual and augmented reality*, *additive manufacturing*, serta *distributed manufacturing* yang

secara keseluruhan mampu mengubah pola produksi dan model bisnis di berbagai sektor industri.

Melalui penerapan teknologi modern, sektor industri tidak lagi semata-mata berfokus pada pengembangan usaha dan peningkatan laba, melainkan juga pada pendayagunaan dan optimalisasi setiap aktivitas, mulai dari pengadaan modal, proses produksi, hingga layanan kepada konsumen (*World Economic Forum*).

Selain membawa dampak positif, revolusi industri 4.0 juga memunculkan berbagai tantangan yang mesti dijawab. *The United Nations Industrial Development Organization* (UNIDO) menekankan agar kehadiran industri 4.0 bisa meningkatkan perekonomian negara-negara miskin dan berkembang, sekaligus mendorong terwujudnya agenda-agenda pembangunan seperti yang tertuang dalam the *Sustainable Development Goals* (SDGs). Namun demikian UNIDO juga mengkhawatirkan terjadinya gap yang semakin besar diantara negara-negara maju yang mampu mengaplikasikan teknologi modern, dengan negaranegara miskin dan berkembang yang tertinggal dalam pengembangan teknologi. Dengan segala sumberdaya yang ada dimiliki, Indonesia seharusnya mampu mengikuti setiap perkembangan globalisasi yang ada sehingga diharapkan Indonesia mempunyai peluang dalam memanfaatkan atau membuat produk yang unggul dalam pengembangan teknologi informasi, dan komunikasi. Ke depannya nanti, diharapkan Indonesia tidak hanya sebagai pemakai (*user*) tetapi mampu menjadi pembuat (*produsen*) sehingga Indonesia mampu bersaing secara sehat di kancah internasional. Jika hal tersebut terealisasi maka Indonesia akan mampu menjadi Negara yang tidak hanya mengandalkan teknologi dari luar negeri, namun mampu mengekspor segala bentuk teknologi informasi dan komunikasi sesuai dengan spesifikasi dan berdaya saing internasional. Masalah yang tidak kalah penting adalah dampak penerapan teknologi terhadap peran tenaga kerja serta pemerataan kesejahteraan.

#### **f. Transportasi Berkelanjutan**

Sistem transportasi yang berkelanjutan sebagai suatu sistem yang menyediakan akses terhadap kebutuhan dasar individu atau masyarakat secara aman dan dalam cara yang tetap konsisten dengan kesehatan manusia dan ekosistem, dengan keadilan masyarakat saat ini dan masa datang. Terjangkau secara finansial beroperasi secara efisien, menyediakan alternatif pilihan moda dan mendukung laju perkembangan ekonomi. Membatasi emisi dan buangan sesuai dengan kemampuan absorpsi alam, meminimumkan penggunaan energi dari sumber yang tak terbarukan, menggunakan komponen yang terdaur ulang, dan meminimumkan penggunaan lahan serta memproduksi polusi suara yang sekecil mungkin.

Terdapat beberapa isu global dalam usaha menuju terciptanya sistem transportasi berkelanjutan, adalah sebagai berikut:

- 1) Keadilan sosial (*social equity*); meliputi masalah transportasi bagi si miskin, pengurusan, wanita dan transpor, mobilitas anak-anak, dan penyandang cacat.
- 2) Keberlanjutan dari aspek lingkungan; meliputi kehilangan ruang hijau dan habitat, polusi air, permintaan bahan bakar minyak, polusi udara, kebisingan, pemanasan global, dan sampah kendaraan.
- 3) Kesehatan dan keselamatan; meliputi kematian akibat lalulintas, polusi udara dan kesehatan, bahaya gaya hidup pasif (tidak aktif), dan bahaya di jalan.

- 4) Kualitas hidup dan komunitas; meliputi pemisahan (*severance*) komunitas, invasi ruang, kerusakan peninggalan bersejarah, dan kejahatan.
- 5) Ekonomi dan biaya murah.

#### 4.2.2 Isu Strategis Nasional

Isu-isu strategis nasional merupakan isu-isu yang memiliki potensi untuk menghambat pembangunan nasional sehingga perlu adanya antisipasi khusus dalam menghadapinya. Masih adanya isu-isu strategis nasional yang belum terselesaikan menjadi catatan tersendiri bagi pemerintah untuk berusaha lebih keras dalam menyelesaikannya. Namun yang menjadi persoalan adalah ketika isu strategis nasional belum terselesaikan dan muncul isu strategis baru yang tentu saja perlu adanya *treatment* khusus dalam mengantisipasinya.

Beberapa isu/kebijakan nasional yang menjadi pertimbangan perumusan isu-isu strategis di Kabupaten Tegal antara lain: Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024; Pandemi Covid-19, dan industri 4.0.

##### 1. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 merupakan tahapan terakhir dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025 sehingga menjadi tahapan pembangunan pamungkas dalam upaya mewujudkan visi dan misi pembangunan jangka panjang nasional. Dalam merumuskan dan merealisasikan berbagai komitmen Presiden dan Wakil Presiden, serta berdasarkan kajian maupun analisis mengenai permasalahan dan isu strategis nasional yang menjadi prioritas untuk ditangani dalam lima tahun ke depan, termasuk dalam penyelarasan dengan sasaran-sasaran pokok pembangunan jangka panjang dalam RPJPN maka untuk memajukan Negara Indonesia ke depan ditetapkan visi RPJMN Tahun 2020-2024 sebagai berikut:

##### **“Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”**

Upaya untuk mewujudkan Visi tersebut ditempuh melalui 9 (sembilan) misi sebagai berikut:

1. Peningkatan kualitas manusia Indonesia
2. Struktur ekonomi yang produktif, mandiri, dan berdaya saing
3. Pembangunan yang merata dan berkeadilan
4. Mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan
5. Kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa
6. Penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya
7. Perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga
8. Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya
9. Sinergi pemerintah daerah dalam kerangka Negara kesatuan

Dalam mewujudkan visi dan misi tersebut, Presiden Ir. Joko Widodo memberikan **lima arahan** yang cukup jelas dan implementatif dalam pelaksanaan pembangunan lima tahun yang akan datang. Kelima arahan tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut:

### **1) Pembangunan SDM**

Membangun SDM pekerja keras yang dinamis, produktif, terampil, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi didukung dengan kerjasama industri dan talenta global.

### **2) Pembangunan Infrastruktur**

Melanjutkan pembangunan infrastruktur untuk menghubungkan kawasan produksi dengan kawasan distribusi, mempermudah akses ke kawasan wisata, mendongkrak lapangan kerja baru, dan mempercepat peningkatan nilai tambah perekonomian rakyat

### **3) Penyederhanaan Regulasi**

Menyederhanakan segala bentuk regulasi dengan pendekatan Omnibus Law, terutama menerbitkan 2 undang-undang. Pertama, UU Cipta Lapangan Kerja. Kedua, UU Pemberdayaan UMKM

### **4) Penyederhanaan Birokrasi**

Memprioritaskan investasi untuk penciptaan lapangan kerja, memangkas prosedur dan birokrasi yang panjang, dan menyederhanakan eselonisasi

### **5) Transformasi Ekonomi**

Melakukan transformasi ekonomi dari ketergantungan SDA menjadi daya saing manufaktur dan jasa modern yang mempunyai nilai tambah tinggi bagi kemakmuran bangsa demi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia

Kemudian, kelima arahan tersebut diimplementasikan dalam **7 (tujuh) agenda pembangunan**, yakni:

#### **1) Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan**

Pembangunan ekonomi akan dipacu untuk tumbuh lebih tinggi, inklusif dan berdaya saing melalui:

- Pengelolaan sumber daya ekonomi yang mencakup pemenuhan pangan dan pertanian serta pengelolaan kemaritiman, kelautan dan perikanan, sumber daya air, sumber daya energi, serta kehutanan; dan
- Akselerasi peningkatan nilai tambah pertanian dan perikanan, kemaritiman, energi, industri, pariwisata, serta ekonomi kreatif dan digital

#### **2) Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan**

Pengembangan wilayah yang mampu menciptakan berkelanjutan dan inklusif melalui:

- Pengembangan sektor/komoditas/kegiatan unggulan daerah;
- Penyebaran pusat-pusat pertumbuhan ke wilayah yang belum berkembang;
- Penguatan kemampuan SDM dan IPTEK berbasis keunggulan wilayah;
- Peningkatan infrastruktur dan pelayanan dasar secara merata; dan
- Peningkatan daya dukung lingkungan serta ketahanan bencana dan perubahan iklim.

### **3) Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing**

Peningkatan kualitas dan daya saing SDM yaitu manusia yang sehat dan cerdas, adaptif, inovatif, terampil, dan berkarakter, melalui:

- Pengendalian penduduk dan penguatan tata kelola kependudukan;
- Penguatan pelaksanaan perlindungan sosial;
- Peningkatan pelayanan kesehatan menuju cakupan kesehatan semesta;
- Peningkatan pemerataan layanan pendidikan berkualitas;
- Peningkatan kualitas anak, perempuan, dan pemuda;
- Pengentasan kemiskinan; dan
- Peningkatan produktivitas dan daya saing.

### **4) Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan**

Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan dilaksanakan secara terpadu melalui:

- Revolusi mental dan pembinaan ideology Pancasila;
- Pemajuan dan pelestarian kebudayaan;
- Moderasi beragama; dan
- Penguatan budaya literasi, inovasi, dan kreativitas.

### **5) Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar**

Penguatan infrastruktur tersebut dilakukan melalui:

- Pembangunan infrastruktur pelayanan dasar;
- Pembangunan konektivitas multimoda untuk mendukung pertumbuhan ekonomi;
- Pembangunan infrastruktur perkotaan;
- Pembangunan energi dan ketenagalistrikan; dan
- Pembangunan dan pemanfaatan infrastruktur TIK untuk transformasi digital

### **6) Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim**

Pembangunan lingkungan hidup, serta peningkatan ketahanan bencana dan perubahan iklim diarahkan melalui:

- Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup;
- Peningkatan Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim; dan
- Pembangunan Rendah Karbon.

### **7) Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik**

Penguatan stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik dilakukan melalui:

- Reformasi kelembagaan birokrasi untuk pelayanan publik berkualitas;
- Penataan kapasitas lembaga demokrasi, penguatan kesetaraan dan kebebasan;
- Perbaikan system peradilan, penataan regulasi dan tata kelola keamanan siber;

- Peningkatan akses terhadap keadilan dan sistem anti korupsi;
- Peningkatan pelayanan dan perlindungan WNI di luar negeri; dan
- Peningkatan rasa aman, penguatan kemampuan pertahanan dan Industri Pertahanan.

## **2. Pandemi Covid-19 Dalam Perspektif Nasional**

Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) menetapkan Covid-19 sebagai pandemi sehingga perlu adanya perhatian khusus untuk menghadapi fenomena ini. Pandemi ditandai dengan penyakit baru yang belum dikenali dan menjangkiti banyak negara dalam waktu yang bersamaan, tak terkecuali Indonesia. Selain itu, penyebaran Covid-19 ini telah berdampak pada meningkatnya jumlah korban jiwa maupun kerugian harta benda. Meluasnya cakupan wilayah yang sudah menjangkiti ke seluruh provinsi telah menimbulkan implikasi pada aspek sosial ekonomi yang luas di Indonesia. Oleh karena itu, pemerintah pusat menetapkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non-alam Penyebaran Covid-19 sebagai Bencana Nasional. Adapun beberapa kebijakan pemerintah pusat (peraturan perundang-undangan) dapat dirangkum sebagai berikut:

- 1) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Republik Indonesia (Perppu) Nomor 1 tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Covid-19 dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perenomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan.
- 2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Covid-19.
- 3) Keputusan Presiden RI Nomor 9 tahun 2020 tentang Perubahan Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19.
- 4) Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Covid-19.
- 5) Instruksi Presiden Nomor 4 tahun 2020 tentang Refocusing Kegiatan, Realokasi Anggaran, Serta Pengadaan Barang dan Jasa Dalam Rangka Percepatan Penanganan Covid-19.
- 6) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Covid-19 Di Lingkungan Pemerintah Daerah.
- 7) Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 19/PMK.07/2020 tentang Penyaluran dan Penggunaan Dana Alokasi Umum dan Dana Insentif Daerah Tahun Anggaran 2020 Dalam Rangka Penanggulangan Covid-19.
- 8) Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 23/PMK.03/2020 tentang Insentif Pajak Untuk Wajib Pajak Terdampak Wabah Virus Corona.
- 9) Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Dalam Rangka Percepatan Penanganan Covid-19.
- 10) Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 6/KM.7/2020 tentang Penyaluran Dana Alokasi Khusus Fisik Bidang Kesehatan Dalam Rangka Pencegahan dan/atau Penanganan Covid-19.

- 11) Instruksi Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2020 tentang Pencegahan Penyebaran dan Percepatan Penanganan Covid-19 Di Lingkungan Pemerintah Daerah.
- 12) Surat Edaran Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Nomor 3 tahun 2020 tentang Penjelasan Pelaksanaan Barang/Jasa Dalam Rangka Penanganan Covid-19.
- 13) Surat Edaran Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Nomor 5 tahun 2020 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pembuktian Kualifikasi/Klarifikasi dan Negosiasi pada Pemilihan Penyedia Dalam Masa Wabah Covid-19.
- 14) Surat Edaran Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan (BPKP) Nomor SE-6/KD2/2020 tentang Tata Cara Reviu Oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah ttas Pengadaan Barang/Jasa Dalam Rangka Percepatan Penanganan Covid-19.
- 15) Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 440/2622/SJ tentang Pembentukan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Daerah.
- 16) Surat Edaran Kementerian Keuangan RI Nomor S-247/MK.07/2020 tentang Penghentian Proses Pengadaan Barang/Jasa Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Tahun Anggaran 2020 (Selain Bidang Kesehatan Dan Bidang Pendidikan).
- 17) Surat Edaran Kementerian Dalam Negeri RI Nomor 905/2622/SJ tentang Penghentian Proses Pengadaan Barang/Jasa Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Tahun Anggaran 2020 (Selain Bidang Kesehatan Dan Bidang Pendidikan).
- 18) Surat Edaran Komisi Pemberantasan Korupsi No 8 Tahun 2020 tentang Penggunaan Anggaran Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Dalam Rangka Percepatan Penanganan Covid-19 Terkait Dengan Pencegahan Tindak Pidana Korupsi.

Dalam perspektif Pembangunan, adanya pandemi ini memiliki dampak yang sangat signifikan pada pelaksanaan pembangunan nasional, khususnya pada awal perencanaan pembangunan jangka menengah nasional 2020-2024. Berbagai sektor terkena “tekanan” efek penyebaran Covid-19. Hal ini terbukti dengan laporan terbaru Badan Pusat Statistik (BPS) yang mencatat pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal ke II tahun 2020, minus 5,32 persen. Dengan catatan ini artinya pertumbuhan ekonomi Indonesia terus turun sejak 2018 silam. Sementara di kuartal I 2020, pertumbuhan ekonomi sudah tersungkur di angka 2,97 persen. Terakhir rilis BPS menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2020 mengalami kontraksi -2,07 persen.

Secara umum, beberapa kebijakan umum yang sangat berpengaruh pada fluktuasi perekonomian adalah adanya kebijakan *Work from Home*, *Physical Distancing*, maupun PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar). Beberapa kebijakan tersebut berpengaruh pada kinerja beberapa sektor ekonomi yang menurun bahkan memiliki capaian negative, seperti sektor transportasi, pariwisata, akomodasi, perdagangan hingga jasa. Dari 17 sektor lapangan usaha yang menopang perekonomian, hanya sektor pertanian yang masih bisa tumbuh, lainnya mengalami kontraksi. Kontraksi terdalam terjadi pada sektor transportasi dan pergudangan mencapai -15,04% sebagai dampak pembatasan sosial.

Kondisi perekonomian yang seperti ini bisa menyebabkan terjadinya resesi ekonomi level mikro hingga makro yang efeknya bersifat domino pada seluruh kegiatan ekonomi. Sebagai contoh, ketika investasi anjlok saat resesi, sejumlah lapangan pekerjaan secara otomatis akan berkurang bahkan hilang. Pemutusan hubungan kerja (PHK) pun naik signifikan. Produksi atas barang dan jasa juga merosot sehingga menurunkan PDB nasional. Jika tak segera diatasi, efek domino resesi akan menyebar ke berbagai sektor. Sebut saja, mulai dari macetnya kredit perbankan hingga lonjakan inflasi yang sulit dikendalikan atau sebaliknya deflasi yang tajam karena perekonomian tak bergerak. Kemudian, neraca perdagangan bakal minus dan berimbas langsung pada cadangan devisa. Dalam skala riilnya, banyak orang bisa kehilangan rumah karena tak sanggup membayar cicilan, bersamaan pula terjadi pelemahan daya beli, lalu banyak bisnis terpaksa gulung tikar. Adapun dampak sosial yang akan menjadi muaranya adalah meningkatnya angka kemiskinan, tingkat pengangguran, morbiditas, tingkat kematian, modal sosial, hingga kriminalitas. Untuk mengatasi masalah ekonomi agar tidak bertambah parah, pemerintah perlu melakukan terobosan untuk pemulihan ekonomi dan mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang tinggi, berkualitas dan berkelanjutan. Pemerintah perlu melihat urgensinya, harus ada langkah terobosan dan bahkan jika diperlukan bisa memformat ulang berbagai kebijakan ekonomi jangka pendek hingga jangka panjangnya.

### **3. Industri 4.0**

Mulai tahun 2020 saat ini dunia industri mulai memasuki tahapan yang disebut era Industri 4.0. “Industrie 4.0” dicetuskan oleh pemerintah Jerman pada tahun 2011 yang lalu. Industri 4.0 adalah tren automasi industri dan pertukaran data dalam teknologi manufaktur yang mana didalamnya termasuk teknologi *cloud computing*, *cyber-physical system* dan *Internet of Things (IoT)*. Istilah “smart factory” akan menjadi hal yang lumrah kita dengar di era Industri 4.0 sebagaimana saat ini kita mendengar istilah *smartphone*, *smartcard* dan istilah-istilah lain yang ditambahkan prefiks *smart*.

Sebagian orang membandingkan Industri 4.0 dengan Revolusi Industri Generasi Keempat (*Fourth Industrial Revolution*). Revolusi Industri Generasi Keempat sendiri merupakan transformasi sistemik yang lebih luas cakupannya daripada Industri 4.0, yang mana didalamnya mencakup dampak terhadap masyarakat, struktur pemerintahan dan peranan manusia itu sendiri dalam struktur ekonomi dan manufaktur. Jadi, bisa disimpulkan Industri 4.0 adalah subset dari Revolusi Industri Generasi Keempat. Beberapa poin penting terkait perkembangan industri 4.0, yakni:

- a. industri 4.0 diharapkan memberi manfaat untuk kepentingan manusia, lingkungan, dan kesejahteraan bersama.
- b. industri 4.0 diharapkan mampu mendorong pengembangan kapasitas manusia, sehingga menjadi semakin terdidik dan terampil.
- c. akses terhadap teknologi diharapkan terjangkau dengan mudah, sehingga bisa diterapkan di semua negara.
- d. kemajuan teknologi diharapkan mampu menghasilkan keterbukaan informasi.
- e. kemajuan teknologi diharapkan bisa menggeser paradigma lama, dari persaingan (*competition*) menjadi koneksi (*connection*) dan kerjasama (*collaboration*).
- f. penerapan teknologi diharapkan mampu menjawab tantangan perubahan iklim dan upaya pelestarian lingkungan.

Sementara upaya-upaya yang harus dilakukan untuk menjawab tantangan di era revolusi industri 4.0, antara lain:

- a. Mengidentifikasi area strategis dalam rangka meningkatkan kecepatan, fleksibilitas, produktivitas, dan kualitas output.
- b. menganalisa dampak pemanfaatan teknologi dalam jangka panjang, terutama terhadap serapan tenaga kerja dan lingkungan hidup.
- c. mempersiapkan infrastruktur, serta program pendidikan dan keterampilan, sehingga mampu meningkatkan kapasitas sumberdaya manusia dalam penguasaan teknologi.

Dirangkum dari *World Economic Forum* (WEF), pada tahun 2020 di mana era Revolusi Industri Generasi Keempat dimulai ada **sepuluh soft skill** yang harus dimiliki untuk menjawab tantangan dunia industri. Soft skill tersebut adalah menyelesaikan permasalahan yang kompleks/sulit (*Complex Problem Solving*), berpikir kritis (*Critical Thinking*), kreatifitas (*Creativity*), manajemen SDM (*Human Resources Management*), koordinasi (*Coordinating*), kecerdasan emosional (*Emotional Intelligence*), pengambilan keputusan (*Judgment and Decision Making*), orientasi pada layanan (*Service Orientation*), negosiasi (*Negotiation*) dan kelenturan berpikir (*Cognitive Flexibility*).

Dalam menyikapi tantangan dan persaingan industry 4.0 seluruh masyarakat Indonesia khususnya masyarakat Kabupaten Tegal selain harus menguasai hard skill (penguasaan teknologi) juga harus memiliki 10 (sepuluh) *soft skill tersebut*. Pemerintah harus mampu mendorong dan memfasilitasi masyarakat khususnya pelaku industri agar memiliki soft dan hard skill tersebut disamping juga pemerintah sendiri harus menguasai kedua skill tersebut atau bisa disebut sebagai *governance 4.0*. Oleh karena itu tantangan pemerintah saat ini yaitu bagaimana caranya harus mampu memasyarakatkan automasi industry melalui difusi teknologi secara luas baik dalam kegiatan pemerintahan maupun berbagai aktifitas masyarakat.

#### **4. Pembangunan Infrastruktur dan Proyek Strategis Nasional**

Pembangunan infrastruktur merupakan bagian integral pembangunan nasional dan roda penggerak pertumbuhan ekonomi. Oleh karena itu, pembangunan infrastruktur diyakini sebagai motor pembangunan suatu kawasan. Infrastruktur juga mempunyai peran yang penting dalam memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa. Jaringan transportasi dan telekomunikasi dari Sabang sampai Merauke serta Sangihe Talaud ke Rote merupakan salah satu perekat utama Negara Kesatuan Republik Indonesia dan tulang punggung distribusi baik barang, penumpang maupun jasa, serta merupakan aspek penting dalam peningkatan produktivitas sektor produksi. Ketersediaan utilitas perumahan dan permukiman, seperti layanan air minum dan sanitasi secara luas dan merata serta pengelolaan sumber daya air yang berkelanjutan turut menentukan tingkat kesejahteraan masyarakat.

Begitu banyak dan besarnya peran infrastruktur sehingga dalam sebuah studi yang dilakukan di Amerika Serikat (Aschauer, 1989 dan Munnell, 1990) menunjukkan bahwa tingkat pengembalian investasi infrastruktur terhadap pertumbuhan ekonomi, adalah sebesar 60% (Suyono Dikun, 2003). Bahkan studi dari *World Bank* (1994) disebutkan elastisitas PDB (*Produk Domestik Bruto*) terhadap infrastruktur di suatu

negara adalah antara 0,07 sampai dengan 0,44. Hal ini berarti dengan kenaikan 1 (satu) persen saja ketersediaan infrastruktur akan menyebabkan pertumbuhan PDB sebesar 7% sampai dengan 44%, variasi angka yang cukup signifikan. Secara empiris jelas dapat ditarik kesimpulan bahwa pembangunan infrastruktur berpengaruh besar terhadap pertumbuhan ekonomi (secara makro dan mikro) serta perkembangan suatu negara atau wilayah.

Dalam RPJMN 2019-2024 pembangunan infrastruktur menjadi guideline dan prioritas arah pembangunan nasional. Fokus pembangunan infrastruktur difokuskan pada infrastruktur pelayanan dasar, infrastruktur ekonomi, infrastruktur perkotaan, Infrastruktur energi dan ketenagalistrikan, dan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi untuk transformasi digital.

Adapun target infrastruktur pelayanan dasar meliputi:

- 70% rumah tangga menempati hunian layak
- 100% akses air minum layak
- 90% hunian dengan akses sanitasi layak
- 30% hunian dengan akses air minum perpipaan.

Target infrastruktur ekonomi antara lain:

- KA Kecepatan tinggi pulau jawa Jakarta-Semarang dan Jakarta-Bandung
- Kereta api Makassar-Parepare
- Jaringan Pelabuhan Utama Terpadu
- 43 Rute Jembatan Udara
- 2.500 Km jalan tol baru dan/atau beroperasi
- 3000 Km jalan nasional baru
- 97% kondisi mantap jalan nasional
- 1,9 jam/100 km waktu tempuh pada jalan lintas utama pulau
- 27% rute pelayaran saling terhubung

Target infrastruktur perkotaan antara lain:

- Sistem angkutan umum masal perkotaan di 6 wilayah metropolitan
- 80% penanganan hunian dengan akses sampak terkelola baik
- 20% pengurangan hunian dengan akses sampak terkelola baik

Target infrastruktur energi dan ketenagalistrikan antara lain:

- 1.400 kWh konsumsi listrik Per Kapita Nasional
- 100% rasio elektrifikasi
- 4 juta sambungan rumah baru jaringan gas kota
- unit pembangunan dan pengembangan kilang minyak (2 *Grass Root Refinery* dan 4 *Refinery Development Master Plan*)

Target Infrastruktur transformasi digital antara lain:

- 95% desa terjangkau infrastruktur jaringan bergerak pita lebar
- 60% cakupan jaringan tetap pita lebar di kecamatan
- 80% populasi terjangkau siaran digital
- 3 *start up* unicorn baru

Permasalahan pembangunan infrastruktur di Indonesia secara umum bukan hanya disebabkan oleh faktor internal, seperti minimnya anggaran pemerintah di sektor pembangunan, namun juga berasal dari faktor-faktor eksternal. Seringkali kita mendengar kasus pembangunan infrastruktur yang terancam gagal karena terganjal oleh pembebasan tanah. Dengan adanya alokasi waktu dan dana yang terbatas, maka banyak proyek pembangunan infrastruktur yang terbengkalai dan gagal akibat terhambat proses pembebasan tanah, bahkan untuk infrastruktur yang dibangun oleh pemerintah dan ditujukan bagi kepentingan umum sekalipun.

Sebenarnya permasalahan dalam pembangunan infrastruktur bukan saja datang dari faktor pembebasan tanah, namun secara keseluruhan tetap saja terfokus pada kompleksitas pertanahan, baik dari aspek perizinan maupun penggunaan dan pemanfaatan tanah. Sebagai contohnya, infrastruktur yang berupa jaringan transmisi listrik tegangan tinggi dapat menjadi masalah karena melintasi kawasan permukiman, apalagi yang padat penduduknya, sehingga akhirnya memerlukan biaya yang besar untuk relokasi sekaligus penyediaan tanah pengganti.

Selain memiliki dimensi ruang yang luas, pembangunan infrastruktur juga menghadapi tiga dimensi permasalahan. Pertama, membutuhkan investasi yang cukup besar, waktu pengembalian modal yang panjang, pemanfaatan teknologi tinggi, perencanaan dan implementasi perlu waktu panjang untuk mencapai skala ekonomi yang tertentu. Kedua, pembangunan menjadi prasyarat bagi berkembangnya kesempatan dan peluang baru di berbagai bidang kehidupan. Ketiga, adanya persaingan global dan sekaligus memenuhi permintaan investor baik dari dalam maupun luar negeri. Melihat begitu banyaknya peran maupun dimensi permasalahan serta tantangan dalam pembangunan infrastruktur, maka perlu diupayakan pencegahan guna meminimalisir munculnya permasalahan.

Secara keseluruhan dalam RPJMN 2019-2024 terdapat 41 (empat puluh satu) proyek prioritas strategis antara lain:

- 1) Industri 4.0 di 5 Sub Sektor Prioritas: Makanan dan Minuman, Tekstil dan Pakaian Jadi, Otomotif, Elektronik, Kimia dan Farmasi
- 2) 10 Destinasi Pariwisata Prioritas: Danau Toba, Borobudur Dskt, LombokMandalika, Labuan Bajo, ManadoLikupang, Wakatobi, Raja Ampat, BromoTengger-Semeru, Bangka Belitung, dan Morotai
- 3) 9 Kawasan industri di luar Jawa dan 31 Smelter
- 4) Penguatan Jaminan Usaha Serta 350 Korporasi Petani dan Nelayan
- 5) Pembangunan Energi Terbarukan *Green Fuel* Berbasis Kelapa Sawit
- 6) Revitalisasi Tambak di Kawasan Sentra Produksi Udang dan Bandeng
- 7) Integrasi Pelabuhan Perikanan dan *Fish Market* Bertaraf Internasional
- 8) Pembangunan Wilayah Batam – Bintan
- 9) Pengembangan Wilayah Metropolitan: Palembang, Banjarmasin, Makassar, Denpasar
- 10) Ibu Kota Negara (IKN)
- 11) Pengembangan Kota Baru: Maja, Tanjung Selor, Sofifi, dan Sorong
- 12) Wilayah Adat Papua: Wilayah Adat Laa Pago dan Wilayah Adat Domberay
- 13) Pemulihan Pasca Bencana: (Kota Palu dan Sekitarnya, Pulau Lombok dan Sekitarnya, serta Kawasan Pesisir Selat Sunda

- 14) Pusat Kegiatan Strategis Nasional: PKSN Paloh-Aruk, PKSN Nunukan, PKSN Atambua, PKSN Kefamenanu, PKSN Jayapura, & PKSN Merauke
- 15) Percepatan Penurunan Kematian Ibu dan *Stunting*
- 16) Pembangunan *Science Techno Park* (Optimalisasi *Triple Helix* di 4 Major Universitas)
- 17) Pendidikan dan Pelatihan Vokasi untuk Industri 4.0
- 18) Integrasi Bantuan Sosial Menuju Skema Perlindungan Sosial Menyeluruh
- 19) Jalan Tol Trans Sumatera Aceh – Lampung
- 20) KA Kecepatan Tinggi Pulau Jawa (Jakarta – Semarang dan Jakarta – Bandung)
- 21) Kereta Api Makassar-Pare Pare
- 22) Jaringan Pelabuhan Utama Terpadu
- 23) Sistem Angkutan Umum Massal Perkotaan di 6 Wilayah Metropolitan: Jakarta, Surabaya, Bandung, Medan, Semarang, dan Makassar
- 24) Pembangunan dan Pengembangan Kilang Minyak
- 25) Pembangkit Listrik 27.000 MW, Transmisi 19.000 KMS dan Gardu Induk 38.000 MVA
- 26) Infrastruktur TIK untuk Mendukung Transformasi Digital
- 27) Pengamanan Pesisir 5 Perkotaan Pantura Jawa
- 28) 18 Waduk Multiguna
- 29) Jembatan Udara 37 Rute di Papua
- 30) Jalan Trans pada 18 Pulau Tertinggal, terluar, dan Terdepan
- 31) Jalan Trans Papua Merauke – Sorong
- 32) Akses Sanitasi (Air Limbah Domestik) Layak dan Aman (90% Rumah Tangga)
- 33) Akses Air Minum Perpipa (10 Juta Sambungan Rumah)
- 34) Rumah Susun Perkotaan (1 Juta)
- 35) Infrastruktur Jaringan Gas Kota untuk 4 Juta Sambungan Rumah
- 36) Pemulihan Empat Daerah Aliran Sungai Kritis
- 37) Pipa Gas Bumi Trans Kalimantan (2.219 km)
- 38) Pembangunan Fasilitas Pengolahan Limbah B3
- 39) Penguatan Sistem Peringatan Dini Bencana
- 40) Penguatan NSOC - SOC dan Pembentukan 121 CSIRT
- 41) Penguatan Keamanan Laut di Natuna

Dalam pembangunan ekonomi nasional, pengembangan setiap kawasan memiliki proporsi dan peran yang berbeda-beda dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi nasional. Pengembangan kawasan di Jawa Tengah diarahkan untuk mewujudkan ruang wilayah yang berdaya saing berbasis pertanian, industri, dan pariwisata, dengan memperhatikan kelestarian alam dan pemerataan pembangunan kawasan yang berkelanjutan. Dengan mempertimbangkan kondisi fisiografis dan geografis kewilayahan, karakter dan potensi wilayah, maka Pemerintah Provinsi Jawa Tengah mengembangkan 8 (delapan) kawasan, yaitu Kedungsepur, Wanarakuti, Banglor, Purwomangung, Subosukawonosraten, Bregasmalang, Barlingmascakeb, dan Petanglong. Pengelompokan kawasan tersebut bertujuan untuk dapat lebih mengoptimalkan potensi lokal, mempertahankan keberagaman hasil produk serta menciptakan pemerataan pembangunan ekonomi yang memiliki ciri kuat produk unggulan. Adapun kebijakan pengembangan kawasan di Jawa Tengah adalah sebagaimana berikut:

- 1) Poros pengembangan utara-utara yang membentang dari Bregasmalang - Petanglong - Kedungsepur - Wanarakuti Banglor dikembangkan dengan memantapkan pembangunan di koridor utara, sehingga tetap mampu menjadi pendorong ekonomi kawasan di Jawa Tengah;
- 2) Poros pengembangan selatan-selatan yang membentang dari Barlingmascakeb - Purwomanggung - Subosukawonosraten dengan mempercepat pembangunan di koridor selatan, sehingga dapat mengurangi ketimpangan ekonomi kawasan;
- 3) Poros pengembangan utara-selatan yang menghubungkan Bregasmalang dengan Barlingmascakeb, Petanglong dengan Purwomanggung, serta Wanarakuti dan Banglor dengan Subosukawonosraten dimaksudkan untuk mengurangi ketimpangan ekonomi kawasan;
- 4) Poros pengembangan bagian tengah Jawa Tengah diarahkan untuk meningkatkan fungsi konservasi di kawasan bagian tengah Jawa Tengah (Hulu Daerah Aliran Sungai) pada daerah Gunung Slamet - Sindoro - Sumbing - Merbabu - Merapi - Lawu; dan
- 5) Pengembangan wilayah kelautan diarahkan untuk mengembangkan potensi ekonomi sosial dan budaya secara berkelanjutan.

Kabupaten Tegal masuk dalam Kawasan Bregasmalang yang terdiri dari Kabupaten Brebes, kota Tegal, Kabupaten Tegal, dan Kabupaten Pemasang. Pengembangan sektor unggulan di Kawasan bregasmalang terdiri dari: Industri, Perdagangan dan Jasa, Pertanian, Pariwisata, Perikanan, Kehutanan, dan Pertambangan.

#### **4.2.3. Isu Strategis Regional (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023)**

Berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Tengah, terdapat beberapa isu strategis Pemerintah Provinsi Jawa Tengah 2018-2023 antara lain:

##### **a. Penanggulangan Kemiskinan**

Isu penanggulangan kemiskinan Provinsi Jawa Tengah menitik beratkan pada perbedaan kondisi kemiskinan antara pedesaan dan perkotaan di mana dominasi penduduk miskin berada di wilayah pedesaan sejumlah 2,229 juta jiwa (13,20%) sedangkan penduduk miskin di wilayah perkotaan sebesar 1,89 juta jiwa (10,57%). Jika ditelaah lebih detail, maka kemiskinan pedesaan di Jawa Tengah berporfesi sebagai petani (buruh tani, petani gurem, dan pekerja serabutan) dan nelayan (buruh nelayan dan nelayan kecil). Selain itu Sebagian besar (40%) penduduk berpendapatan rendah terbawah adalah: (1) angkatan kerja yang bekerja tidak penuh (*underutilized*) terdiri dari penduduk yang bekerja paruh waktu (*part time worker*), termasuk di dalamnya adalah rumah tangga nelayan, rumah tangga petani berlahan sempit, rumah tangga sektor informal perkotaan, dan rumah tangga buruh perkotaan; (2) usaha mikro kecil termasuk rumah tangga yang bekerja sebagai pekerja keluarga (*unpaid worker*); dan (3) penduduk miskin yang tidak memiliki aset maupun pekerjaan.

Kondisi faktual yang dihadapi penduduk miskin Jawa Tengah adalah masih rendahnya akses pelayanan dasar (*basic needs access*) meliputi akses rumah layak, pangan terjangkau, pendidikan, dan kesehatan; serta lemahnya pengembangan kehidupan ekonomi berkelanjutan (*sustainable livelihood*) yang ditunjukkan dengan rendahnya kesempatan berusaha dan bekerja, akses permodalan, pasar, aset

produksi, keterampilan, dan produktivitas yaitu ketidakmampuan rumah tangga untuk menghasilkan pendapatan. Kondisi ini didukung dimensi sosial masyarakat yang menyangkut dengan kerentanan, ketidakberdayaan, keisolasian, kelemahan jasmani dan psikologi, serta munculnya gejala kultur komodifikasi data di masyarakat, dengan memanfaatkan data untuk kepentingan mencari keuntungan sendiri.

Dalam penanggulangan kemiskinan di Jawa Tengah, ketidaktepatan sasaran program menjadi pemicu utama kurang optimalnya penanggulangan kemiskinan itu sendiri. Selain itu miskin juga dipengaruhi dimensi politik yang dikarenakan struktur politik dan ekonomi yang timpang, serta tidak memberikan ruang partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan. Tantangannya adalah bagaimana menciptakan pondasi masyarakat miskin yang kokoh, dalam dimensi politik yang lebih luas, dengan menciptakan ruang aspirasi masyarakat dalam proses politik dan pembangunan, dalam rangka meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam proses pembangunan daerah.

**b. Peningkatan kualitas dan daya saing sumberdaya manusia**

Keberhasilan pembangunan SDM salah satunya diukur dari nilai IPM. Sampai dengan **tahun 2020 IPM Jawa Tengah mulai membaik yaitu sebesar 71,87** dan masuk dalam kategori tinggi. Namun demikian angka ini masih dibawah angka nasional **sebesar 71,94**. Kondisi ini terutama ditunjukkan dari komponen rata-rata lama sekolah dan harapan lama sekolah, serta pengeluaran per kapita (yang disesuaikan). Aspek pendidikan perlu diperhatikan, karena rata-rata lama sekolah dan harapan lama sekolah penduduk Jawa Tengah cukup rendah dibandingkan dengan provinsi lain di Pulau Jawa. **Harapan Lama Sekolah Jawa Tengah tahun 2020 sebesar 12,70 tahun, dan Rata-rata Lama Sekolah sebesar 7,69 tahun.** Angka tersebut menunjukkan bahwa rata-rata penduduk usia 25 tahun di Jawa Tengah hanya bersekolah sampai dengan SMP kelas II atau kelas VIII.

**c. Daya saing ekonomi dan peningkatan kesempatan berusaha**

Meskipun pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah relatif stabil, namun kondisi ekonomi global dan regional yang tidak dapat diprediksi tepat, harus diantisipasi karena akan memberikan pengaruh pada kondisi perekonomian Jawa Tengah kedepan. Kondisi perekonomian daerah yang stabil akan memberikan peluang kesempatan kerja dan kesempatan berwirausaha yang semakin luas. Akan tetapi persoalan kualitas calon tenaga kerja dan tenaga kerja menjadi hal penting untuk diperhatikan. Rendahnya tingkat pendidikan masyarakat Jawa Tengah berdampak pada kualitas dan daya saing sumberdaya manusia yang berkaitan dengan ketenagakerjaan.

**d. Keberlanjutan Pembangunan Dengan Memperhatikan Daya Dukung Lingkungan dan Kelestarian Sumber Daya Alam**

Isu pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan hidup menjadi isu yang penting baik secara global maupun nasional khususnya terkait dengan isu perubahan iklim. Adanya dampak yang ditimbulkan oleh perubahan iklim seperti bencana banjir, longsor dan kekeringan menuntut adanya pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan yang berkelanjutan. Hal ini seiring dengan isu pembangunan berkelanjutan (*Sustainable Development Goals/SDGs*) di mana 3 dari 17 tujuannya adalah berkaitan dengan lingkungan, yaitu penanganan perubahan iklim, pemeliharaan ekosistem laut dan pemeliharaan ekosistem darat.

**e. Kedaulatan pangan dan energi**

Produksi pertanian akan mempengaruhi pada penyediaan pangan bagi masyarakat. Perkembangan produksi pertanian di Jawa Tengah saat ini secara statistik mampu mencukupi kebutuhan pangan masyarakat utamanya beras, bahkan mampu berkontribusi terhadap produksi beras nasional. Namun tidak demikian dengan produksi pertanian lainnya seperti kedelai dan jagung, yang masih harus ditingkatkan kedepan. Isu lain adalah terkait dengan kedaulatan energi. Kebutuhan energi masyarakat yang dari tahun ke tahun mengalami peningkatan dan pemakaian energi menunjukkan masih adanya kecenderungan yang sama sebagaimana dialami di tingkat nasional, yaitu ketergantungan terhadap sumber energi fosil, yang potensinya semakin lama semakin berkurang.

**f. Kesenjangan wilayah**

Isu lainnya bukan hanya tentang daya saing ekonomi, namun juga ekonomi yang berkualitas, inklusif, dan merata. Wilayah Jawa Tengah saat ini perkembangannya belumlah merata, yang ditunjukkan dengan Indeks Williamson sebesar 0,6 di tahun 2016. Selain itu masih cukup banyak kabupaten yang masuk kategori relatif tertinggal dibanding kabupaten/kota lain di Jawa Tengah. Di samping itu juga terdapat kesenjangan antara wilayah desa dan kota. Kesenjangan pembangunan antara desa-kota maupun antara kota-kota perlu ditangani secara serius untuk mencegah terjadinya urbanisasi, yang pada gilirannya akan memberikan beban dan masalah sosial di wilayah perkotaan.

**g. Tata kelola pemerintahan dan kondusivitas wilayah**

Siklus manajemen pembangunan akan berjalan dengan baik dan mencapai tujuan yang diinginkan, apabila didukung dengan tata kelola pemerintahan yang baik, meliputi kualitas dan profesionalisme aparatur, akuntabilitas kinerja pembangunan, serta pelayanan publik yang prima.

**4.2.4 Isu Umum Kabupaten Tegal**

Isu strategis Kabupaten Tegal dirumuskan berdasarkan isu internasional, isu nasional, isu regional, isu jangka panjang RPJPD Kab. Tegal, pokok permasalahan pembangunan eksisting dan isu lokal yang actual. Oleh karena itu sebelum dirumuskan dan ditentukan isu strategis Kabupaten Tegal 2019-2024 setidaknya perlu dijabarkan isu Perpres 79 tahun 2019, RPJPD Kab. Tegal 2005-2025 pada periode yang berkenaan serta gambaran dampak Covid-19 di Kabupaten Tegal saat ini.

**4.2.4.1. Isu Strategis Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2005-2025**

Visi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Tegal Tahun 2005-2025 adalah *“Terwujudnya Masyarakat yang Maju, Sejahtera dan Mandiri berlandaskan Ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa”*. Tersusunnya visi tersebut dilatarbelakangi dari adanya Isu Strategis Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yaitu (1) Reformasi Birokrasi; (2) Hak Kekayaan Intelektual (HKI); (3) Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM); (4) Budaya Kreatif Inovatif; (5) Kesetaraan dan Keadilan Gender; (6) Pelestarian Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup; (7) Krisis Pangan dan Air; (8) Krisis Energi; (9) Kerjasama Antar Daerah; dan (10) Penguatan Wilayah Tertinggal dan Kapasitas Masyarakat.

Secara khusus Tahap IV RPJPD yang menjadi dasar penyusunan RPJMD Kabupaten Tegal 2019-2024 mempunyai penekanan **pada Akselerasi Proses Inovasi**.

Pada RPJPD tahap IV, budaya kreasi, inovasi dan kewirausahaan perlu meresap pada tiap kehidupan masyarakat. Pembangunan manusia harus lebih berkualitas. Oleh karena itu IPM Kabupaten Tegal pada tahap ini sudah selayaknya di atas rata-rata IPM Kabupaten/Kota se Provinsi Jawa Tengah. Dengan meningkatnya kapasitas sumberdaya masyarakat Kabupaten Tegal, maka peran masyarakat terhadap pengelolaan lingkungan harus semakin dominan. Masyarakat harus mempunyai pemahaman terkait keberdayaan dan peran serta sebagai salah satu pilar *good governance* dalam mencapai tujuan pembangunan (tujuan bersama). Selain itu gotong royong sebagai salah satu kearifan lokal kembali menjadi budaya. *Corporate Social Responsibility* (CSR) menjadi salah satu bentuk gotong royong para pelaku usaha pada tahap ini. Pada tahap ini kapasitas inovatif harus semakin mantap. Untuk itu bentuk-bentuk usaha-usaha ramah lingkungan dan menguntungkan secara ekonomis (*eco-efficiency*) harus ditingkatkan. Akselerasi proses menuju daya saing ini harus mampu meningkatkan ekspor produk bernilai tambah yang tinggi. Peningkatan ekspor ini sudah barang tentu harus diikuti dengan peningkatan transaksi informasi intra Kabupaten Tegal, karena sebagaimana diketahui, bahwa dalam dunia usaha pelaku yang menguasai pasar adalah pelaku yang menguasai informasi. Oleh karena itu pemanfaatan TIK dalam tahap ini telah mutlak menjadi proses standart dalam penyelenggaraan usaha dan pemerintahan.

Hingga berakhirnya RPJMD IV diharapkan berbagai capaian dapat diwujudkan, yaitu:

#### **a. Reformasi Birokrasi**

Reformasi birokrasi relatif sudah tercapai dengan terwujudnya tata pemerintahan yang baik (*good governance*). Instrumen hukum sebagai pijakan atau fondasi reformasi birokrasi, guna mengarahkan dan memaksakan birokrasi pemerintahan ke arah pencapaian *good governance* telah diterapkan secara konsekwen dan konsisten. Hal ini ditandai dengan pertama : terbentuknya birokrasi yang bersih, yaitu birokrasi yang anti korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) dan berkurangnya perilaku koruptif; kedua : birokrasi yang efisien dan hemat dalam menggunakan sumber daya yang terbatas (*man, money, material, methode, and time*); ketiga : birokrasi yang transparan, yakni birokrasi yang seluruh kebijakan dan aktivitasnya diketahui masyarakat dan masyarakat dapat mengaksesnya dengan mudah; Keempat : birokrasi yang melayani, yaitu birokrasi yang tidak minta dilayani, tetapi birokrasi yang melayani masyarakat; kelima : birokrasi yang terdesentralisasi, yaitu kewenangan pengambilan keputusan terdesentralisasi kepada pimpinan unit kerja terdepan.

#### **b. Ekonomi Kreatif Masyarakat**

Karakter masyarakat Kabupaten Tegal yang kreatif dan berjiwa wira usaha semakin berkembang menjadi industri kreatif, yang mampu menghasilkan karya-karya inovatif, yang berpengaruh di tingkat nasional. Banyaknya karya-karya inovatif ini membuat persaingan usaha semakin meningkat. Hal ini menimbulkan kesadaran yang kuat terhadap perlindungan karya intelektualnya. Kesadaran masyarakat untuk menghargai HKI telah menjadi budaya, ditandai dengan banyaknya masyarakat mendapatkan HKI. Hal ini tidak terlepas dari adanya penegakkan hukum bagi

pelanggar HKI dan optimalnya peran lembaga-lembaga konsultasi HKI, sehingga masyarakat dengan mudah untuk memperoleh penjelasan tentang HKI.

Kompetensi dan kapasitas inovatif UMKM telah berkembang pesat, sehingga UMKM menjadi rumpun usaha pelaku industri kreatif yang berdaya saing dan modern berbasis pengetahuan (*knowledge-based enterprise*).

#### **c. Pembangunan Gender**

Penerapan kesetaraan dan keadilan gender di berbagai bidang pembangunan, dengan memperhatikan masalah kontekstual dan situasional perlu diwujudkan. Porsi dan siklus sosial perempuan dan laki-laki harus setara, serasi, seimbang dan harmonis. Wujud Kesetaraan dan Keadilan Gender ini antara lain berupa: Akses, kesempatan yang sama bagi perempuan dan laki-laki pada sumber daya pembangunan; Partisipasi, perempuan dan laki-laki berpartisipasi yang sama dalam proses pengambilan keputusan; Kontrol, perempuan dan laki-laki mempunyai kekuasaan yang sama pada sumber daya pembangunan; Manfaat, pembangunan mempunyai manfaat yang sama bagi perempuan dan laki-laki.

#### **d. Kelestarian Lingkungan Hidup**

Sumber daya alam dan lingkungan hidup mempunyai peran ganda yaitu sebagai modal pembangunan sekaligus sebagai penopang sistem kehidupan semakin terjaga kelestariannya. Untuk itu perlu ditingkatkan kesadaran dan upaya nyata dari masyarakat maupun dunia usaha dalam pembangunan berkelanjutan, disamping semakin efektifnya penegakan hukum di bidang lingkungan.

Konversi lahan sawah dan lahan pertanian produktif lainnya terkendali yang didukung dengan pengelolaan sumber daya air terpadu (*integrated water resources management*), sehingga efektivitas dan efisiensi penggunaan dan konsumsi air. Sehingga Daerah tangkapan air dan sumber-sumber mata air tetap terjaga kelestariannya. Dengan kondisi tersebut, maka produktivitas lahan terjaga dan kemandirian pangan terwujud. Pemanfaatan energi terbarukan telah dilaksanakan secara berkelanjutan antara lain pemanfaatan biogas, biomassa, energi matahari, dan pemanfaatan panas bumi (*geothermal*).

#### **e. Kerjasama dan Kondusifitas Wilayah**

Kerjasama antar daerah perlu dilaksanakan secara terpadu berdasarkan prinsip: kepedulian (*care*), saling berbagi dengan adil (*share*), dan jujur (*fair*), sehingga tujuan dari kerjasama antar daerah dapat terwujud, antara lain terselesaikannya dengan cepat dan adil. Selain itu dengan adanya Kerjasama yang berkualitas maka akan meminimalisir konflik dan berkurangnya kesenjangan antar daerah,

#### **f. Kesenjangan Kesejahteraan, Infrastruktur Dasar dan Kualitas SDM**

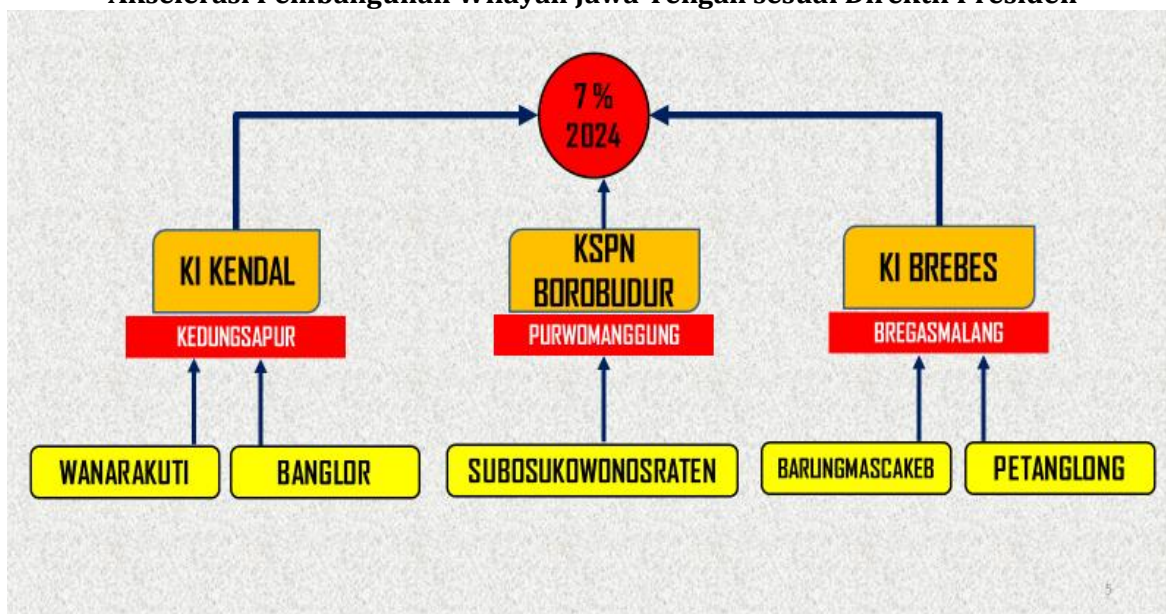
Pemerataan pembangunan khususnya wilayah tertinggal dan kapasitas masyarakat perlu ditingkatkan secara efektif. Hal ini antara lain ditunjukkan dengan terentaskannya sebagian besar masyarakat dari kemiskinan; setiap anak, laki-laki dan perempuan, telah menyelesaikan tahap pendidikan dasar; tingkat kematian balita pada kondisi minimal; meningkatnya kesehatan ibu, yang ditandai dengan berkurangnya angka kematian ibu dalam proses melahirkan; penyakit menular diare, malaria, DB, TBC, kusta, HIV/AIDS, flu burung dan lain-lain dalam kondisi minimal; dan meningkatnya akses masyarakat wilayah tertinggal terhadap air minum.

#### 4.2.4.2. Kolaborasi Wilayah Dalam Percepatan Pembangunan WP Bregasmalang

Perpres 79 tahun 2019 mempunyai peran strategis sebagai payung regulasi yang bertujuan untuk meningkatkan investasi dan pertumbuhan ekonomi kawasan. Dengan regulasi ini diharapkan dapat mendukung dan memberikan nilai tambah pembangunan kawasan yang kemudian dapat mengungkit perekonomian lokal, regional, dan nasional sehingga dapat tumbuh hingga 7% pada akhir tahun 2024.

Skenario akselerasi pembangunan wilayah Jawa Tengah untuk mencapai pertumbuhan 7% pada tahun 2024 sebagai berikut:

**Gambar 4. 7**  
**Akselerasi Pembangunan Wilayah Jawa Tengah sesuai Direktif Presiden**



Sumber: Bappeda dan Litbang Kabupaten Tegal, 2021

Kabupaten Tegal sebagai salah satu bagian dalam pembangunan system kawasan tersebut harus mampu bersinergi dengan kabupaten/kota lainnya sebagai satu kesatuan system yang utuh. Selain itu berbagai kebijakan pusat, provinsi dan Kabupaten Tegal juga harus sinkron mulai dari kebijakan perencanaan hingga kebijakan penganggarannya.

Melalui Perpres 79 tahun 2019 tersebut, setidaknya terdapat 15 program/kegiatan strategis yang lokusnya berada di Kabupaten Tegal. Meskipun secara umum sumber pendanaan kelimabelas program/kegiatan tersebut berasal dari APBN, namun bukan berarti Pemerintah Kabupaten Tegal menjadi pasif. Justru sebaliknya Pemerintah Kabupaten Tegal harus lebih aktif. Oleh karena itu tantangan kedepan terkait perpres 79 tahun 2019 di Kabupaten Tegal ialah bagaimana seluruh proyek atau program/kegiatan strategis tersebut dapat berjalan dengan lancar. Berbagai permasalahan pra-pelaksanaan proyek harus dapat teridentifikasi semua dan dapat dipecahkan sebelum proyek dilaksanakan. Selain itu Pemerintah Kabupaten Tegal juga

harus punya konsep/skenario yang jelas agar setelah proyek selesai manfaatnya dapat dirasakan secara berkelanjutan. Tidak berhenti pada pembangunan fisiknya saja, namun pemanfaatan dan kemanfaatannya juga harus terkonsep dengan jelas. Adapun rincian program/kegiatan strategis Perpres 79 tahun 2019 adalah sebagai berikut:

**Tabel 4. 7**  
**Daftar Lampiran Proyek di Kabupaten Tegal**  
**(Lampiran Perpres Nomor 79 Tahun 2019)**

| NO            | No. Urut | PROGRAM/KEGIATAN                                                    | ESTIMASI NILAI INVESTASI | SUMBER DANA | LOKASI                                         | KEWENANGAN                                                                            |
|---------------|----------|---------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 1             | 6        | Pengendali Banjir dan Normalisasi Sungai Jimat dan Sungai Rambut    | 100                      | APBN        | Kecamatan Warureja                             | Pemerintah Provinsi → (PUSDATARU) - Balai PSDA                                        |
| 2             | 10       | Pengembangan Sumber Air Baku SPAM Perkotaan                         | 300                      | APBN        | Seluruh Wilayah Kabupaten                      | 56ik84, Ji4                                                                           |
| 3             | 11       | Pembangunan Bendungan Jatinegara                                    | 1500                     | APBN        | Kecamatan Jatinegara                           | Pemerintah Pusat → Kementerian PUPR Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS)                 |
| 4             | 13       | Optimalisasi Waduk Cacaban                                          | 400                      | APBN        | Kecamatan Kedungbanteng dan Jatinegara         | Pemerintah Pusat → Kementerian PUPR Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS)                 |
| 5             | 15       | Pengendalian Banjir Sistem Sungai Cacaban                           | 150                      | APBN        | Kec. Suradadi, Kec. Kedungbanteng              | Pemerintah Provinsi → (PUSDATARU) - Balai PSDA                                        |
| 6             | 16       | Pembangunan Sarpras Konservasi SDA Sungai Pemali (Tegal dan Brebes) | 150                      | APBN        | Kec. Margasari                                 | Pemerintah Provinsi → (PUSDATARU) - Balai PSDA                                        |
| 7             | 18       | Peningkatan Jalan Akses Kaligua - Guci                              | 50                       | APBN        | Kec. Bumijawa                                  | DPU Binamarga Jateng dan DPU Kab Tegal                                                |
| 8             | 23       | Peningkatan Jalan Yomani - Guci                                     | 60                       | APBN        | Kec. Lebaksiu, Balapulang, Bojong dan Bumijawa | Pemerintah Kabupaten → DPU Kab Tegal                                                  |
| 9             | 24       | Peningkatan Jalan dan Perlengkapan Jalan Ketanggungan - Prupuk      | 60                       | APBN        | Kec. Margasari                                 | Pemerintah Pusat → Kementerian PUPR (Balai Pengelola Jalan Nasional Wilayah IX)       |
| 10            | 34       | Fasilitas Pengembangan Industri Kluster Logam                       | 100                      | APBN        | Kec. Kramat                                    | Pemerintah Kabupaten → Dinas Perikanan Kab Tegal                                      |
| 11            | 38       | Revitalisasi Pasar Adiwarna, Balamoa, Guci, Bumijawa                | 80                       | APBN        | Kec. Adiwarna, Bojong, Bumijawa dan Pangkah    | Pemerintah Kabupaten → Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM Kab Tegal, Dinas Perkimtaru |
| 12            | 39       | Pembangunan Pasar Ikan dan Balai Benih Ikan (BBI)                   | 50                       | APBN        | Kec. Lebaksiu dan Balapulang                   | Pemerintah Kabupaten → Dinas Kelautan Perikanan dan Peternakan Kab Tegal              |
| 13            | 46       | Pengembangan Pertanian Bawang Putih                                 | 30                       | APBN        | Kec. Bojong dan Bumijawa                       | Pemerintah Kabupaten → Dinas Pertanian dan Tanaman Pangan Kab Tegal                   |
| 14            | 47       | Pengembangan Pelabuhan Perikanan Pantai Larangan                    | 150                      | APBN        | Kec. Kramat                                    | Pemerintah Provinsi → Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jateng                    |
| JUMLAH        |          |                                                                     | 3180                     |             |                                                |                                                                                       |
| SKALA KAWASAN |          |                                                                     |                          |             |                                                |                                                                                       |
| 15            | 6        | Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) Jawa Tengah               | 62,5                     | APBN        | Seluruh Wilayah Kabupaten                      | Pemerintah Kabupaten → Dinas Perkimtaru Kabupaten Tegal                               |
| JUMLAH        |          |                                                                     | 62,5                     |             |                                                |                                                                                       |

*Sumber: Bappeda dan Litbang Kabupaten Tegal, 2021*

#### 4.2.4.3. Covid-19 Dalam Perspektif Kabupaten Tegal

Isu Covid-19 beberapa tahun kedepan masih akan mewarnai berbagai lini kehidupan social-ekonomi masyarakat di Kabupaten Tegal. Dalam hal perekonomian masyarakat di Kabupaten Tegal, berbagai sektor perekonomian baik formal maupun informal, dari skala besar hingga kecil melaporkan penurunan pendapatan hingga mengalami kerugian yang cukup besar. Banyak pelaku usaha mengalami gangguan rantai pasok baik di level domestik maupun internasional (ekspor/impor), serta penurunan drastis permintaan akan barang-barang non-*esensial* (*durable*), yang selanjutnya bisa mengganggu neraca keuangan perusahaan bahkan bisa berujung kebangkrutan. Hal tersebut memaksa banyak perusahaan merumahkan bahkan mem-PHK karyawannya. Setidaknya dari laporan yang ada, sudah ada 161 karyawan dirumahkan dan 461 karyawan di-PHK. Bahkan disinyalir sudah ada ribuan karyawan asal Kabupaten Tegal dari berbagai skala industri yang di-PHK namun tidak dilaporkan. Pada sektor (perdagangan) informal, pelaku usaha mikro, pedagang eceran, serta pelaku usaha transportasi mengalami dampak yang cukup berat dari berkurangnya omset usaha hingga yang paling ekstrem kehilangan mata pencaharian. Pelaku usaha transportasi mulai dari tukang ojek *online*, ojek pangkalan, kusir andong, sopir angkot, tukang becak yang sebagian besar beroperasi di Kecamatan Slawi dan Adiwarna dengan jumlah tidak kurang dari 2.765 orang dilaporkan pendapatannya menurun hingga 26,02%. Bahkan ada risiko kenaikan harga kebutuhan pokok karena distribusinya terganggu. Selain itu sektor-sektor di Kabupaten Tegal yang juga diperkirakan terpuak dengan kondisi ini

diantaranya industri pariwisata (perhotelan, agen perjalanan, bisnis hiburan, dan usaha kuliner), industri manufaktur khususnya yang padat karya dan bergantung pada ekspor-impor, dan sektor konstruksi.

Beberapa akumulasi efek covid-19 diberbagai lini kehidupan masyarakat Kabupaten Tegal yang paling krusial antara lain pengangguran, anjloknya pendapatan, peningkatan angka kemiskinan, melebarnya angka ketimpangan, tingginya utang masyarakat bersamaan dengan penerimaan yang anjlok, serta produksi yang menurun bahkan hilang secara permanen serta bisnis gulung tikar.

Ada beberapa hal yang dirasa bisa lebih mempanjang kasus covid-19 di Kabupaten Tegal jika tidak segera diantisipasi dan dicarikan solusi secara tepat. Hal tersebut berkaitan dengan perilaku masyarakat yang sangat ditentukan oleh latar belakang sosial, budaya dan religi. Merujuk fakta kondisi di Kabupaten Tegal saat ini, protokol kesehatan dalam berbagai aktifitas masyarakat kurang dipedomani, jalanan masih padat, kerumunan masih banyak dijumpai, pergerakan manusia dari dan ke zona merah cukup massive bahkan tidak terpantau dan sulit bisa dicegah. Sementara jika kondisi tersebut dibiarkan berlarut-larut maka pandemi covid-19 akan semakin lama berlangsung, akibatnya resesi ekonomi (skala mikro) masih akan berlangsung. Sektor-sektor ekonomi besar-kecil semakin lama akan semakin lumpuh. Akan lebih banyak lagi tambahan karyawan di-PHK bahkan perusahaan gulung tikar. Sementara keberhasilan pencegahan dan penanggulangan wabah dari sisi kesehatan belum bisa diukur dengan jelas. Untuk itu kecepatan dan ketepatan pemerintah daerah dalam menangani pandemik ini sangat menentukan kecepatan pemulihan kondisi sosial ekonomi masyarakat pasca krisis.

#### **4.2.4.4. Penentuan Isu Strategis Kabupaten Tegal**

Penentuan isu strategis Perubahan RPJMD Kabupaten Tegal 2019-2024 dilakukan berdasarkan hasil analisis permasalahan pembangunan yang ada, isu internasional, isu dan kebijakan nasional yang ada, isu regional dan isu local Kabupaten Tegal sendiri yang mempengaruhi pembangunan pada periode 2019-2024. Selain itu juga dilakukan *focus group discussion* dengan Tokoh Masyarakat yang berasal dari wilayah dengan karakteristik pertanian, perkotaan dan pesisir di Kabupaten Tegal. Dari hasil olah data informasi dan curah pendapat dari berbagai pihak yang menjadi narasumber, maka dihasilkan prioritas isu strategis pembangunan jangka menengah Kabupaten Tegal Tahun 2019-2024 sebagai berikut:

##### **a. Tingkat Kemiskinan dan Pengangguran**

Kemiskinan dan pengangguran merupakan masalah daerah yang saat ini masih menjadi tantangan yang belum terselesaikan. Kemiskinan juga berkaitan erat dengan pengangguran yang keduanya saat ini menjadi satu entitas yang tidak bisa dipisahkan. Kemiskinan sendiri merupakan permasalahan dan isu multidimensi dan krusial yang harus ditangani oleh berbagai kebijakan sektoral yang saling bersinergi antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Pemerintah Daerah Kabupaten Tegal melalui melalui tiga strategi yakni, perlindungan sosial yang komprehensif; penyediaan dan peningkatan akses terhadap layanan dasar; dan penyediaan mata pencarian yang layak serta berkelanjutan. Melalui sinergitas kebijakan tersebut, dalam lingkup regional jawa tengah tingkat kemiskinan Kabupaten Tegal tahun 2019 yang sebesar 7,64 % berada pada urutan 10 terendah dari 35

kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah, atau satu tingkat dibawah Kota Tegal yang berada pada posisi 9 terendah dengan tingkat kemiskinan sebesar 7,47%. Namun dengan adanya pandemi covid-19 di tahun 2020 telah merubah tren kemiskinan di Kabupaten Tegal yang sudah menurun menjadi meningkat secara riil ditahun 2020 maupun beberapa tahun kedepan. Setidaknya persentase penduduk miskin ditahun 2020 telah naik dan mencapai 8,14%. Ironisnya, umumnya sebagian besar penduduk yang rentan miskin tersebut bekerja di sektor informal. Padahal kelompok ini merupakan kelompok penduduk yang rentan terhadap kemiskinan dan paling terdampak dengan adanya pandemi covid-19. Sebagian besar pekerja informal mengandalkan upah harian. Apabila penanganan pandemi berlangsung lama, periode pembatasan dan penurunan mobilitas orang akan semakin panjang. Akibatnya, golongan rentan miskin dan hampir miskin yang bekerja di sektor informal yang mengandalkan upah harian akan sangat mudah kehilangan mata pencaharian dan akhirnya jatuh kedalam jurang kemiskinan.

Merujuk pada beberapa kondisi diatas maka kebijakan pada Perubahan RPJMD Kabupaten Tegal 2019-2024 harus dapat mengantisipasi fenomena tersebut. Setidaknya pemerintah Kabupaten Tegal beberapa tahun kedepan harus punya skenario yang mampu memberi pijakan kepada seluruh masyarakat khususnya kepada masyarakat yang rentan miskin di Kabupaten Tegal agar tidak jatuh dibawah garis kemiskinan. Beberapa scenario terkait penanggulangan kemiskinan dampak covid-19 harus lebih baik dan efektif ketimbang apa yang sudah dilakukan saat ini. Beberapa kebijakan seperti jaring pengaman sosial harus lebih tepat sasaran dan tepat guna. Stimulus kebijakan ekonomi terhadap sektor informal harus lebih nyata dan dominan.

Berkaitan dengan pengangguran, fenomena pengangguran di Kabupaten Tegal cukup unik dan perlu dikaji lebih mendalam. Idealnya penurunan angka kemiskinan berbanding lurus dengan penurunan angka pengangguran. Namun kenyataannya di Kabupaten Tegal disaat angka kemiskinan mengalami penurunan, angka pengangguran justru meningkat. Tentu saja hal ini perlu diwaspadai dan mendapat perhatian khusus apalagi disaat kondisi pandemi covid-19 saat ini telah banyak merusak struktur ekonomi wilayah. Hasilnya angka pengangguran di Kabupaten Tegal tahun 2020 naik menjadi 9,82%.

Pada masa pandemi ini, banyak sector usaha dari skala besar hingga kecil mengalami penurunan pendapatan. Penurunan pendapatan tersebut disebabkan karena turunnya permintaan pasar yang menyebabkan rendahnya produktivitas usaha (perusahaan). Daya jual produk usaha yang melemah tersebut menjadikan perusahaan kesulitan dalam membayar gaji karyawannya sehingga banyak tenaga kerja asal Kabupaten Tegal yang akhirnya dirumahkan bahkan di-PHK sebagaimana telah dijelaskan pada isu sebelumnya. Potensi pengangguran tersebut belum termasuk pelaku sector informal yang bangkrut atau kehilangan usahanya karena lemahnya daya beli masyarakat di era pandemi ini.

Dengan melihat kondisi saat ini, isu pengangguran Kabupaten Tegal bisa dikatakan cukup kompleks. Selain fenomena pengangguran penduduk Kabupaten Tegal yang belum diketahui bentuk dan perilakunya, pemerintah Kabupaten Tegal harus bisa meningkatkan produktivitas masyarakat didalam era krisis pandemi covid-19.

Tantangan isu pengangguran dalam era dampak pandemi lebih kepada bagaimana masyarakat dengan segala keterbatasan saat ini namun tetap mampu produktif secara

ekonomi. Setidaknya dalam era krisis ini transformasi bentuk usaha digital harus menjadi *guideline* khusus. Digitalisasi ekonomi masyarakat mulai skala kecil hingga besar perlu difasilitasi. Hal ini didasarkan fakta bahwa adanya pandemi covid-19 di Kabupaten Tegal telah memunculkan ekonomi digital masyarakat disemua lini bahkan penjual sayur eceran telah masuk kedalamnya. Kemunculan ekonomi digital ini mempunyai potensi pengembangan mulai dari hulu-hilirnya. Untuk itu perlu di-manage dan dikembangkan keterkaitan hulu hilirnya (*supply chain management*). Digitalisasi semua sektor usaha khususnya pertanian, perdagangan, dan industri pengolahan harus dikembangkan. Jika merujuk istilah saat ini boleh kita sebut sebagai pertanian 4.0, perdagangan 4.0, dan industri pengolahan 4.0.

## **b. Kualitas Sumber Daya Manusia**

### **✓ Kualitas Tenaga Kerja**

Tantangan isu ketenagakerjaan kedepan adalah bagaimana meningkatkan kualitas tenaga kerja yang berdaya saing tinggi. Dengan kata lain tantangan ini menitik beratkan pada tingkat penyerapan tenaga kerja kedepan. Hal tersebut didasarkan pada asumsi bahwa tingkat penyerapan lapangan kerja dimasa pasca krisis berpotensi tidak sebanding dengan jumlah tenaga kerja yang telah di-PHK. Dengan keterbatasan sumber daya perusahaan saat krisis, maka memungkinkan perusahaan hanya akan merekrut tenaga kerja dengan jumlah yang lebih sedikit. Hal tersebut memunculkan seleksi yang lebih ketat kedepannya. Perusahaan akan lebih memilih tenaga kerja yang memiliki produktifitas yang tinggi dan mampu mengerjakan hal lainnya (*multi tasking*). Oleh karena itu perubahan lanskap atau kualifikasi tenaga kerja bisa jadi suatu keniscayaan. Tenaga kerja berpendidikan dan berketerampilan rendah disektor formal akan tersingkir secara otomatis. Setidaknya ada beberapa hal yang perlu diperhatikan terkait ketenagakerjaan pascakrisis antara lain:

- Tingkat penyerapan tenaga kerja dimasa pasca krisis tidak sebanding dengan jumlah tenaga kerja yang telah di-PHK, atau dengan kata lain *supply* tenaga kerja jauh melebihi *demand* tenaga kerja itu sendiri;
- Dengan keterbatasan sumber daya (ekonomi) perusahaan pasca krisis, maka memungkinkan perusahaan hanya akan merekrut tenaga kerja yang memiliki produktifitas yang tinggi dan mampu mengerjakan hal lainnya (*multi tasking*). Karena itu kualifikasi tenaga kerja akan semakin meningkat;
- Lapangan usaha yang berkembang di era pascapandemi adalah usaha yang berhubungan dengan teknologi dalam artian digitalisasi maupun mesinisasi. Sehingga peran manusia akan mulai berkurang porsinya dalam proses produksi hingga pemasaran. Oleh karena itu transformasi tenaga kerja diarahkan pada proses *entrepreneurship*.

Dengan melihat tantangan dalam sektor ketenagakerjaan tersebut, untuk mengantisipasi isu SDM sektor tenaga kerja kedepan Pemerintah Kabupaten Tegal harus memiliki konsep dan pembentukan tenaga kerja yang kompeten dan produktif yang mampu menciptakan lapangan kerja sendiri maupun mampu bersaing dalam seleksi penyerapan lapangan kerja kedepan. Selain itu sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya bahwa tantangan pengembangan tenaga kerja kedepan ialah bagaimana tenaga kerja harus memiliki 10 soft skill era Revolusi Industri Generasi Keempat selain juga memiliki *hard skill* penguasaan teknologi.

### ✓ **Kualitas Pendidikan Masyarakat**

Isu kualitas Pendidikan masyarakat kedepan akan menjadi lebih berat ketimbang sebelumnya. Wabah covid-19 menjadi salah satu penyebabnya. Dalam kondisi Kabupaten Tegal mulai menata pengelolaan Pendidikan yang lebih berkualitas, seketika terganggu akibat wabah covid-19. Sistem belajar mengajar mempunyai keterbatasan dan kendala akibat perubahan pola pembelajaran tatap muka menjadi non-tatap muka. Sementara pembelajaran non-tatap muka belum ditemukan bentuk yang efektif mulai dari prosesnya hingga evaluasinya. Hal tersebut akan berdampak pada penurunan mutu Pendidikan itu sendiri. Oleh karena itu tantangan Pendidikan kedepan (*new normal*) ialah harus syarat perbaikan ekosistem pendidikan agar tidak lagi bergantung pada sekolah (Pendidikan Era 4.0). Selain sistem, kualitas tenaga pengajar dalam mengimplementasikan Pendidikan Era 4.0 harus ditingkatkan. Jika dirangkum dari berbagai sumber, setidaknya ada 4 kompetensi yang perlu dimiliki dimiliki oleh pengajar. Pertama keterampilan berpikir kritis dan pemecahan masalah. Merupakan kemampuan memahami suatu masalah, mendapatkan informasi sebanyak-banyaknya sehingga dapat dielaborasi dan memunculkan berbagai perspektif untuk menyelesaikan masalah. Pengajar diharapkan mampu meramu pembelajaran dan mengeksplor kompetensi ini kepada peserta didik. Kedua Keterampilan komunikasi dan kolaborasi. Keterampilan ini tidak luput dari kemampuan berbasis teknologi informasi, sehingga pengajar dapat menerapkan kolaborasi dalam proses pengajaran. Ketiga, kemampuan berpikir kreatif dan inovatif. Diharapkan ide-ide baru dapat diterapkan pengajar dalam proses pembelajaran sehingga memacu siswa untuk beripikir kreatif dan inovatif. Misalnya dalam mengerjakan tugas dengan memanfaatkan teknologi dan informasi. Keempat, literasi teknologi dan informasi. Pengajar diharapkan mampu memperoleh banyak referensi dalam pemanfaatan teknologi dan informasi guna menunjang proses belajar mengajar.

Tantangan lainnya yang timbul yaitu terkait sarana prasarana yang memadai. Misalnya peserta didik dari keluarga yang kurang mampu tidak memiliki laptop/*smartphone* tetap bisa mengikuti proses belajar mengajar. Kita juga harus memastikan setidaknya internet tersedia secara merata. Maka kebijakan ke depan sudah seharusnya memperhatikan beberapa hal tersebut

### ✓ **Kualitas Kesehatan Masyarakat**

Isu kualitas kesehatan masyarakat Kabupaten Tegal masih sangat diwarnai efek pandemi covid-19 di Kabupaten Tegal. Pada 02 Oktober 2020 secara akumulasi sudah terdapat 358 orang positif covid-19. Dari 358 orang tersebut 34 orang meninggal dunia, 216 orang sembuh, 30 orang masih dirawat di rumah sakit, dan sisanya 78 orang menjalani isolasi mandiri. Namun kondisi tersebut berubah drastis dalam beberapa bulan terakhir. Hingga 23 Maret 2021 secara akumulasi sudah terdapat 5.092 orang positif covid-19. Dari 5.092 orang tersebut 215 orang meninggal dunia, 4.746 orang sembuh, 33 orang masih dirawat di rumah sakit, dan sisanya 98 orang menjalani isolasi mandiri. Kondisi ini memberikan pukulan cukup telak terhadap efektivitas penanganan covid-19 di Kabupaten Tegal. Dengan kondisi yang belum bisa dipastikan kapan wabah akan berakhir, kesiapan sektor kesehatan kedepan harus lebih kuat. Kesiapan tenaga Kesehatan dari segi jumlah, kualitas, dan protokol keselamatan pelayanan kesehatan harus diutamakan. Sarana prasarana harus mencukupi setidaknya untuk menghadapi puncak kasus yang mungkin masih dapat terus meningkat.

Berbagai permasalahan sektor kesehatan, memunculkan tantangan tersendiri dalam peningkatan kesehatan masyarakat. Ada beberapa tantangan Kesehatan yang dihadapi masyarakat Kabupaten Tegal antara lain:

- Adanya wabah ini menyaratkan masyarakat untuk mampu menjalankan perilaku hidup bersih dan sehat sebagai bagian protokol kesehatan rutin di era *new normal*;
- Pemanfaatan teknologi dalam sector kesehatan kedepan bisa menjadi suatu kebutuhan. Rasa cemas masyarakat untuk datang secara langsung ke fasilitas kesehatan, membuat pelayanan kesehatan membutuhkan teknologi yang bisa mendukung masyarakat agar dapat berkonsultasi dengan dokter secara virtual. Pemerintah Kabupaten Tegal harus mampu menyediakan layanan Kesehatan online yang terinterasi dengan berbagai fasilitas layanan Kesehatan;
- Belajar dari proses dan kondisi penanganan pandemi covid-19 secara umum, maka system kesehatan harus lebih dikuatkan. Kesiapan dan penanganan menghadapi pandemi lainnya harus lebih baik. Mengingat pandemi itu bisa terjadi kapan saja.
- Penanganan dan pengelolaan limbah medis khususnya covid-19 harus dilakukan secara tepat dan aman.

#### ✓ **Kesetaraan dan Pemberdayaan Gender**

Isu kesetaraan dan pemberdayaan gender di Kabupaten Tegal masih menjadi prioritas dalam pembangunan kedepan. Beberapa poin yang perlu mendapat perhatian terutama terkait kekerasan terhadap perempuan dan anak serta pemberian kesempatan yang sama dalam berbagai aktifitas pembangunan.

#### **c. Pemulihan Ekonomi Lokal, Pariwisata, Industri Kreatif, dan Ketahanan Pangan**

Seperti yang telah kita ketahui bersama bahwa sector ekonomi adalah yang paling mendapatkan tekanan dari dampak pandemi covid-19. Kondisi ini memaksa seluruh pelaku usaha termasuk pelaku usaha di Kabupaten Tegal harus berupaya dengan segala cara agar tetap dapat bertahan. Namun disisi lain rusaknya struktur perekonomian secara luas justru berpotensi bagi semua pelaku usaha bisa mengambil peran pelaku usaha lainnya. Siapa yang *survive*, yang paling cepat pulih dan *inovatif* akan bisa merebut *market share* sebanyak-banyaknya.

Seperti yang kita ketahui bahwa sektor unggulan Kabupaten Tegal terdiri atas sektor industri pengolahan, pertanian (pertanian, kehutanan dan perikanan) dan perdagangan (perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda motor).

Dalam hal industri pengolahan, Kabupaten Tegal cukup terkenal dengan industri pengolahan logam dan pengolahan makan/minuman. Dalam kondisi masih terdampak covid-19 saat ini banyak sektor industri pengolahan yang sudah dan terancam gulung tikar akibat tidak mampu beradaptasi. Ini bisa menjadi ancaman sekaligus peluang bagi pelaku industri pengolahan di Kabupaten Tegal jika mampu *survive* dan *inovatif*. Kondisi saat ini memang sebagian besar permintaan produk industri manufaktur mengalami penurunan yang tajam. Maka dari itu pemerintah daerah bagaimana caranya harus mampu menyelamatkan eksistensi industri pengolahan yang ada untuk saat ini. Bersamaan dengan itu industri manufaktur harus diarahkan agar bisa melihat peluang produk industri manufaktur apa yang tingkat permintaannya tetap tinggi bahkan meningkat ditengah wabah covid-19 ini. Dengan melihat peluang

tersebut maka pelaku usaha lokal perlu dibantu dan difasilitasi agar bisa menghasilkan produk yang lebih terdiversifikasi sesuai permintaan pasar (berorientasi ekspor), khususnya yang ada keterkaitan (*interlinkage*) dengan sektor primer lokal. Industri pengolahan lokal harus mampu menciptakan nilai tambah (*value added creation*) produk-produk sektor primer lokal sekaligus didorong agar bisa berperan masuk ke sektor ekonomi yang ditinggalkan oleh industri ditempat lain. Atau minimal untuk saat ini peran sektor industri lokal yang ada tidak diambil oleh pelaku dari luar.

Untuk sektor pertanian, transformasi pertanian modern ramah lingkungan bisa menjadi opsi yang tepat. Dalam masa pandemi covid-19, permintaan produk pertanian khususnya pangan naik signifikan baik lingkup nasional bahkan global. Melalui modernisasi pertanian yang fokus pada produk kebutuhan pasar, diharapkan produk pertanian Kabupaten Tegal mampu mengambil bagian dalam pemenuhan permintaan produk pangan. Ketersediaan pangan saat ini masih dapat memenuhi kebutuhan masyarakat Kabupaten Tegal dan masih memiliki cadangan. Namun ada kecenderungan penurunan daya dukung pangan sampai 2024.

Transformasi sektor pertanian tidak boleh dianggap hanya sebatas mekanisasi (penerapan teknologi) saja. Namun transformasi pertanian modern juga mempunyai konsep bahwa petani sebagai pelaku utama perlu didorong untuk mampu menguasai hulu hingga hilir. Paradigma mereka harus dilatih agar tidak hanya selesai memproduksi hasil pertanian saja, namun juga bisa memberikan nilai tambah dari produk yang dihasilkan sekaligus memasarkannya. Melalui konsep seperti ini, tenaga kerja baru dapat terserap sekaligus menjadi salah satu solusi pengangguran akibat wabah covid-19 khususnya di wilayah perdesaan Kabupaten Tegal. Untuk itu transformasi pertanian modern di Kabupaten Tegal minimal harus memuat 2 (dua) unsur perubahan utama yaitu penguasaan teknologi dan paradigma hulu-hilir yang didukung dengan perlindungan bahkan perluasan lahan pertanian produktif.

Untuk sektor perdagangan, digitalisasi perdagangan diseluruh skala bisnis harus mulai diaplikasikan. Saat ini transaksi tatap-muka disemua lini perdagangan mulai bergeser ke system online. Selain dapat meningkatkan memanfaatkan ekonomi lainnya khususnya jasa kurir, sistem *online* juga dapat meluaskan pasar tidak hanya skala lokal bahkan menjangkau pasar internasional. Oleh karena itu pelaku usaha perdagangan harus mampu menguasai dan menjalankan mekanisme system online tersebut.

Disisi lain, era pandemi saat ini dengan segala keterbatasan mobilitas, Industri kreatif mempunyai peluang yang cukup besar. Misalnya dalam pendidikan, kita bisa menjual jasa mengajar online melalui *Skype*, *Zoom*, *Microsoft Teams*, dll. Juga disektor-sektor yang lain, baik fotografi, design dan editing, dan lain sebagainya. Untuk itu tantangannya ialah bagaimana menyiapkan masyarakat untuk memanfaatkan peluang bisnis dari industry kreatif itu sendiri.

Selain ketiga sektor tersebut, potensi lokal yang diprediksi mampu mengangkat perekonomian masyarakat ialah sektor pariwisata. Pengembangan pariwisata saat ini mempunyai tantangan yang cukup berat. Hal tersebut sangat dipengaruhi oleh dampak covid-19 yang hingga saat ini belum berakhir. Beberapa tantangan yang cukup strategis dalam pengembangan pariwisata antara lain:

- Kabupaten Tegal memiliki beragam potensi sumber daya alam dan keberagaman budaya yang dapat dijadikan sebagai wahana kepariwisataan. Pengembangan “pariwisata yang kekinian” tidak lagi hanya mengandalkan indahnya bentang alam, tetapi juga dengan memadukan potensi-potensi sektor lainnya, seperti

mengembangkan potensi wisata industri, wisata pendidikan, wisata kesehatan, dan wisata kebudayaan serta dikaitkan dengan potensi-potensi lain yang dapat dinilai sebagai sebuah keunikan untuk menjadi daya tarik wisata, baik wisatawan lokal maupun manca negara. Oleh karena itu tantangannya ialah bagaimana membangun pariwisata yang terintegrasi atau terkolaborasi dengan sektor lainnya khususnya terkait pelestarian budaya lokal untuk menjadi atraksi baru;

- Kabupaten Tegal yang berlokasi pada simpul persinggahan mobilitas antar daerah yang ditunjang akses jalan tol trans Jawa dan dengan kondisi topografi yang heterogen, serta memiliki karakteristik budaya lokal yang unik, tentunya memiliki banyak potensi wisata yang layak dikembangkan. Dampak positif bagi pariwisata Kabupaten Tegal dengan terbukanya akses jalan tol ruas pantai utara Jawa, perlu diantisipasi dengan perbaikan infrastruktur menuju lokasi wisata;
- Dalam kondisi pandemi covid-19 seperti ini, mobilitas masyarakat sangat dibatasi, hal ini mberpengaruh pada penurunan jumlah wisatawan baik local maupun mancanegara. Selain itu meskipun destinasi-obyek wisata bisa dibuka, namun syarat-syarat protokol kesehatan harus dijalankan secara ketat. Untuk itu tantangan agar pelaku usaha pariwisata dapat menerapkan protokol kesehatan sesuai standard menjadi suatu hal yang wajib diwujudkan;
- Untuk mengantisipasi geliat sektor pariwisata yang masih minim, maka pelaku usaha pariwisata perlu difasilitasi agar dapat melakukan diversifikasi usaha lain minimal sampai pandemi berakhir.

Dalam masa pasca dampak pandemi covid-19, suka tidak suka, mau tidak mau, era digital makin terakselerasi dengan cepat, terlebih dengan kondisi ini semua dipaksa untuk memahami digital lebih cepat. Untuk itu tantangannya ialah bagaimana menciptakan kolaborasi antara pariwisata, ekonomi kreatif, dan budaya serta kearifan lokal yang saling mendukung. Sebagai contoh, penjualan paket wisata *online* yang didalamnya terdapat banyak menu-menu jasa tambahan yang bisa dipilih calon pengunjung seperti jasa *fotografi*, jasa *tour guide* dan lain sebagainya.

Selain dapat dikolaborasikan, budaya dan kearifan lokal juga dapat berfungsi sebagai benteng identitas lokal Kabupaten Tegal. Era globaliasi memungkinkan masuknya budaya luar secara bebas. Masuknya budaya luar tanpa adanya filter yang kuat, maka dapat merusak bahkan mengganti budaya atau kearifan lokal yang ada di Kabupaten Tegal. Paling sederhana, Kabupaten Tegal mempunyai sejarah dan warna yang kuat dalam budaya perwayangan dan keagamaan. Namun lambat laut budaya tersebut mulai ditinggalkan khusunya oleh generasi muda yang lebih condong kebarat-baratan. Bahkan persepsi anak muda sekarang bahwa jika ada orang terutama generasi muda menyukai wayang dianggap kampungan. Padahal seni budaya wayang justru dihargai bahkan dikembangkan di negara barat seperti Belanda dan Perancis. Untuk itu tantangan budaya kedepan ialah bagaimana menguatkan kearifan lokal agar dapat berfungsi untuk:

- membentengi dari pengaruh dalam budaya luar yang tidak sesuai dengan adat ketimuran;
- menyerap dan memfilter budaya asing;
- memberikan arah pada pengembangan budaya.

#### **d. Pemerataan infrastruktur dasar dan Penyehatan Lingkungan Hidup**

##### **✓ Pemerataan Infrastruktur Dasar**

Berbagai aktifitas sosial-ekonomi dapat berjalan lancar jika didukung oleh infrastruktur yang memadai khususnya infrastruktur transportasi, air bersih, persampahan, sanitasi dan energi. Kondisi saat ini, infrastruktur jalan yang memadai jumlahnya masih sangat terbatas atau baru mencapai sekitar 50% dari total 958,32 km. Oleh karena itu pemerintah desa dengan segala sumberdayanya harus mampu mengambil peran dalam upaya peningkatan kualitas jalan tersebut sesuai kewenangannya. Selain itu terdapat Kegiatan Strategis Nasional yang berlokasi di Kabupaten Tegal antara lain pembangunan infrastruktur jalan Tol Trans Jawa, dan pembangunan jalur ganda kereta api, dengan lintasan sebagai berikut:

- Kabupaten Brebes, Tegal, Pemalang, Pekalongan, Batang, Kendal, Boyolali, Semarang, Sragen, Karanganyar serta Kota Semarang, Surakarta, Pekalongan, dan Salatiga berupa pembangunan infrastruktur transportasi ruas jalan Tol Trans – Jawa.
- Kabupaten Brebes, Tegal, Pemalang, Pekalongan, Batang, Kendal, Demak, Purwodadi, Blora, serta Kota Pekalongan dan Semarang berupa Pembangunan Jalur Ganda Kereta Api.

Pemenuhan layanan air bersih yang merata masih menjadi tantangan Pemerintah Kabupaten Tegal. Untuk itu kualitas pengelolaannya masih butuh akselerasi. Pengelolaan air bersih saat ini untuk perpipaan terbagi menjadi 2 (dua) pengelolaan SPAM PDAM untuk wilayah perkotaan dan SPAM Pamsimas untuk wilayah perdesaan, Untuk wilayah perkotaan saat ini sebagian besar sudah terlayani oleh SPAM PDAM, Namun saat ini menghadapi kendala yaitu terbatasnya sumber air baku di mana *idle capacity* SPAM PDAM tersisa tidak lebih dari 50 Liter/Detik. Sedangkan untuk SPAM PAMSIMAS saat ini telah ada di 120 Desa yang tentu saja masih dibutuhkan perluasan jaringan pemenuhan air bersih. Secara keseluruhan kebutuhan air (domestik, industri dan pertanian) tidak sebanding dengan kebutuhan atau terjadi defisit 682 juta m<sup>3</sup>/tahun. Beberapa daerah mempunyai daya dukung air yang rendah seperti Kec. Slawi, Bumijawa, Jatinegara terancam kekeringan dimusim kemarau di kecamatan yang DD Air rendah. Kecenderungan penurunan daya dukung air akan terus terjadi sampai 2024.

Dalam perspektif infrastruktur yang lebih luas, Kabupaten Tegal mempunyai tantangan yang cukup berat dalam hal penataan kota. Hingga kini, perkembangan perkotaan Kabupaten Tegal cenderung sporadic (*leap frog*) dan belum mempunyai bentuk yang jelas. Bisa dikatakan belum memiliki ikon perkotaan layaknya kota-kota yang ter-*design* dengan jelas. Untuk itu penataan kota menjadi isu yang cukup strategis kedepan, minimal Kabupaten Tegal memiliki icon perkotaan melalui penataan wajah kota Slawi.

Untuk mendukung penataan kota yang *representative*, pengelolaan sampah dan sanitasi wilayah harus berkualitas. Penanganan sampah meliputi penanganan persampahan rumah tangga baik di wilayah perkotaan maupun perdesaan. Pelayanan persampahan di perkotaan saat ini hanya mampu mencapai 25% yang terangkut ke TPAS Penujah, sedangkan 75% dikelola secara mandiri oleh masyarakat. Pelayanan persampahan di perkotaan hanya mampu melayani untuk kawasan komersial, perkantoran, perumahan, taman dan jalan. Sedangkan di wilayah perdesaan 100% masih dikelola mandiri oleh masyarakat. Permasalahan yang dihadapi dalam

pengelolaan sampah antara lain: Manajemen dan kualitas pengelolaan sampah yang belum baik dari hulu ke hilir (*waste management*), keterbatasan alat angkut, keterbatasan alat pengolahan/pemrosesan sampah pada TPAS, serta terbatasnya lahan TPAS Penujah. Dari sisi volume sampah masih ada kesenjangan antara produksi sampah dengan volume sampah yang terangkut. Dari data terakhir 2020 baru 47,29% dari total produksi sampah yang terangkut. Permasalahan yang dihadapi saat ini adalah *idle capacity* IPLT Penujah sudah mencapai 0%, perlu dilakukan upaya revitalisasi atau ekstensifikasi IPLT Penujah disamping upaya pengurangan dan pengelolaan sampah sebelum dibuang ke TPAS.

Untuk sanitasi, cakupan layanan untuk *on site system* sebesar 65% dari total penduduk Kabupaten Tegal, yaitu terdiri atas *sistem on site individual* (tangki septik) mencakup 63,85% dan sistem *on site* komunal (MCK, MCK++) mencakup 1,15%. Sedangkan cakupan layanan *off site system* di Kabupaten Tegal saat ini belum ada. Untuk itu sanitasi juga masih menjadi tantangan dalam penataan perkotaan. Sanitasi secara umum juga berkaitan dengan permukiman kumuh. Cakupan pelayanan permukiman kumuh masih sangat rendah. Untuk itu upaya penyediaan lingkungan sehat bagi masyarakat khususnya perkotaan perlu difokuskan pada penyediaan RTLH dan sanitasi sehat terutama jamban

Dalam hal konsep pengembangan wilayah, berdasarkan tingkat pelayanan dan pusat kegiatan, Kabupaten Tegal dapat dibagi menjadi 4 wilayah: 1) Kecamatan Slawi, Adiwerna, dan Kramat yang merupakan wilayah yang mempunyai sarana dan prasarana memadai; 2) Pangkah, Talang, Tarub, Margasari, Dukuhturi, Dukuhwaru, dan Balapulang yang didominasi oleh kegiatan perdagangan dan industri seperti di Kecamatan Pangkah yang terdapat pasar sebanyak 3 buah dan di Kecamatan Talang dengan sentra industrinya; 3) Kecamatan Lebaksiu, Suradadi, Bumijawa, Warureja, Bojong, Jatinegara yang memiliki kegiatan perekonomian yang cukup beragam dan potensi pertanian yang cukup bagus; dan 4) Kecamatan Pagerbarang dan Kedungbanteng di mana perkembangan keduanya masih tergolong lambat. Untuk itu tantangan dalam pengembangan wilayah secara umum adalah bagaimana menyejajarkan perkembangan wilayah di Kecamatan Pagerbarang dan Kedungbanteng agar sejajar dengan kecamatan lainnya. Dalam pelaksanaan pembangunan secara merata, ada kendala yang dirasa cukup mengganggu. Hal tersebut berkaitan dengan pembagian kewenangan dalam pengembangan infrastruktur wilayah antara Pemerintah Kabupaten dengan Pemerintah Desa. Untuk itu perlu ada sinkronisasi dan harmonisasi pelaksanaan pembangunan antara pemerintah kabupaten dan pemerintah desa.

#### ✓ **Kesehatan Lingkungan Hidup**

Kesehatan lingkungan hidup menjadi factor utama yang mempengaruhi kehidupan social masyarakat. Lingkungan sehat tidak hanya berkaitan erat dengan derajat kesehatan masyarakat namun juga mempengaruhi ekonomi dan kualitas hidup masyarakat. Kondisi saat ini manfaat lingkungan hidup dan manfaat ekonomi cenderung saling mengeliminasi. Untuk mendapatkan manfaat ekonomi yang sebesar-besarnya maka fungsi lingkungan hidup selalu dikorbankan.

Sebagai wilayah yang didominasi perekonomian berada pada sektor industri pengolahan dan pertanian, potensi ancaman degradasi lingkungan hidup di Kabupaten Tegal sudah mulai nyata. Limbah industri yang toksik yang tidak tertangani dapat memperburuk

kondisi lingkungan sekitar atau bisa menimbulkan kerusakan pada ekosistem lingkungan yang lain bahkan menimbulkan penyakit pada makhluk hidup yang terpapar. Sebagai contoh di Kecamatan Adiwerna sumber air tanah sudah mulai tercemari. Limbah industri keluarga, misalnya pewarna pakaian yang merupakan mata pencaharian pokok masyarakat di beberapa desa di Kecamatan Adiwerna dibuang lewat saluran air selokan langsung tanpa melalui proses pengolahan. Hal ini diperparah dengan limbah pengolahan logam dan peleburan aki yang berada tak jauh dari pemukiman warga telah mencemari ratusan sumur warga desa Pesarean. Air yang semula jernih tiba-tiba berubah warna dan beraroma tidak sedap, berminyak dan terasa lengket.

Selain pencemaran air, isu penurunan kesehatan lingkungan hidup di Kabupaten Tegal juga dipengaruhi oleh pencemaran udara yang cukup *massive*. Aktivitas pencemaran udara yang hingga saat ini belum terselesaikan adalah turunnya kualitas udara akibat pengolahan batu gamping atau kapur di Desa Karangdawa, Kecamatan Margasari. Aktivitas pembakaran dan debu ukuran mikro dalam pengolahan batu gamping banyak berterbangan di udara yang dapat menyebabkan penyakit ISPA.

Dari beberapa masalah kesehatan lingkungan di atas, jika tidak ditangani dan diantisipasi ke depan, maka skala kerusakan lingkungan dan dampak yang ditimbulkannya akan semakin luas. Oleh karena itu tantangan pembangunan kedepan adalah bagaimana meningkatkan pembangunan ekonomi tanpa mengorbankan kesehatan lingkungan hidup.

#### **e. Tata Kelola Pemerintahan dan Kualitas Pelayanan Publik, Penguatan Kelitbangan dan Teknologi Informasi**

##### **✓ Tata kelola pemerintahan dan Kualitas Pelayanan Publik**

Mewujudkan tata pemerintahan yang baik merupakan salah satu misi pembangunan jangka panjang Kabupaten Tegal. Dengan isu strategis tata kelola pemerintahan dan kualitas pelayanan publik, Pemerintah Kabupaten Tegal bertekad untuk mengembangkan etika birokrasi dan budaya kerja menuju birokrasi yang bersih, yaitu birokrasi yang jauh dari perilaku koruptif, birokrasi yang efisien dan hemat dalam menggunakan sumber daya yang terbatas, birokrasi yang transparan dan birokrasi yang melayani.

Dalam situasi pandemi covid-19 saat ini, pemerintah dihadapkan pada suatu dilema yang cukup menghambat. Disaat prinsip kehati-hatian untuk tetap menerapkan protokol kesehatan secara ketat, kualitas layanan publik harus tetap dijaga. Perubahan sistem kerja ASN di era *new normal* sangat dinamis. Jika terdapat kasus covid-19 terkonfirmasi di lingkungan kerja ASN, maka dalam seketika sistem kerja berubah dari "*work in office*" menjadi "*work at home*". Kondisi ini menuntut *mindset* budaya kerja yang masih menitikberatkan pada hierarki pangkat dan jabatan harus mulai diubah. Dalam keadaan yang normal, di mana seluruh situasi dan kondisi dapat berjalan tanpa hambatan, pelaksanaan program kerja berdasarkan hierarki ini masih dapat diterima, akan tetapi dalam situasi pandemi covid-19 ini, maka pegawai dari semua eselon wajib berani mengambil inisiatif sebagai konsekuensi berkurangnya intensitas bertemu secara langsung di lapangan atau ruangan kerja di kantor. Setiap pegawai dituntut untuk berpikir sebagai manajer, ikut memikirkan bagaimana sebuah pekerjaan dapat diselesaikan dengan baik. Alih-alih mempertahankan tingkat kepangkatan atau strata kelembagaan, sebaiknya tata kerja lebih dikembangkan berbasis jejaring atau

kerjasama antar instansi dan pejabat. Ada beberapa tantangan terkait pemerintahan di *era new normal* antara lain:

- Dalam pola pikir yang baru, semua pegawai harus mulai mengembangkan kecakapan berpikir lateral dan keberanian membuat eksperimen dengan tolak ukur resiko dan manfaat yang jelas;
- Budaya kerja yang masih menitikberatkan pada hierarki pangkat dan jabatan adalah pola pikir yang harus mulai diubah. Semua pegawai dari semua eselon wajib berani mengambil inisiatif dan tata kerja lebih dikembangkan berbasis jejaring atau kerjasama antar instansi dan pejabat;
- Mendorong *mindset* lama ke *mindset* baru bagi ASN;
- Mendukung kesiapan ASN dalam membangun budaya berteknologi; dan
- Dalam keadaan di mana kondisi moneter dunia saat ini sedang berada dalam ancaman resesi, maka perlu dilakukan sejumlah langkah pengamanan, khususnya terhadap neraca anggaran pemerintah daerah. Secara teknis, hal tersebut dapat berupa pembatasan kegiatan yang berbiaya besar, pengurangan pos-pos yang semula bersifat melibatkan pengumpulan massa, dan sebagainya;
- Mendorong semangat kepemimpinan yang berbudaya.

Secara keseluruhan masih banyak permasalahan dalam mewujudkan reformasi birokrasi di Kabupaten Tegal. Setidaknya terdapat delapan aspek yang perlu dibenahi yaitu aspek manajemen perubahan; aspek peraturan perundang-undangan; aspek kelembagaan; aspek ketatalaksanaan; aspek sumber daya aparatur; aspek pengawasan; aspek akuntabilitas kinerja dan aspek pelayanan publik. Dalam hal ketatalaksanaan, *e-goverment* sebagai sarana untuk mendukung kinerja organisasi belum diterapkan secara optimal.

Selain beberapa penjelasan sebelumnya, fungsi pemerintahan juga harus menjamin keamanan dan kenyamanan hidup masyarakatnya. Keamanan dan kenyamanan tersebut terutama berkaitan dengan bencana alam dan sosial. Sebagai daerah yang berada pada jalur rawan bencana, Kabupaten Tegal perlu melakukan upaya-upaya antisipatif dalam kesiapsiagaan bencana (mitigasi) di samping kesiapan penanggulangan kedaruratan bencana dan rehabilitasi rekonstruksi pasca bencana. Peta rawan bencana Kabupaten Tegal dapat digambarkan sebagai wilayah rawan bencana banjir di kawasan Pantura (Suradadi, Warureja, Kramat), rawan bencana kekeringan (Suradadi, Warureja, Kedungbanteng), rawan bencana kebakaran lahan (Pagerbarang, Balapulang, Lebaksiu), rawan bencana puting beliung (Kedungbanteng, Tarub), serta rawan bencana tanah bergerak dan tanah longsor (Pangkah, Bojong, Bumijawa). Sebagai bentuk kesiapsiagaan menghadapi bencana, tantangan kebencanaan kedepan ialah bagaimana menciptakan Desa Tangguh Bencana dan penyediaan *early warning system* cuaca dan iklim.

Selain bencana alam, isu bencana sosial juga perlu mendapatkan perhatian khusus. Kondisi saat ini, baik internasional, nasional, hingga lokal, stabilitas dan keamanan wilayah banyak dirusak melalui penyebaran berita *hoax* yang dapat memunculkan gesekan dimasyarakat. Kondisi masyarakat yang sedang tertekan secara ekonomi semakin mempermudah mereka mempercayai informasi tanpa diperiksa dahulu kebenarannya. Jika hal ini tidak diantisipasi, maka pelaksanaan pembangunan yang sudah sangat berat akibat pandemi covid-19 ini akan semakin sulit mencapai tujuannya.

### ✓ **Penguatan Kelitbangan dan Teknologi Informasi**

Saat ini Kabupaten Tegal sedang menghadapi dua peristiwa besar yang mempengaruhi kehidupan manusia, yaitu masa revolusi industri 4.0 dan pandemi covid-19. Kedua peristiwa tersebut mempunyai dampak yang luas pada kehidupan masyarakat Kabupaten Tegal. Perubahan itu termasuk perubahan budaya, perubahan cara kerja dan perubahan berpemerintahan (*era new normal*). Selain itu, sebagaimana RPJPD tahap IV yang menekankan pada **Akselerasi Proses Inovasi**. Untuk menjawab tantangan tersebut maka optimalisasi kelitbangan dan difusi teknologi informasi mempunyai peranan penting.

Aktifitas kelitbangan harus mampu memberikan nilai tambah inovasi pada tiap aktifitas pembangunan daerah terutama yang berkaitan dengan pencapaian tujuan sasaran pembangunan khususnya berkaitan dengan pemulihan ekonomi local. Akselerasi inovasi dan perubahan tersebut dapat diantisipasi melalui serangkaian proses kelitbangan yang relevan yang menghasilkan produk-produk baru, proses baru, dan jasa baru, yang kemudian akhirnya dapat dijadikan strategi utama dalam merespon perubahan dan tantangan yang ada. Oleh karena itu hasil kelitbang bisa memiliki dampak signifikan bagi pembangunan daerah. Beberapa kebijakan dapat dirumuskan dan diimplementasikan oleh pemerintah Kabupaten Tegal dengan mendasarkan hasil kelitbangan. Selain itu berbagai kebijakan pemerintah juga dapat dievaluasi melalui aktifitas kelitbangan, sehingga kebijakan-kebijakan yang kurang relevan saat ini bisa digantikan dengan kebijakan yang lebih relevan dan efektif.

Namun tantangan kelitbangan saat ini di Kabupaten ialah kita belum memiliki SDM Kelitbangan yang mumpuni, sementara tantangan kelitbangan kedepan semakin besar. Untuk itu beberapa hal yang dapat dilakukan saat ini dalam menjawab tantangan kelitbangan kedepan ialah dengan melakukan kerjasama dengan institusi lain seperti perguruan tinggi. Dengan adanya kerjasama ini diharapkan selain dapat menciptakan proses *transfer knowledge*, juga menghasilkan produk kelitbangan yang dapat menjawab tantangan yang ada.

Peranan teknologi informasi dalam menjawab tantangan revolusi industri 4.0 dan pandemi covid-19 ialah bisa menjadi katalis sekaligus akselerator. Difusi teknologi informasi harus masuk di berbagai aktifitas sosial ekonomi dan pemerintahan. Adanya difusi tersebut menjadi satu prasyarat utama Kabupaten Tegal bisa melaju ke arah *smart city*. Adapun *smart city* terdiri dari 6 (enam) pilar yaitu *Smart Governance*, *Smart People*, *Smart Living*, *Smart Mobility*, *Smart Economy*, dan *Smart Environment*. Namun dengan melihat kondisi saat ini maka tantangan TI untuk menuju *smart city* yang paling relevan direspon saat ini ialah berkaitan dengan pengembangan dan penguatan *Smart Economy* dan *Smart Governance*. Untuk itu infrastruktur TI harus disiapkan berkaitan dengan pengembangan dan penguatan tersebut.

### ✓ **Kerjasama dan Kondusifitas Wilayah**

Kerjasama dan kondusifitas menjadi salah satu pintu keberhasilan pembangunan di suatu daerah. Berbagai aktifitas pembangunan dapat mencapai tujuannya jika dilakukan atas dasar kerjasama yang efektif dari seluruh *stakeholder*. Apalagi dalam perspektif pembangunan yang sifatnya kawasan maka kerjasama yang baik mutlak menjadi kunci keberhasilannya. Dalam rangka mengakselerasi pembangunan kawasan Bregasmalang, kabupaten tegal beserta seluruh kabupaten/kota yang tergabung didalamnya harus bekerjasama secara simultan, efektif dan sinergi satu dengan yang

lainnya. Ada beberapa isu pembangunan Kabupaten Tegal terkait pembangunan kawasan bregasmalang yang memerlukan kerjasama dengan kabupaten/kota sekitarnya antara lain Kerjasama SPAM Bregas, Kerjasama TPA Regional, Kerjasama Kawasan Industri Brebes. Dengan adanya kerjasama yang efektif dan sinergi yang baik diharapkan seluruh kabupaten/kota dalam kawasan Bregasmalang dapat mendapatkan manfaat tumbuhnya ekonomi wilayah.

Selain kerjasama yang baik, untuk mewujudkan tujuan pembangunan maka harus didukung oleh kondusifitas wilayah yang baik. Berbagai potensi gangguan keamanan harus dapat diantisipasi dan dimimalisir agar tidak mengganggu jalannya pembangunan yang ada. Apalagi dengan pesatnya teknologi informasi yang ada, maka arus informasi semakin cepat menyebar tanpa terfilter terlebih dahulu. Informasi-informasi *hoax* menjadi ancaman yang mampu menggerakkan masa dan menciptakan gangguan keamanan wilayah. Apalagi dalam beberapa tahun kedepan akan dilaksanakan pesta demokrasi Pilkada dan Pilpres yang berdasarkan pengalaman yang telah lalu mampu menimbulkan perpecahan dan friksi dimasyarakat yang menjurus pada disintegrasi bangsa. Untuk itu kondusifitas wilayah menjadi isu penting kedepan.

#### ✓ **Mitigasi Risiko Pembangunan**

Setiap aktivitas pembangunan yang dilakukan tidak terlepas dari adanya risiko yang dapat berpengaruh pada pencapaian tujuan. Risiko yang dihadapi jika tidak dikelola dengan baik dapat menyebabkan tujuan suatu pembangunan tidak tercapai. Untuk itu setiap aktifitas pembangunan khususnya yang prioritas harus dapat mengenali risiko yang mungkin dihadapi serta mencari alternatif atas suatu risiko yang mungkin muncul. Jika suatu risiko atas suatu aktivitas pembangun dapat dinilai dan diantisipasi secara dini maka dapat mengakselerasi tingkat capaian target suatu pembangunan. Untuk itu kombinasi antara budaya, sistem, dan proses yang dilakukan oleh suatu instansi/organisasi untuk mengkoordinasikan, mengidentifikasi, dan mengelola risiko menjadi kunci penting. Oleh karena itu mitigasi risiko pembangunan dalam tata kelola penyelenggaraan pemerintahan yang baik menjadi isu umum pembangunan di Kabupaten Tegal

#### **4.2.5. Keterkaitan Isu Strategis KLHS, Isu Strategis dan Isu Strategis Provinsi dan Isu Strategis Nasional dan Isu Strategis Global**

Isu strategis Kabupaten Tegal didesain dengan mempertimbangkan isu strategis provinsi, nasional dan global. Dengan demikian, pelaksanaan isu strategis dalam penjabaran visi dan misi Kabupaten Tegal tidak terlepas dari isu-isu strategis yang ada. Berikut disajikan keterkaitan isu strategis dan isu strategis provinsi dan isu strategis nasional dan isu strategis global.

**Tabel 4. 8**  
**Keterkaitan Isu Strategis KLHS, Isu Strategis dan Isu Strategis Provinsi dan Isu Strategis Nasional dan Isu Strategis Global**

| No | Tujuan TPB                                                                                                                                                                                                                                                      | ISU KLHS                                                                                           | Isu Strategis                                                                                                                                                      | Isu Provinsi (RPJMD)                                   | Isu Nasional (RPJMN)                                                            |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
|    |                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                    |                                                                                                                                                                    |                                                        |                                                                                 |
| 1  | Tujuan Pembangunan Berkelanjutan 1 (TPB 1): Mengurangi Kemiskinan terutama dibidang kesehatan, ketenagakerjaan, dan sosial                                                                                                                                      | Penekanan laju kemiskinan dan pengangguran, Daya saing ekonomi dan peningkatan kesempatan berusaha | Menekan Laju Kemiskinan dan Pengangguran                                                                                                                           | Penanggulangan Kemiskinan                              | Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan      |
| 2  | Tujuan Pembangunan Berkelanjutan 8 (TPB 8): Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, kesempatan kerja yang produktif dan menyeluruh serta pekerjaan yang layak terutama di bidang pengurangan terbuka dan setengah penganggur          |                                                                                                    |                                                                                                                                                                    | Daya saing ekonomi dan peningkatan kesempatan berusaha | Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan      |
| 3  | Tujuan Pembangunan Berkelanjutan 2 (TPB 2): Menghilangkan kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan gizi yang baik, serta meningkatkan pertanian berkelanjutan terutama di bidang ketersediaan pangan utama (beras dan asupan kalori diatas 1.400 kkal/kap/hari) | Kualitas derajat kesehatan masyarakat                                                              | Pemulihan Ekonomi Lokal, Pariwisata, Industri Kreatif, dan Ketahanan Pangan; Tata Kelola Pemerintahan dan Kualitas Pelayanan Publik, Penguatan Kelitbangan dan TIK | Kedaulatan pangan dan energi                           | Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan |

| No | Tujuan TPB                                                                                                                                                                                                                                              | ISU KLHS                                                                               | Isu Strategis                | Isu Provinsi<br>(RPJMD)                                | Isu Nasional (RPJMN)                                                            |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
|    |                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                        |                              |                                                        |                                                                                 |
| 4  | Tujuan Pembangunan Berkelanjutan 8 (TPB 8): Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, kesempatan kerja yang produktif dan menyeluruh serta pekerjaan yang layak terutama pertumbuhan PDRB                                       | Daya saing ekonomi dan peningkatan kesempatan berusaha                                 |                              | Daya saing ekonomi dan peningkatan kesempatan berusaha | Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan |
| 5  | Tujuan Pembangunan Berkelanjutan 8 (TPB 8): Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, kesempatan kerja yang produktif dan menyeluruh serta pekerjaan yang layak terutama peningkatan jumlah wisatawan mancanegara dan nusantara |                                                                                        |                              | Kedaulatan pangan dan energi                           | Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan |
| 6  | Tujuan Pembangunan Berkelanjutan 2 (TPB 2): Menghilangkan kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan gizi yang baik, serta meningkatkan pertanian berkelanjutan terutama dibidang penurunan AKI, AKB dan AKABA                                            | Kualitas dan daya saing sumber daya manusia; dan Kualitas derajat kesehatan masyarakat | Kualitas Sumber Daya Manusia | Peningkatan kualitas dan daya saing sumberdaya manusia | Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing             |

| No | Tujuan TPB                                                                                                                                                                                                                 | ISU KLHS                                                                                 | Isu Strategis                                                  | Isu Provinsi<br>(RPJMD)                                                                                | Isu Nasional (RPJMN)                                                            |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
|    |                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                          |                                                                |                                                                                                        |                                                                                 |
| 7  | Tujuan Pembangunan Berkelanjutan 2 (TPB 2): Menghilangkan kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan gizi yang baik, serta meningkatkan pertanian berkelanjutan terutama di bidang peningkatan APK dan APM PAUD, SD, dan SMP |                                                                                          |                                                                |                                                                                                        | Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing             |
| 8  | Tujuan Pembangunan Berkelanjutan 2 (TPB 2): Menghilangkan kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan gizi yang baik, serta meningkatkan pertanian berkelanjutan terutama penurunan kekerasan terhadap anak dan perempuan     | Kualitas derajat kesehatan masyarakat; dan Kesenjangan gender dan pemberdayaan perempuan |                                                                |                                                                                                        | Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing             |
| 9  | Tujuan Pembangunan Berkelanjutan 15 (TPB 15): Pelestarian dan pemanfaatan ekosistem daratan terutama konservasi lahan kritis                                                                                               |                                                                                          |                                                                |                                                                                                        | Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim |
| 10 | Tujuan Pembangunan Berkelanjutan 12 (TPB 12): Menjamin pola produksi dan konsumsi yang berkelanjutan terutama dalam pengelolaan sampah                                                                                     | Keberlanjutan pembangunan dengan daya dukung lingkungan dan SDA                          | Pemerataan infrastruktur dasar dan Penyehatan Lingkungan Hidup | Keberlanjutan Pembangunan Dengan Memperhatikan Daya Dukung Lingkungan dan Kelestarian Sumber Daya Alam | Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim |
| 11 | Tujuan Pembangunan Berkelanjutan 6 (TPB 6): Menjamin ketersediaan serta                                                                                                                                                    |                                                                                          |                                                                | Kesenjangan Wilayah                                                                                    | Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan                           |

| No | Tujuan TPB                                                                                                                                                                                                            | ISU KLHS                                                                        | Isu Strategis | Isu Provinsi                                                                      | Isu Nasional (RPJMN)                                                                                                                                  |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                 |               | (RPJMD)                                                                           |                                                                                                                                                       |
|    | pengelolaan air bersih dan sanitasi yang berkelanjutan untuk semua terutama untuk akses air minum layak dan sanitasi                                                                                                  |                                                                                 |               |                                                                                   | Ekonomi dan Pelayanan Dasar                                                                                                                           |
| 12 | Tujuan Pembangunan Berkelanjutan 9 (TPB 9): membangun infrastruktur yg tangguh, meningkatkan industri inklusif dan berkelanjutan serta mendorong inovasi terutama jalan dalam kondisi baik                            |                                                                                 |               |                                                                                   | Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar                                                                     |
| 13 | Tujuan Pembangunan Berkelanjutan 10 (TPB 10): mengurangi kesenjangan intra dan antar negara terutama pengembangan desa mandiri                                                                                        |                                                                                 |               |                                                                                   | Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar                                                                     |
|    |                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                 |               | Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar |                                                                                                                                                       |
| 14 | Tujuan Pembangunan Berkelanjutan 11 (TPB 11): menjadikan kota dan permukiman yang inklusif, aman tangguh dan berkelanjutan terutama penyediaan rumah layak huni serta penanganan mitigasi dan tanggap darurat bencana |                                                                                 |               | Keamanan dan ketertiban wilayah; dan Keberlanjutan pembangunan                    | Tata Kelola Pemerintahan dan Kualitas Pelayanan Publik, Penguatan Kelitbangan dan TIK: Sub-Isu Bencana Alam dan Sosial dan Kerjasama dan Kondusivitas |
| 15 | Tujuan Pembangunan Berkelanjutan 13 (TPB 13): mengatasi langkah segera                                                                                                                                                | Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim |               |                                                                                   |                                                                                                                                                       |

| No | Tujuan TPB                                                                                                                                           | ISU KLHS                              | Isu Strategis              | Isu Provinsi<br>(RPJMD) | Isu Nasional (RPJMN)                                                 |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------|-------------------------|----------------------------------------------------------------------|
|    |                                                                                                                                                      |                                       |                            |                         |                                                                      |
|    | untuk mengatasi perubahan iklim dan dampaknya terutama penanganan mitigasi dan tanggap darurat bencana                                               | dengan daya dukung lingkungan dan SDA |                            |                         | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik |
| 16 | Tujuan Pembangunan Berkelanjutan 16 (TPB 16): perdamaian, keadilan dan kelembagaan yang kokoh terutama reformasi birokrasi                           | Tata kelola pemerintah yang baik      |                            |                         | Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan                           |
| 17 | Tujuan Pembangunan Berkelanjutan 17 (TPB 17): mengurangi kesenjangan intra dan antar negara terutama peningkatan pertumbuhan ekspor produk non migas |                                       | Bukan Kewenangan Kabupaten |                         |                                                                      |

Sumber: Bappeda dan Litbang Kabupaten Tegal, 2021

#### 4.2.6. Keterkaitan ISU Tahap IV RPJPD dan Isu Strategis Kabupaten Tegal 2019-2024

Tabel 4. 9

Keterkaitan Isu Strategis KLHS, Isu Strategis dan Isu Strategis Provinsi dan Isu Strategis Nasional dan Isu Strategis Global

| No | Isu RPJPD Tahap IV                                              | Isu Strategis Kabupaten Tegal                                                                       |
|----|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | Pembangunan Gender                                              | Kualitas Sumber Daya Manusia                                                                        |
| 2  | Ekonomi Kreatif Masyarakat                                      | Pemulihan Ekonomi Lokal, Pariwisata, Industri Kreatif, dan Ketahanan Pangan                         |
| 3  | Kelestarian Lingkungan Hidup                                    | Pemerataan infrastruktur dasar dan Penyehatan Lingkungan Hidup                                      |
| 4  | Kesenjangan Kesejahteraan, Infrastruktur Dasar dan Kualitas SDM | Kualitas Sumber Daya Manusia                                                                        |
|    |                                                                 | Menekan Laju Kemiskinan dan Pengangguran                                                            |
|    |                                                                 | Pemerataan infrastruktur dasar dan Penyehatan Lingkungan Hidup                                      |
| 5  | Reformasi Birokrasi                                             | Tata Kelola Pemerintahan dan Kualitas Pelayanan Publik, Penguatan Kelitbang dan Teknologi Informasi |
| 6  | Kerjasama dan Kondusifitas Wilayah                              |                                                                                                     |

Sumber: Bappeda dan Litbang Kab. Tegal, 2021